

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

1 TAHUN MENTERI

JOHNNY G. PLATE

Edisi 22
Oktober 2020



TIM REDAKSI

Pengarah:
Rosarita Niken
Widiastuti

Wakil Pengarah:
Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Ferdinandus Setu

**Wakil
Pimpinan Redaksi:**
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
Frans Bambang Irawan,
M. Taufiq Hidayat,
Verawati,
Annisa Bonita P.

Reporter:
Patricia Samantha S.
Yusuf

Fotografer:
Agus Yudi Harsono,
Doni Paulus Sumule,
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka,
Rahma Aulia Indroputri,
Lamdza Rachmattunisa,
Tommy Tirtawiguna

Produksi:
Fahmi Trihatin J.,

Setahun Menteri Johnny

Sejak awal kalender anno domini dibuat, peringatan satu tahun terasa sakral dan penuh makna. Berbekal prinsip heliosentris yang dipertahankan oleh Galileo Galilei, periode edar bumi mengelilingi matahari menandakan perubahan yang selalu dinanti. Harapan perubahan itu pula yang mewarnai setahun Kabinet Indonesia Maju pada Pemerintahan Jokowi-Amin. Berarti pula harapan perubahan atas setahun kepemimpinan Johnny Gerard Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Usai dilantik bersama-sama dengan 34 Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka pada 23 Oktober 2019, Menteri Johnny langsung menerima memori jabatan dari Menteri Kominfo RI 2014-2019: Rudiantara. Pada hari itu, Menteri Johnny langsung memberikan arahan kepada pejabat Kementerian Kominfo yang hadir mengenai pentingnya penguatan komunikasi publik. "Agar rakyat tahu capaian-capaian negara. Jangan sampai tidak tahu dan tak bisa memanfaatkannya. Kita punya infrastruktur informatika, platform, baik *fixed broadband* maupun *mobile broadband*. Rakyat perlu tahu ada di mana itu, sehingga bisa digunakan. Jangan sampai infrastruktur besar yang sudah kita bangun tadi, tidak bisa secara optimal digunakan oleh bangsa Indonesia," jelas Menteri Johnny sebagaimana termuat pada Siaran Pers Kementerian Kominfo No 198/HM/

KOMINFO/10/2019, Rabu, 23 Oktober 2019.

Lebih lanjut Menteri Johnny menegaskan, komunikasi kebijakan merupakan salah satu fungsi utama dari Kementerian Kominfo yang harus berjalan seimbang. "Sangat dibutuhkan agar rakyat tahu arah kebijakan pemerintah, jadi bisa ambil bagian langsung, bukan sebagai penonton. Jangan sampai rakyat jalan sendiri ke kiri, pemerintah ke kanan. Kita ingin pemerintah dan rakyat ketemu di satu simpul," lanjut Menteri Johnny.

Selama satu tahun kepemimpinan Menteri Johnny G Plate dari 23 Oktober 2019 hingga 23 Oktober 2020, tercatat lebih dari 150 siaran pers diterbitkan oleh Kementerian Kominfo RI. Melalui siaran pers tersebut tergambar jejak peristiwa bagaimana Menteri Johnny memimpin kementerian ini melalui beragam kebijakan publik dan regulasi.

Pada gelaran jumpa pers perdana di Jakarta pada 29 Oktober 2019, Menteri Johnny memaparkan fokus kerja lima tahun 2019 s.d. 2024. Menurut Menteri Johnny ada 2 (dua) prinsip utama di dalamnya, yaitu Government Public Relation (GPR) dan infrastruktur digital.

"Pada prinsipnya kegiatan Kominfo dibagi dua. Pertama adalah Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), dengan menjadi *government public relation* (GPR) yang menginformasikan kebijakan-kebijakan negara. Sementara kegiatan Kominfo lainnya terkait hal teknis, khususnya infrastruktur digital dan ekonomi digital," papar Menkominfo.

Menteri Johnny pun menambahkan, *cyber security*



turut menjadi perhatian, di mana dibutuhkan konsolidasi bersama antar lembaga negara dalam mengatasi *cybercrime*. "Bersama-sama dengan lembaga negara lainnya untuk memastikan menjadi *cyber security* dan *cybercrime* bisa diatasi. Kita berharap agar infrastruktur dan platform digital yang kita miliki bisa digunakan untuk kepentingan kemajuan bersama dalam menghadapi globalisasi." Tambahnya.

Ketika kasus pertama COVID-19 diumumkan oleh Presiden Jokowi, Menteri Johnny pun mulai merapatkan barisan Kominfo untuk ambil bagian dalam upaya memutus penyebaran virus tersebut. Pada pertemuan dengan Forum Pemred di Jakarta 3 Maret 2020, Menteri Johnny G. Plate berharap, seluruh elemen masyarakat, termasuk ekosistem pers di Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah saling menjaga ruang publik. Hal itu ditujukan agar bisa mengendalikan dampak penyebaran virus Corona atau Coronavirus (COVID-19). Semua pihak harus turut serta mengendalikan dampak COVID-19, menjadi perisai untuk bangsa dan negara. Dalam situasi yang tengah berkembang saat ini, membutuhkan kerja sama, baik pemerintah, masyarakat dan pers di Tanah Air.

Dalam pertemuan International Telecommunication Union (ITU) Virtual Digital World 2020 yang berlangsung secara virtual pada 21 Oktober 2020, Menteri Johnny menegaskan empat inisiatif Indonesia dalam mempercepat transformasi digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan upaya Indonesia mempercepat transformasi digital sebagai upaya mengatasi pandemi COVID-19 dan memulihkan perekonomian nasional.

Menteri Johnny menyatakan, pandemi telah membentuk kembali cara hidup dan kegiatan ekonomi. Pada saat yang sama, krisis juga telah mempercepat laju transformasi digital. Menurutnya untuk menggairahkan kembali perekonomian, Indonesia harus mengoptimalkan peluang ekonomi signifikan yang muncul dari transformasi digital.

Inisiatif pertama adalah peningkatan infrastruktur *digital last-mile*. Indonesia menargetkan untuk menggelar infrastruktur jaringan 4G di 12.548 desa yang belum terjangkau jaringan 4G, dari total 83.218 desa di Indonesia. Pembangunan infrastruktur di seluruh desa ditargetkan selesai pada tahun 2022. Kita juga berencana meluncurkan Satelit High Throughput SATRIA-1 untuk menyediakan akses internet di 150.000 titik akses publik, guna menjangkau cakupan

penuh dari 500.000 titik akses publik pada kuartal ketiga 2023.

Inisiatif kedua adalah adopsi beberapa teknologi pendukung untuk memajukan program pembangunan infrastruktur secara masif dengan memperkuat ekosistem digital. Visi tersebut diwujudkan melalui upaya kami dalam mendirikan Pusat Data Nasional dan Pusat Pemantauan Telekomunikasi Nasional.

Inisiatif ketiga berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan 9 juta talenta digital dalam lima belas tahun ke depan. Pengembangan talenta digital dengan pendekatan komprehensif yang berfokus pada peningkatan literasi digital, peningkatan keterampilan dan daya saing digital, serta mendorong pembuatan kebijakan yang lebih baik untuk ekonomi digital.

Inisiatif keempat berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Menteri tentang Penyelenggara Sistem Elektronik di Sektor Swasta. Regulasi ini akan membantu menumbuhkan lingkungan inovasi yang kondusif serta memastikan kebutuhan perlindungan data pribadi terpenuhi.

Majalah Kominfo Next edisi Oktober 2020 ini secara khusus mengupas perjalanan setahun kepemimpinan Menteri Johnny membangun sektor komunikasi dan informatika.

Selamat membaca

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat



@FSetu



@FSetu



FSetu TV

Daftar

Isi

2 Surat dari MMB 9

5 Perspektif Menteri

8 Rak Buku

14 Teknologi & Gadget

20 Kabar dari Istana

22 Menkominfo Bicara

26 Liputan Utama

74 Opini Stakeholder

100 Liputan Khusus

114 Kabar Seputar COVID-19

116 Kabar Seputar COVID-19



UUCK

untuk **Sebesar-besarnya**
Kemakmuran
Rakyat

Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) memang merupakan sebuah kerja besar, dengan ruang lingkup yang sangat besar. Oleh sebab itu tingkat kompleksitasnya sangat tinggi. Wajar jika tak semua kepala puas dengan isinya. Tidak mungkin 200 juta kepala lebih manggut-manggut semua menyetujui tanpa syarat. Apalagi banyak yang belum benar-benar membaca dan memahaminya.

UU ini berusaha menyelesaikan berbagai permasalahan lintas-sektoral sekaligus, dapat langsung meng-amandemen beberapa UU sekaligus, termasuk dalam soal telekomunikasi, yang menjadi domain kita. Dengan UUCK ini, kita yang berada di sektor Kominfo mendapat banyak keuntungan yang selama ini sudah dirindukan.

UUCK ini memberi “rejeku nomplik” bagi sektor telekomunikasi, yaitu tambahan spektrum frekuensi. Bayangkan, sebelumnya sebesar 328MHz spektrum frekuensi dihabiskan “hanya” untuk siaran televisi terestrial analog. Padahal dunia sudah hijrah dari televisi analog ini. Semua menuju TV digital. Apa kata dunia jika jaringan TV terestrial kita masih analog?

Dengan keharusan Analog Switch Off (ASO) yang diperkuat dengan UUCK, maka tiba-tiba, *mak bedunduk* kata orang Jawa, kita memiliki frekuensi “nganggur” sebesar 112MHz. Spektrum 112MHz itu tersedia pada frekuensi 700MHz. Ini bisa digunakan untuk mempercepat transformasi digital kita, terutama penyediaan *mobile broadband* pada sektor pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan bencana.

Masyarakat diuntungkan sekali. Pada satu sisi mendapatkan kualitas televisi yang lebih baik dan lebih variatif. Di sisi lain mendapatkan layanan masyarakat yang lebih baik karena tambahan kanal dan spektrum frekuensi.

Menurut kajian Boston Consulting Group, pemanfaatan frekuensi 700 MHz untuk *mobile broadband* akan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia berupa: penambahan Kenaikan PDB; penambahan lapangan kerja baru; penambahan peluang usaha baru; dan penambahan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ingat, frekuensi adalah sumber daya yang terbatas. Oleh sebab itu harus dikembalikan penggunaannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Industri Efisien, Masyarakat Diuntungkan

Meskipun sangat vital perannya, namun secara bisnis industri telekomunikasi tetap harus melakukan efisiensi. Tidak bisa lagi mereka jor-joran dalam bidang marketing maupun pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur pasif, seperti BTS berikut menar-menaranya.

Selama ini infrastruktur pasif yang dibangun oleh masing-masing pelaku industri, selain telah menyebabkan biaya tinggi, juga berdampak pada pembangunan tata kota, sehingga kadang terlihat semrawut dan tak terkoordinasi.

Dengan pendekatan *infrastructure sharing*, bahkan *frequency sharing*, yang diamanatkan UUCK, industri akan dapat melakukan efisiensi secara optimal. Pada gilirannya nanti, industri telekomunikasi dalam negeri akan dapat mampu bersaing dengan global player termasuk *over the top* (OTT).

Nah, bagi masyarakat apa dampaknya? UUCK ini dengan sangat sistematis juga mencegah potensi dampak negatif *network sharing* ini. Caranya bagaimana? Yaitu dengan penetapan tarif batas atas dan batas bawah. Dengan UUCK, pemerintah dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi. Dengan cara ini industri dapat bersaing lebih sehat, tetapi kepentingan masyarakat juga dilindungi secara ketat.

Peluang Usaha Era Digital Lebih Terbuka

Dengan kewajiban untuk efisiensi industri yang diamanatkan UUCK, peluang masyarakat untuk menangkap potensi mahadahsyat dari ekonomi digital makin terbuka luas.

UUCK mewajibkan pelaku usaha pemilik infrastruktur pasif untuk membuka akses bagi penyelenggara telekomunikasi dengan prinsip kerja sama. Istilahnya *network sharing*. Demikian juga pelaku usaha yang memiliki infrastruktur aktif dapat membuka akses pemanfaatan kepada penyelenggara telekomunikasi atau penyiaran melalui kerja sama saling menguntungkan.

Pada saat yang sama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memberikan fasilitasi dan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam membangun infrastruktur telekomunikasi.

Salah satu contoh: kelak lembaga penyiaran memiliki hak untuk melakukan usaha tidak hanya di bidang penyiaran. Ini agar mereka dapat berkompetisi secara lebih luas dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informatika. Jangan sampai mereka hanya bisa memandangi dari jauh pemanfaatan teknologi seperti 5G, misalnya. Sebagai pelaku industri digital, mereka juga harus bisa memanfaatkannya. Apalagi telah memiliki kompetensinya. Hal yang sama juga berlaku untuk lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan yang sebelumnya bidang usahanya hanya terbatas bidang penyiaran.

Lembaga Penyiaran juga akan dapat melakukan siaran dengan cakupan wilayah siaran seluruh Indonesia. Hal ini akan mendorong efisiensi dan pengembangan usaha yang lebih fleksibel dan luas. Kewajiban PNBPN Lembaga penyiaran diatur berdasarkan zona/daerah penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat ekonomi setiap zona/daerah.

Situasi ekonomi dunia sedang ada dalam era yang memprihatinkan akibat pandemi COVID-19. Tanpa berbuat sesuatu, atau melakukan sesuatu secara biasa-biasa saja, tanpa terobosan, dapat dipastikan kita akan makin terpuruk. Tertinggal oleh negara-negara lain. UU Cipta Kerja ini adalah salah satu terobosan kita sebagai bangsa. Salah satu yang terbaik, prospektif, dan tepat waktu.

“

Perpustakaan Kominfo



Lantai 1 Gedung B
Kementerian Kominfo

Senin s.d Jumat
08.30 s.d 15.30

Rak Buku



Penulis :
Astrid savitri

Menggali Pundi-Pundi Lewat Tren Sosial Media

Kemunculan media sosial seperti Facebook, Youtube, Twitter, dan Instagram memberikan ruang dan kesempatan tanpa batas bagi penggunaannya untuk bereksplorasi. Selain mendapatkan informasi tentang hal-hal menarik yang mendukung hobi, *passion*, dan pekerjaan, sosial media juga membuka peluang besar untuk mendapatkan penghasilan dan ketenaran. Begitu banyak lahan pekerjaan baru bermunculan, mulai dari Youtuber, Blogger, Vlogger, hingga Influencer.

Rak Buku



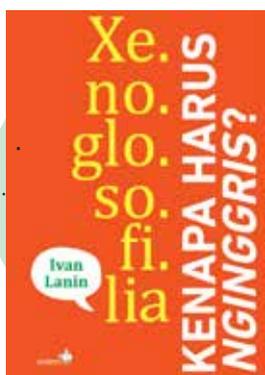
Penulis :
**Irma El- Mira
Arif Ishartadi**

Seni Memilih dan Memutuskan Sebuah Pilihan

Buku ini mengajak Anda untuk mengenal pilihan yang Anda buat dengan baik. Anda akan diajak untuk mengetahui setiap alasan dan sebab munculnya pilihan dalam kehidupan. Dengan demikian, Anda pun akan lebih siap dalam memilih dan memutuskan pilihan yang ada di hadapan Anda.

Dengan pembahasan yang disertai contoh-contoh pilihan yang biasa dilakukan setiap hari, buku ini dapat membimbing Anda untuk menerima dan memahami makna sejati sebuah pilihan dan bagaimana seharusnya Anda menghadapinya.

Rak Buku



Penulis :
Ivan Lanin

Xenoglosofilia : kenapa harus nginggris?

Buku Xenoglosofilia: Kenapa Harus Nginggris? ini merupakan kumpulan tulisan Ivan Lanin, seorang Wikipediawan, tentang bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari. Tulisan ini menyadarkan kita, pengguna bahasa, bahwa selama ini telah abai berbahasa Indonesia dengan baik, dan lebih senang berbahasa asing, khususnya Inggris.

Digital Dilemma

Dyah Purwaningrum
Koordinator Penyusunan Anggaran
Biro Perencanaan

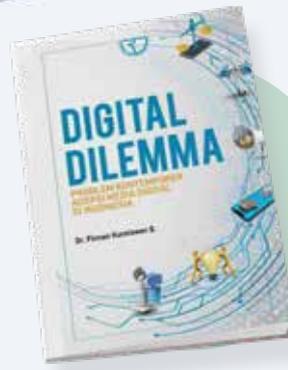


Dilema

“Situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan; situasi yang sulit dan membingungkan”.

Buku *Digital Dilemma* merupakan kumpulan dari tulisan pendek Firman Kurniawan (Penulis) dan telah dipublikasikan di berbagai media nasional yang dikelompokkan secara tematik dalam 5 (lima) bagian: Adopsi Digital; Dunia Digital dan Gaya Hidup; Media Digital; Ilmu Pengetahuan dan Problem Kebenaran; Dilema Digital, Demokrasi dan Politik Praktis; dan Media Digital dan Persoalan-persoalan Etika. Yang menggelitik adalah, Penulis mengingatkan bahwa kita sekarang yang sedang menikmati kemajuan teknologi digital dengan kemudahan dan kecepatan (dalam) pencapaian hidup, sesungguhnya kita sedang menghadapi ancaman hidup miskin makna. Woah!

Book Review

**Digital Dilemma:**

Problem Kontemporer Adopsi Media Digital di Indonesia

Penulis :

Dr. Firman Kurniawan S

Penerbit :

Rajawali Pers

Kata 'ancaman' atau atribut 'miskin' yang bikin kita terhenyak? Ancaman nyata dari keberadaan teknologi yang sedemikian canggih adalah mempertanyakan makna (keberadaan) manusia itu sendiri. Adakah pengertian manusia masih tetap seperti awalnya atau sudah sebagai era *posthuman*? Eksistensi manusia sepertinya telah tergantikan dengan perangkat cerdas yang semakin hari semakin identik dengan kemanusiaan pemiliknya. Hayo, ngaku! Siapa di antara kita yang saat bangun tidur, benda yang pertama kali diraih, dilihat dan dibaca adalah *smartphone*?

Smartphone memang cenderung menjadikan hidup lebih mudah, di mana pembuatan keputusan bisa lebih cepat dibuat dan bahkan produktivitas (diklaim) jadi lebih lipat-lipat. *Smartphone* semakin hari semakin identik dengan kemanusiaan pemiliknya. Dengan perangkat cerdas ini, manusia ternyata mengalami ekstensi yang menggantikan eksistensinya sebagai manusia itu sendiri. Nah, loh! Akibatnya, kita yang haus akan informasi menciptakan ketergantungan terhadap perangkat *mobile* (khususnya *smartphone*), dan perangkat *mobile* kemudian mendorong penggunaan informasi yang semakin banyak.

The question is: semua informasi (yang banyak banget) itu diperlukan nggak, sih? Di era *first mobile culture*, penulis menjabarkan

bahwa manusia memiliki pengetahuan yang sesungguhnya tidak ingin dimilikinya. Saat ini, di seluruh dunia, umat manusia mengalami banjir informasi. Saat ini adalah era intensifnya penggunaan mikroelektronik, yang disebut-sebut sebagai “tsunami informasi”. Ledakan ini akan hanya menjadi masalah ketika tidak semua informasi itu benar dan berguna. *Hoping that you do not find this (book) review useless.*

Pola peredaran informasi melalui medium teknologi informasi, saking raksasa jumlahnya, disayangkan tidak memberikan kesempatan cukup bagi khalayak guna bisa mencerna dengan seksama. Semua informasi yang jumlahnya melimpah, akan diterima secara cepat dalam masyarakat jejaring [*network society*]. Itulah bagian dari risiko yang mesti kita pikul bersama. Risiko yang mana? Ketika hampir semua orang sudah (dapat) menggunakan perangkat teknologi untuk mengakses informasi, penggunaan yang masif di masyarakat umum serta merta juga meningkatkan (derasnya) arus informasi. Pada kondisi masyarakat ini lah, kemudian Penulis menyatakan bahwa hanya tersedia 2 (dua) pilihan: berada dalam informasi (ikut terbawa arus) atau memilih punah. *So, are you in or out?*

Basically, setiap jaman punya gaya dan setiap gaya punya jaman. Makanya jangan heran kalau terdapat cukup banyak unjuk rasa yang (katanya bertujuan) menolak berbagai rancangan undang-undang, dengan *genre* komunikasinya adalah komunikasi politik, tuntutan kadang disampaikan ke khalayak dengan cara menghibur. Penonton bisa dibuat tersenyum bahkan tertawa karenanya. Contoh hangat, demo penolakan RUU Cipta Kerja. Di beberapa *platform* media sosial, khususnya TikTok, disertai *background* lagu ‘I love you/Saranghae – Treasure’ atau ‘Ampun bang Jago – Tian Storm’, banyak pendemo yang menjadi hits sesaat karena polah tingkah mereka (utamanya mahasiswa) yang lucu tersajikan dalam video saat mereka unjuk rasa. Silahkan *search hashtags* #mahasiswacaper #tolakomnibuslaw untuk lihat aksi panggung mereka.

Multimedia, jadi tuntutan eksistensial sebuah konten. Khalayak dengan berbagai karakteristik, butuh tampilan konten informasi yang hadir di aneka rupa media. Tak heran jika gaya unjuk rasa menyesuaikan diri pada paradigma digital ini. Dilema dalam konteks demo seperti di atas mencari pembenaran atas tujuan dari tuntutan atau masuknya kepentingan yang tidak murni dari tuntutan mahasiswa. Disinyalir cukup banyak hoaks beredar terkait

RUU. Hoaks adalah anak kandung komunikasi digital. Penulis menjelaskan bahwa dalam konteks hoaks, pelaku difasilitasi menjadi *anonym*, memproduksi informasi sebanyak mungkin, menambahkan atau mengurangi informasi pihak lain sedemikian rupa sehingga berbeda dari aslinya dan mendistribusikan informasi pihak lain tanpa memeriksa kebenarannya.

Lalu apa musuh masyarakat terbuka digital yang jadi dilema? Ideologi Totalitarian yang dijalankan oleh kelompok yang hendak merebut kebebasan. Mekanismenya, akumulasi pengetahuan yang membentuk ilmu pengetahuan, sengaja dicampur dengan informasi palsu, hoaks. Sehingga ilmu pengetahuan yang terbentuk terbelokkan oleh kehendak Kaum Totaliter tadi yang akhirnya akan mengendalikan kebebasan masyarakat terbuka. Nyatanya, komunikasi digital tak selalu membiarkan hal baik (tersampaikan).

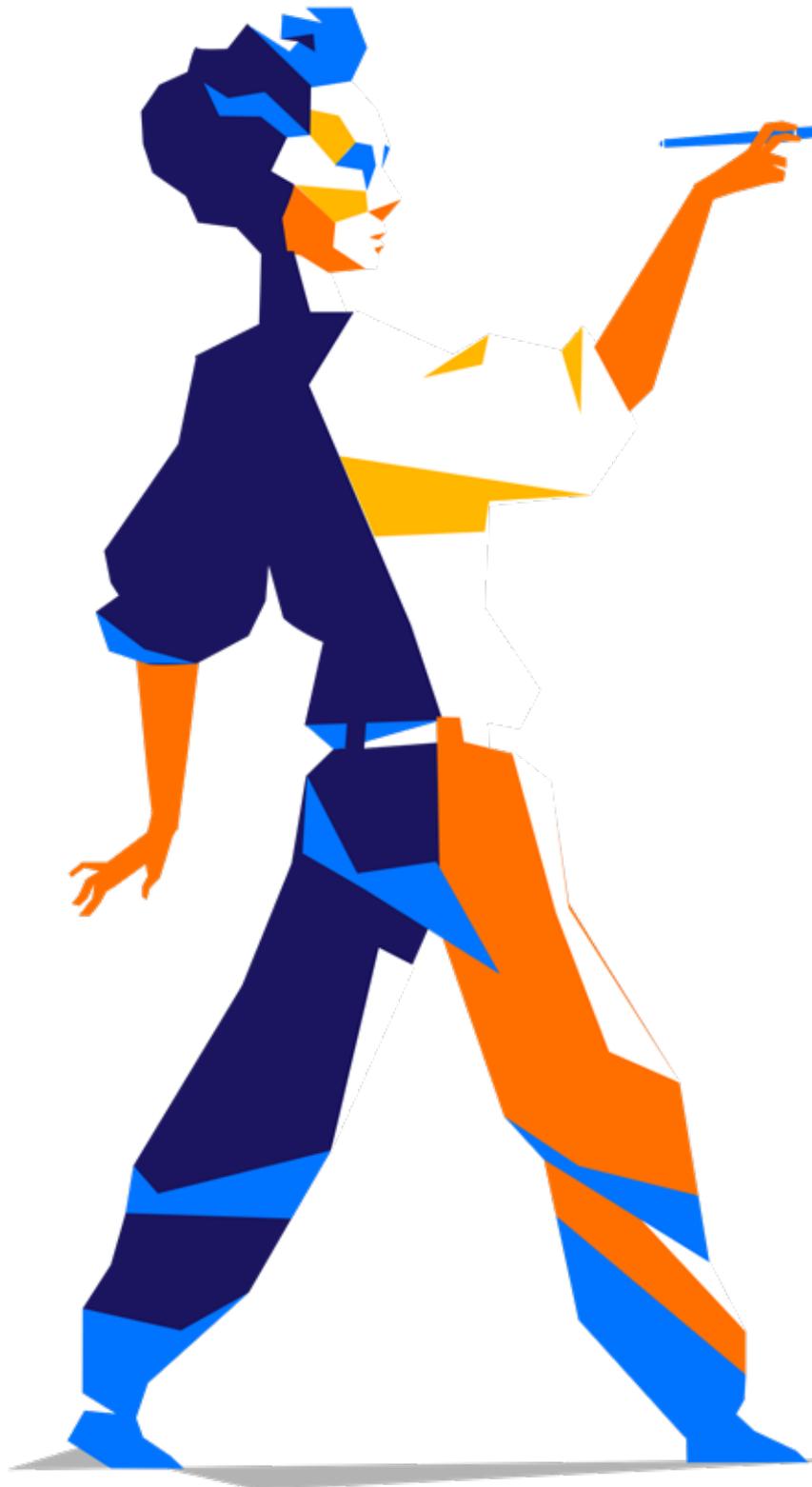
Peredaran masif hoaks yang cenderung masih tidak terkendalikan, membuat kita tambah bingung akan realitas. Kita kerap sulit membedakan antara (informasi) yang benar dan mana yang termanipulasi. Kita sebagai konsumen tentunya punya hak penuh, kebebasan untuk memilih, apakah energi hoaks tadi dijadikan sebagai penopang ekosistem atau sebaliknya jadi energi (niat) baik. Menurut data, material negatif memiliki pasar dan pembeli yang bersedia membayar peredarannya. Tetapi hati-hati, sudah ada (jeratan) UU ITE membayangi jika nekad ikut-ikutan (sengaja atau tidak sengaja) aktif menyebarkan hoax di media sosial.

Media sosial, sedikit banyak adalah panggung sirkulasi panjat sosial dan ketidakbahagiaan yang sambung menyambung. Realitas hari ini ditandai dengan kemesraan jari kita dengan *keyboard* perangkat pada segala waktu dan tempat. Tidak lagi ditunda oleh kalkulasi penting atau tidaknya isi informasi. Dunia diwarnai oleh tema “rasa merasa”. Bahkan emosi remeh temeh yang harusnya

tabu, dipertontonkan dengan sukarela di hadapan publik. Emosi itu diganjar dengan *like, comment, love, retweet, regram*. Kita ternyata mudah jatuh dalam ilusi “telah melakukan tindakan nyata yang berguna bagi masyarakat”. Jangan kaget jika ternyata ideologi viral (*trending topic dan most view*) bisa dijadikan bahan pertimbangan pemberitaan bahkan *policy* para pengambil keputusan.

Emosi bisa bangkit melalui media perangkat digital dan menularkannya luas pada masyarakat jejaring (*network society*). Jangkauannya pun, melampaui ruang dan waktu. Penulis dalam banyak tulisannya di buku, kerap menyinggung tentang hal ini. Harus diakui, perkembangan teknologi informasi menyisakan berbagai kegagapan. Ingat, *platform* digital bukanlah halaman belakang rumah kita, yang kadang kita biarkan tidak tertata, lantaran mata umum memang tak diharapkan berlabuh *to our backyard*. Menjadi dilema juga: apakah *platform* (digital) sosial adalah milik privat, sehingga aktivitas paling privat pun dapat ditampilkan untuk kemudian dikonsumsi publik? Ataukah *platform* (digital) sosial adalah ruang publik, sehingga tampilan-tampilan panggung depan saja yang layak dipertontonkan?

Kekhasan hidup di era *network society* adalah penggunaan informasi sebagai bahan baku dalam membentuk jejaring yang saling bergantung dan menghidupi. Struktur jejaring terdiri dari *node* sebagai titik mula yang diperankan manusia. Manusia kemudian membangun relasi dengan *node* lain karena dan untuk kepentingan tertentu. Kita telah menjadi bagian dari masyarakat yang tinggal dalam kehidupan yang dipindahkan ke dalam berbagai perangkat (*mobile*) informasi yang praktis, besar memori, mudah dioperasikan dan gampang dibawa kemanapun. Lebih gilanya, ada pendapat bahwa semakin kompleks juga kemampuan berpikir (manusia) yang dapat digantikan oleh perangkat dimaksud, kecuali soal emosi saja yang masih diragukan bisa digantikan.





Network society pun terlatih mengemas emosi secara mengesankan, demi apa? Kenikmatan yang mencandu. *Addiction*. Aktif dalam berbagai modus teknologi informasi mungkin mendatangkan risiko yang menempatkan orang pada jebakan tertentu. Perkembangan teknologi hari ini harus dibaca sebagai perubahan manusia dan budaya nir kesiapan emosi. Apa yang hilang dari keterjebakan ini adalah kemungkinan runtuhnya pertahanan kita, bahkan pertahanan nasional menurut Penulis. Jangan pernah mau terjebak dalam ketenaran akibat penggunaan berlebihan teknologi digital yang semu.

Teknologi digital punya 2 (dua) rupa: wajah penuh keramahan yang menawarkan berbagai kemudahan dan kemungkinan tak terhingga dan wajah penuh kengerian yang dipenuhi energi negatif, *toxic*, menjebak, menebarkan kesadaran palsu, penuh tipu daya hingga wajah yang mampu mengaburkan kebenaran. Akan tetapi, era teknologi digital tidaklah melulu tentang alat, aplikasi, ekosistem yang hanya cocok bagi manusia dalam rentang usia tertentu. Pada akhirnya, bukan teknologi digital yang mempersempit ruang, tapi ketidaksiadaan untuk mengubah diri menjadi hambatan utama. Makanya, memelihara kelangsungan hidup masyarakat yang terbuka terhadap dampak teknologi informasi, harus kita lewati dengan sikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Suatu sikap yang meletakkan setiap ilmu pengetahuan berada dalam posisi: kemungkinan bisa salah atau kemungkinan bisa benar.

Ketergantungan terhadap perangkat *mobile* kemudian mendorong penggunaan informasi yang kian masif. Setiap keinginan untuk memperoleh informasi selalu didahului oleh pencarian melalui perangkat *mobile* atau disebut sebagai *mobile moment* dan telah mentransformasi budaya. Semua hal, tidak bisa dilepaskan dari informasi: ekonomi, politik, sosial dan tidak terkecuali budaya. Interaksi terjadi dengan memanfaatkan medium digital: web, sosial media maupun aplikasi. Budaya (baru) yang memindahkan ruang interaksi informasi itu disebut *space of flow* [ruang-ruang aliran]. Ruang yang terbentuk oleh aliran atas implikasi terbentuknya jaringan. Alamat eksistensi manusia yang berpindah dari ruang *actual* ke *space of flow* yang multidimensi.

Di dalam *space of flow* ini, manusia kemudian mengalami multi-waktu [*timeless time*], keadaan dimana kita berada di ruang berbeda akan tetapi pada saat yang (hampir) bersamaan. Ketika kita sedang membuka Instagram, kita bisa langsung beralih pindah ke Facebook, lompat lagi ke platform TikTok, lalu ke Twitter dan seterusnya. Satu sisi, hal ini menunjukkan produktivitas yang meningkat juga kecepatan pertukaran (informasi), tetapi Penulis mempertanyakan apakah dengan begitu hidup kita menjadi lebih berkualitas? Dilematis, huh?!

TEKNO LOGI & GAD GET

Gadget untuk Dapur Anda

Setiap tanggal 16 Oktober, dunia memperingati Hari Pangan Sedunia atau World Food Day. Tahun 2020, Hari Pangan Sedunia mengambil tema "Grow, Nourish, Sustain. Together Our Actions Are Our Future" yang juga menandai ulang tahun ke-75 Food and Agriculture Organization (FAO). Berbicara tentang pangan, tentunya tidak lepas dari bagaimana manusia melakukan pemrosesan bahan-bahan pangan untuk bisa menjadi makanan konsumsi di masyarakat.

Teknologi peralatan pemrosesan pangan tersebut terus berkembang dari waktu ke waktu. Dari awalnya hanya menggunakan pisau dapur, wajan, panci pengukus dan alat-alat konvensional lainnya, hingga kini telah berkembang ke alat-alat yang bisa meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan bahan pangan di dapur rumah tangga. Dalam edisi ini, kita akan membahas alat-alat terkini untuk memproses bahan pangan yang biasa digunakan di masyarakat.

Food Processor

Pekerjaan dasar dalam mengolah bahan pangan di dapur yaitu memotong, mengiris, mencincang, memarut, membuat adonan sampai dengan membuat jus. Pekerjaan tersebut bisa dikerjakan pada satu alat yang sering disebut *food processor*.

Dalam memilih suatu *food processor*, Sobatkom bisa mempertimbangkan beberapa hal, yang paling utama tentunya fungsi *food processor* yang akan digunakan. Ada *food processor* yang hanya memiliki beberapa fungsi tetapi ada juga yang memiliki sampai dengan 10 fungsi dalam 1 alat.

Selain fungsi, beberapa *food processor* mendukung portabilitas, dengan bentuk yang *compact* serta tanpa membutuhkan daya listrik. Seperti misalnya *food processor* dari Swift Chopper yang ditujukan bagi anda yang suka *travelling* dan ingin tetap mengolah makanan kesukaan anda.



Food Processor dengan brand Mayaka ini memiliki 10 fungsi dalam 1 alat



Food processor praktis dari Swift Chopper ini memiliki fungsi memotong, menggiling dan mengiris tanpa memerlukan daya listrik



Sumber Foto :
img.my-best.id, KitchenAid

Air Fryer

Menggoreng bisa disebut merupakan cara mengolah makanan paling favorit masyarakat Indonesia. Sangat mudah kita menemukan produk olahan pangan dengan teknik ini mulai dari di pinggir jalan hingga di restoran elit sekalipun.

Masyarakat Indonesia terbiasa menggoreng makanan dengan menggunakan minyak goreng, baik yang berasal dari minyak sawit, minyak kelapa, minyak zaitun dan jenis minyak lainnya. Tekstur makanan yang digoreng menimbulkan sensasi renyah dan garing yang tidak bisa dihasilkan dari teknik memasak lainnya seperti mengukus dan merebus. Rasa makanan juga relatif lebih gurih ketika digoreng dan tentunya menggoreng tidak membutuhkan waktu lama.

Salah satu kelemahan dari teknik menggoreng ini yaitu kandungan lemak yang tinggi pada makanan yang dihasilkan, termasuk didalamnya lemak jenuh, asam lemak tak jenuh tunggal



dan tak jenuh ganda yang berasal dari minyak goreng. Lemak ini bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh yang berimbas pada kesehatan seseorang. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, banyak yang mulai menghindari produk goreng-gorengan demi menghindari timbunan lemak dalam darah.

Namun, saat ini sudah ada alternatif bagi Sobatkom yang 'kangen' gorengan tapi tetap ingin menghindari lemak-lemak yang dihasilkan dari proses menggoreng tersebut. Teknik baru yang dinamakan *air frying* menjadi solusi yang bisa ditempuh Sobatkom semua. Alat yang dipakai bernama *air fryer* yang melakukan 'penggorengan' makanan tanpa menggunakan minyak, namun menggunakan udara panas. *Air fryer* ini juga bisa memeras lemak-lemak yang ada di kandungan makanan seperti dari kulit ayam, lemak daging, sehingga menghasilkan produk makanan yang hampir tidak mengandung lemak. Produk *air fryer* bisa Sobatkom tebus di pasaran dengan harga Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 2jt rupiah.



Sumber Foto :
Bukalapak, Amazon

Bread Maker



Bagi beberapa orang, membuat roti merupakan kesenangan tersendiri, terlebih jika bisa mengkreasiannya menjadi berbagai macam bentuk dan rasa. Tetapi, untuk membuat roti sendiri di rumah, peralatan yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Kerepotan dan kerumitan tiap-tiap tahapnya juga bisa cukup menyita waktu selama di dapur.

Saat ini, sudah hadir alat yang bernama *bread maker*. Alat multifungsi ini bisa menyulap Sobatkom yang belum pernah membuat roti, menjadi seorang ahli dalam beberapa saat. *Bread maker* bekerja secara otomatis untuk mengaduk, menguleni, fermentasi, hingga memanggang roti sampai matang. Sobatkom cukup mencampur bahan-bahan yang diperlukan dalam satu wadah, mensesting alat dan *voila*, roti segar setiap hari bisa tersaji di dapur rumah.

Keunggulan utama dari alat ini yaitu anti gagal. Yup, tingkat kegagalan hasil olahannya terbilang cukup kecil meskipun Sobatkom belum pernah sama sekali membuat roti. Kunci keberhasilan yaitu Sobatkom musti mengikuti resep dengan benar, mulai dari takaran hingga urutan memasukkan bahan harus sesuai dengan petunjuk yang ada di resep.

Sumber Foto : www.williams-sonoma.com, Amazon



Juicer

Era COVID-19 membuat masyarakat mulai beralih ke pola gaya hidup sehat, baik dengan berolahraga secara teratur, maupun menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Jenis makanan yang direkomendasikan untuk mendukung pola hidup sehat ini yaitu buah dan sayur. Namun, rasa sayur dan buah yang mungkin tidak senikmat *junk food* bagi sebagian orang, membutuhkan pengolahan lebih lanjut agar dari sisi rasa sesuai dengan lidah namun tanpa kehilangan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh.

Juicer membuat kita bisa menikmati buah dan sayur dengan cara yang lebih menyenangkan. Berbeda dengan *blender*, *juicer* melakukan ekstraksi sari buah dan sayuran tanpa campuran air. Selain itu juga, ketika menggunakan *juicer*, Sobatkom tidak perlu memotong/mencacah buah dan sayur menjadi beberapa bagian, sehingga praktis tanpa kehilangan nutrisi pada buah dan sayuran tersebut.

Rentang harga *juicer* ini bervariasi mulai dari harga Rp. 250.000 hingga mencapai Rp. 5.000.000.



Sumber Foto : Hurom.com

Sumber Foto : beautyfoodblog.com

Presiden: Persiapkan Rencana Vaksin COVID-19 dengan Baik



<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-persiapkan-rencana-vaksin-COVID-19-dengan-baik/>

“

Selain persiapan matang yang dibutuhkan terkait pengadaan dan distribusi vaksin, edukasi mengenai rencana tersebut juga harus dilakukan dengan baik.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk mempersiapkan dengan detail dan hati-hati rencana pemberian vaksin COVID-19. Selain persiapan matang yang dibutuhkan terkait pengadaan dan distribusi vaksin, edukasi mengenai rencana tersebut juga harus dilakukan dengan baik.

“Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks. Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, komunikasi publiknya terutama, yang berkaitan dengan halal dan haram, harga, kualitas, dan distribusinya seperti apa,” ujarnya saat memimpin Rapat Terbatas mengenai antisipasi penyebaran COVID-19 saat libur panjang akhir Oktober tahun 2020, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Menurut Presiden, hal mendasar yang harus dijadikan perhatian ialah pada saat tahap implementasi nanti di mana hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan sehingga perlu kehati-hatian demi keselamatan dan kesehatan masyarakat.

“Titik kritis dari vaksinasi nanti adalah di implementasi. Jangan menganggap mudah implementasi. Tidak mudah. Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul kepada publik. Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan,” tuturnya.

Pelatihan-pelatihan bagi tenaga medis dan pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan rencana vaksinasi tersebut juga dipandang perlu untuk memperoleh pelatihan yang memadai. Sebagaimana diketahui, vaksin-vaksin tersebut memerlukan perlakuan khusus hingga nanti diberikan kepada masyarakat.

“Karena vaksin pun ini harus mendapatkan treatment dan perlakuan yang spesifik. Tiap vaksin beda-beda. Saya minta ini dilibatkan WHO Indonesia agar mereka bisa memberikan *training-training* sehingga standarnya menjadi jelas,” ucap Presiden.

Presiden : Semangat Sumpah Pemuda Harus Tetap Menyala

“

Di momen Sumpah Pemuda ini, Presiden juga meresmikan TVRI Stasiun Papua Barat sebagai stasiun TVRI ke-30.

Peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi 92 tahun yang lalu, tepatnya 28 Oktober 1928, merupakan sebuah peristiwa penting yang sangat bersejarah. Saat itu, para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara menyisihkan berbagai perbedaan di antara mereka, baik suku, agama, maupun bahasa daerah, untuk bersumpah menjadi Indonesia yang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.

Saat memberikan sambutannya pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 secara virtual sebagaimana diunggah oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 28 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa semangat Sumpah Pemuda yang terjadi 92 tahun silam, harus tetap ada pada saat ini untuk menghadapi dunia yang berubah dengan cepat dan penuh dengan persaingan.

“Kini, 92 tahun telah berlalu, semangat Sumpah Pemuda harus terus menyala menghadapi dunia yang berubah dengan cepat,” ujar Presiden.

Dalam arus besar globalisasi, lanjut Presiden, yang sering terjadi adalah persaingan yang sengit antarnegara dan juga antarindividu.



Tidak jarang kompetisi itu berujung pada upaya saling mengalahkan dan saling menghancurkan yang kemudian menjadi energi negatif yang merugikan.

“Sumpah Pemuda justru membawa energi positif yang menyatukan. Persaingan dan perbedaan tidak harus membuat kita melupakan adanya masalah-masalah bersama, kepentingan-kepentingan bersama, maupun tujuan-tujuan bersama. Yang semuanya bisa kita selesaikan dengan cara bersatu dan bekerja sama,” jelasnya.

Kepala Negara berpandangan bahwa bersatu dan bekerja sama adalah kunci untuk mencapai Indonesia Maju. Untuk itu, upaya-upaya untuk menjaga persatuan harus terus dilakukan. Menurutnya, menjadi Indonesia tidak cukup hanya dengan menjadi bagian dari wilayah Indonesia.

“Kita harus bekerja sama merawat keindonesiaan. Keindonesiaan harus selalu dijaga dengan semangat solidaritas dan rasa persaudaraan. Kita harus saling membantu satu sama lain dalam semangat solidaritas. Tidak ada Jawa, tidak ada Sumatera, tidak ada Sulawesi, tidak ada Papua, yang ada adalah saudara sebangsa dan setanah air,” tegasnya.

Persatuan harus terus diperjuangkan dengan menghargai perbedaan, menjaga toleransi, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Untuk mewujudkan Indonesia yang satu, seluruh komponen bangsa harus bekerja sama membangun Indonesia secara adil dan merata, membangun Indonesia sentris dengan membangun dari

pinggiran, desa, pulau terdepan, hingga perbatasan.

“Kita juga membangun infrastruktur yang memudahkan konektivitas antarwilayah, antarpulau untuk mempersatukan Indonesia. Dengan pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka masyarakat Papua, masyarakat Aceh, dan masyarakat Indonesia di berbagai wilayah merasa menjadi bagian dari Indonesia, merasa memiliki Indonesia, serta ikut berkontribusi untuk memajukan Indonesia,” paparnya.

Salah satu sarana untuk mengetahui wajah Indonesia dan berbagai perkembangan yang terjadi di Indonesia dan dunia adalah melalui televisi. Apa yang terjadi di Papua dapat diketahui oleh masyarakat di Jawa, Sumatera dan sebagainya. Sebaliknya, apa yang terjadi di berbagai wilayah Tanah Air juga dapat diketahui oleh masyarakat di Papua.

Untuk menegaskan keseriusan komitmen untuk menjaga persatuan dan pemerataan akses informasi, di momen Sumpah Pemuda yang ke-92 ini, Presiden Joko Widodo juga meresmikan TVRI Stasiun Papua Barat sebagai Stasiun TVRI yang ke-30. Stasiun ini akan melayani masyarakat Papua, menyediakan berbagai informasi berkualitas, sehingga masyarakat Papua mendapatkan akses informasi yang sama dengan masyarakat di wilayah Indonesia lainnya.

“Dengan mengucap bismillahirrahmannirrahim saya resmikan Stasiun TVRI di Papua Barat. Teruslah bekerja menjadi media pemersatu bangsa,” tandasnya.

<https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-semangat-sumpah-pemuda-harus-terus-menyala/>

Akselerasi Akses Internet di Puskesmas dan Rumah Sakit

untuk Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemerintah berkomitmen melakukan akselerasi penyediaan akses internet di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) di seluruh Indonesia. Hal itu ditujukan untuk mendukung perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi di bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan upaya itu merupakan prioritas yang perlu dilakukan untuk percepatan penanganan Covid-19. Khususnya dalam tiga agenda utama yaitu optimalisasi telekomunikasi antar dan intra fasyankes, peningkatan kualitas arus data fasyankes, serta pemanfaatan aplikasi kesehatan berbasis digital khususnya di daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

"Layanan akses internet ini akan mencakup rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang belum memiliki akses internet atau yang sudah tersedia namun kualitasnya belum memadai," ujarnya dalam Konferensi Pers Virtual Akselerasi Penyediaan Akses Internet di Puskesmas dan Rumah Sakit di Indonesia dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dari Media Center KPCPEN Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Mengutip data Kementerian Kesehatan, Menteri Johnny menunjukkan hingga 31 Desember 2019 terdapat 2.877 rumah sakit dan 10.134 puskesmas di Indonesia. Dari total 13.011 fasyankes tersebut, BLU (Badan Layanan Umum) BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) Kementerian Kominfo mengidentifikasi 3.126 fasyankes yang masih membutuhkan optimalisasi layanan internet.

"Dari 3.126 titik tersebut, di tahun 2019, BLU BAKTI Kominfo telah menyediakan akses internet di 226 titik fasyankes. Sedangkan pada tahun 2020 ini, melalui kerjasama dengan Komite Penanganan



COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), BLU BAKTI Kominfo akan melakukan percepatan layanan internet di 2.192 fasyankes,” tutur Menteri Kominfo.

Menteri Johnny menyatakan, akses internet untuk 708 fasyankes sisanya, akan diselesaikan pada kuartal I tahun 2021 mendatang. “Dengan demikian Kementerian Kominfo akan menuntaskan penyediaan akses internet di seluruh fasyankes pada kuartal I tahun 2021,” ungkapnya.

Dukung Program Kesehatan

Ketersediaan akses internet di fasyankes diharapkan dapat mendukung program-program kesehatan masyarakat untuk jangka panjang. Baik penurunan angka kematian ibu dan bayi, mencegah stunting, mendukung program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, dan peningkatan layanan kesehatan melalui *telemedicine*.

“Pemerintah berharap bahwa ketersediaan akses internet dapat mendukung program-program kesehatan masyarakat untuk jangka panjang. Poin terakhir ini sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam Percepatan Transformasi Digital Nasional, sesuai dengan arahan Presiden Bapak Joko Widodo,” papar Menteri Kominfo.

Untuk merealisasikan arahan Presiden tersebut, menurut Menteri Johnny, saat ini Kementerian Kominfo sedang menyusun *Roadmap* Indonesia Digital. “Di mana salah satu program yang termuat dalam *roadmap* tersebut adalah peningkatan akses layanan kesehatan,” tegasnya.

Beberapa inisiatif yang masuk dalam *Roadmap* Indonesia Digital khususnya sektor kesehatan hingga tahun 2024 antara lain:

- **Perluasan jangkauan infrastruktur digital** dalam mendukung layanan kesehatan melalui *telehealth/telemedicine*;
- **Penerapan registrasi kesehatan digital nasional**, termasuk manajemen data dan *health record*;
- **Pengembangan hub dan ekosistem teknologi medis**
- **Penerapan *analytics* untuk manajemen penyakit** (antara lain untuk meningkatkan akurasi diagnosa);
- **Perluasan pelacakan kontak; dan**
- **Implementasi digitalisasi untuk mendorong hidup yang lebih sehat.**

Selain penyediaan akses internet, Menteri Kominfo menyarankan Pemerintah juga terus melakukan peningkatan literasi digital dan penyiapan talenta digital untuk mendukung pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan.

"Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan *stakeholders* terkait juga terus meningkatkan koordinasi dalam penyediaan aplikasi, *platform*, dan konten digital di sektor kesehatan," jelasnya.

Optimasi Layanan Kesehatan

Menteri Johnny menegaskan penyediaan akses internet yang mendukung layanan kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah menyediakan layanan yang lebih baik dan optimal.

"Dimulai dengan penyediaan akses internet yang merata, kami berharap masyarakat di seluruh Indonesia dapat menikmati akses dan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan optimal," ujarnya.

Menteri Kominfo mengharapkan dengan adanya dukungan teknologi baru dan talenta digital akan dapat mempercepat transformasi digital dan mendorong inovasi layanan kesehatan.

"Didukung dengan adopsi teknologi baru dan penyiapan talenta digital, kami juga memiliki visi bahwa transformasi digital dapat mendorong kreativitas dan inovasi baru di sektor kesehatan," harapnya.

Di akhir konferensi pers virtual, Menteri Johnny mengajak semua pihak untuk membangun dan mewujudkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.

"Untuk kesehatan pulih dan ekonomi bangkit menuju Indonesia maju: Indonesia Sehat, Indonesia Kerja, Indonesia Tumbuh!" tegasnya.

Dalam konferensi pers itu, Menteri Kominfo Johnny G. Plate didampingi Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latief, Dewas BAKTI Kominfo Zulfan Lindan, dan Staf Khusus Bidang Digital dan SDM Dedy Permadi.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/30123/siaran-pers-no-132hmkominfo102020-tentang-akselerasi-akses-internet-di-puskesmas-dan-rumah-sakit-untuk-penanganan-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional/0/siaran_pers





Dari Pengendalian IMEI hingga Penanganan Gangguan SFR

CAPAIAN SE

D P

Satu tahun di bawah nakhoda Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, setidaknya terdapat beberapa capaian utama Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Pertama, pengendalian IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang bertujuan untuk memastikan perlindungan konsumen perangkat telekomunikasi dalam membeli dan menggunakan perangkat yang sah (legal) dan memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menyambungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi.

Kedua, optimalisasi layanan perizinan yang dilakukan melalui inovasi dan transformasi pelayanan yang berkualitas, berintegritas, cepat, mudah dan transparan serta mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Optimalisasi ini berupa layanan satu hari kerja (*one day service* melalui Online Single Submission/OSS) dan transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan juga pembangunan zona integritas yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi dalam rangka membangun budaya kerja yang bersih, berkinerja tinggi dan berkualitas untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ketiga, yaitu penanganan gangguan spektrum frekuensi radio (SFR). Layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio

merupakan bagian dari layanan masyarakat yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Layanan pengaduan masyarakat untuk dilakukan penanganan gangguan SFR merupakan salah satu bentuk layanan publik yang harus diprioritaskan dan merupakan bagian dari 9 (sembilan) program prioritas nawacita pemerintah.

Layanan perizinan afirmatif untuk nelayan kecil (MoTS) menjadi capaian keempat. Layanan ini merupakan layanan jemput bola dan sosialisasi perizinan ISR maritim dan sertifikasi operator radio untuk nelayan kecil di pelabuhan perikanan. Kegiatan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI dan para *stakeholder* diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan para *stakeholder* di daerah.

Capaian kelima terkait penambahan dan penataan spektrum frekuensi radio. Pada tanggal 17 September 2020, Rancangan Peraturan Menteri (RPM) 2,3 GHz telah ditetapkan oleh Menkominfo menjadi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Spektrum Radio 2,3 GHz dan telah selesai proses pengundangannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 24 September 2020.

Terakhir, capaian dari Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) diantaranya penghargaan atas Pengelolaan BMN Terbaik Kategori Nilai BMN di Atas 90 Miliar atas sistem penatausahaan dan pencatatan aset di BBPPT yang mayoritas pengadministrasian Alat Ukur dan Alat Pendukung Pengujian dan Kalibrasi. BBPPT juga telah berhasil meningkatkan layanan pengujian dengan membuka layanan pintu khusus Pengujian terbatas 1 fitur pada 5 jenis fitur pengujian dengan waktu pengujian maksimal 3 (tiga) hari, ini merupakan inovasi layanan dari awalnya 17 hari kerja. Selain itu, Ditjen SDPPI saat ini sedang menyusun *roadmap* penancangan arah kebijakan pengembangan laboratorium BBPPT menuju laboratorium rujukan internasional.

Pengendalian IMEI

Pengendalian perangkat telekomunikasi melalui identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang diinisiasi oleh tiga kementerian yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan mencegah serta mengurangi peredaran perangkat telekomunikasi ilegal yang masuk ke Indonesia.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan pengaturan pengendalian IMEI ini agar masyarakat mendapat manfaat terkait kepastian perlindungan konsumen. "Mengapa program pengendalian IMEI ini kita jalankan? Untuk menekan peredaran ponsel ilegal, sehingga ada *benefit* yang nanti didapatkan masyarakat terkait perlindungan konsumen dari kehilangan atau pencurian dan sebagainya," ungkap Dirjen Ismail.

Pengendalian perangkat telekomunikasi melalui IMEI dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo)

Nomor 11 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI). Kebijakan pengendalian IMEI tersebut diselenggarakan bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan didukung seluruh operator telekomunikasi seluler.

Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, sistem Central Equipment Identity Register (CEIR) sebagai pusat pengolahan informasi IMEI telah dibangun oleh Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) untuk mengintegrasikan sistem Equipment Identity Register (EIR) dari 5 operator. Penyempurnaan sistem dilakukan terus menerus untuk menjamin kesiapan pengendalian IMEI.

Pada tanggal 15 September 2020 pukul 17.00 WIB sistem CEIR dan EIR telah selesai dilakukan proses stabilisasi sistem dan Pelaksanaan Pengendalian IMEI Nasional beroperasi sepenuhnya pada 15 September 2020 pukul 22.00. Seluruh perangkat HKT (Handphone, Komputer, Tablet) yang IMEI nya tidak terdaftar di dalam sistem CEIR, tidak akan mendapatkan layanan jaringan perangkat telekomunikasi bergerak seluler.

Oleh karena itu, masyarakat yang akan membeli perangkat HKT terlebih dahulu memastikan IMEI-nya tercantum pada kemasan dan perangkat HKT serta mengecek IMEI perangkatnya di <http://imei.kemenperin.go.id>. Selanjutnya melakukan uji coba perangkat yang akan dibeli dengan memasukkan SIM card. Pastikan perangkat tersebut mendapatkan sinyal dari operator. Jika tidak mendapat sinyal, patut diwaspadai bahwa perangkat tersebut tidak terdaftar.

Untuk pembelian secara online, pastikan bahwa penjual menjamin IMEI perangkat sudah tervalidasi dan teregistrasi sehingga dapat digunakan. Pedagang *offline* maupun *online* bertanggungjawab terhadap HKT yang diperdagangkan.

Bagi masyarakat yang membeli HKT secara daring melalui barang kiriman atau membawa perangkat dari luar negeri atau dari Free Trade Zone melalui bandar udara dan pelabuhan, wajib mendeklarasikan, memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat mendaftarkan IMEI perangkat melalui <https://www.beacukai.go.id/register-imei.html> atau melalui Aplikasi Mobile Bea dan Cukai yang dapat diunduh melalui PlayStore. Aktivasi perangkat dengan sim card Indonesia akan bisa dilakukan maksimal 2 x 24 jam.

Penyampaian keluhan layanan telekomunikasi dapat menghubungi *customer service (layanan call center/email/digital)* operator telekomunikasi atau mengunjungi gerai layanan operator telekomunikasi. Untuk hal yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi serta hal lain diluar kewenangan operator telekomunikasi terkait dengan pengendalian IMEI dapat menghubungi Call Center Kominfo 159.

Optimalisasi Layanan Perizinan

Optimalisasi layanan perizinan ini berupa layanan satu hari kerja (*one day service* melalui Online Single Submission/OSS) dan transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan juga pembangunan zona integritas yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam rangka membangun budaya kerja yang bersih, berkinerja tinggi dan berkualitas untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kemudahan pelayanan yang diberikan terlihat dari bisnis proses perizinan Izin Stasiun Radio (ISR) dimana untuk ISR yang selesai dalam 1 (satu) hari kerja mencakup permohonan ISR baru, penghentian masa laku ISR dan perubahan data ISR. Persentase capaian *one day service* ISR tahun 2020 adalah sebesar 98.84%, lebih besar dari target yaitu 94%.

Persentase permohonan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang diproses mencapai 99% jauh diatas target yaitu 80%. Per tanggal 27 Oktober 2020 telah diterbitkan sebanyak 5.761 sertifikat.

Money Capaian One Day Service Izin stasiun Radio Tahun - 2020



Bulan (License Date)

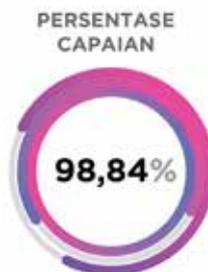
Minggu ke -

Nama Perusahaan

Service

Subservice

Status SIMS



No	Bulan	Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan
1	Januari	829
2	Februari	656
3	Maret	721
4	April	587
5	Mei	323
6	Juni	459
7	Juli	578
8	Agustus	408
9	September	626
10	Oktober	574
Jumlah		5761

No	Bulan	Persentase Permohonan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Diproses	
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1	Januari	99,26%	0,74%
2	Februari	98,39%	1,61%
3	Maret	98,87%	1,13%
4	April	96,39%	3,61%
5	Mei	99,78%	0,22%
6	Juni	100,00%	0,00%
7	Juli	98,11%	1,89%
8	Agustus	100,00%	0,00%
9	September	100,00%	0,00%
10	Oktober	100,00%	0,00%
Ketercapaian Januari - Oktober (%)		99,00%	1,00%

Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio (SFR)

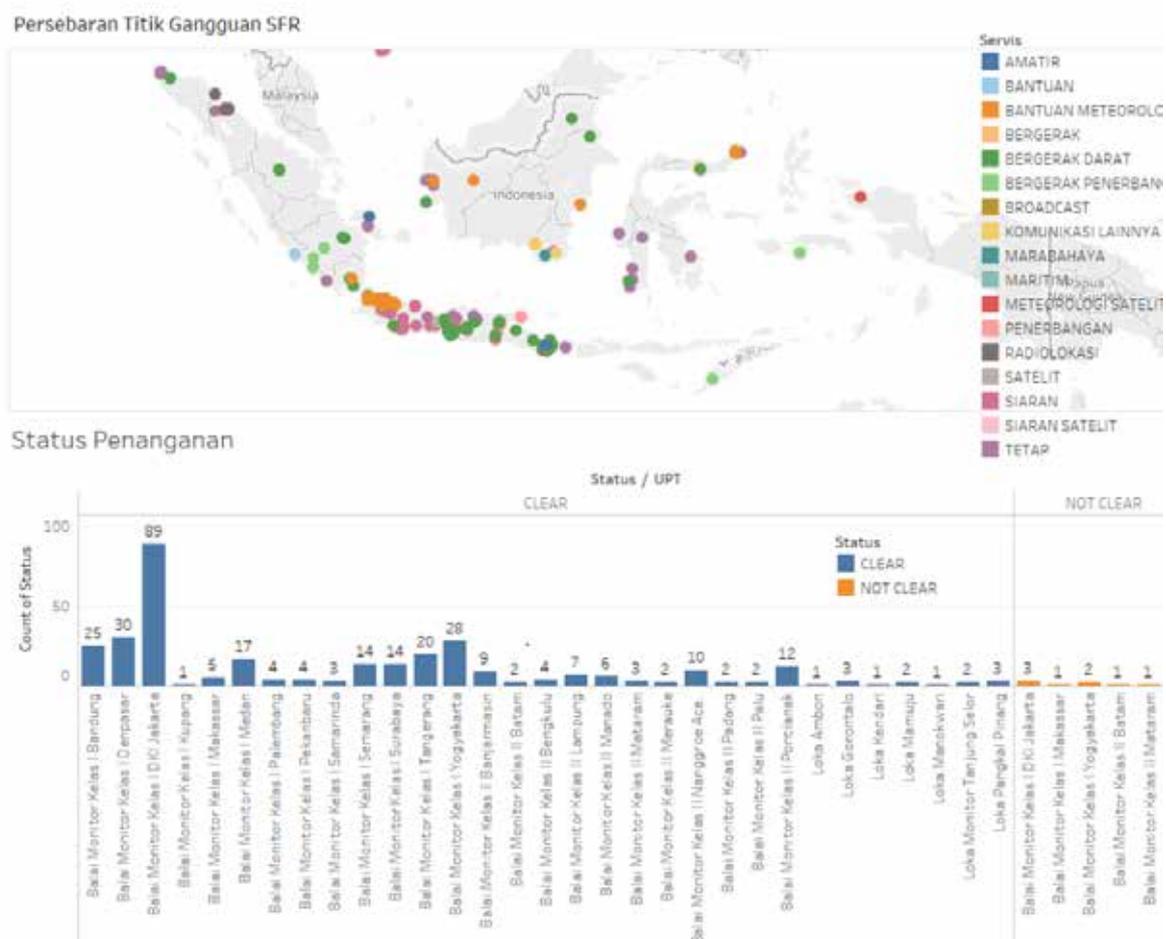
Penanganan gangguan SFR dilakukan untuk tertib penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya dan bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya gangguan SFR di seluruh dinas frekuensi.

Gangguan spektrum frekuensi radio terjadi di beberapa dinas tertentu dan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam melakukan penyelesaian gangguan spektrum frekuensi radio. Beberapa laporan pengaduan gangguan spektrum frekuensi radio oleh masyarakat antara lain terjadi pada dinas penerbangan, maritim, seluler, penyiaran, satelit dsb.

Hasil Analisa penanganan gangguan SFR adalah sebagai berikut:

a. Persebaran wilayah gangguan SFR

Persebaran wilayah gangguan SFR dapat dilihat dari persebaran service yang terganggu di setiap wilayah, berikut gambaran persebaran gangguan SFR nasional dimaksud :





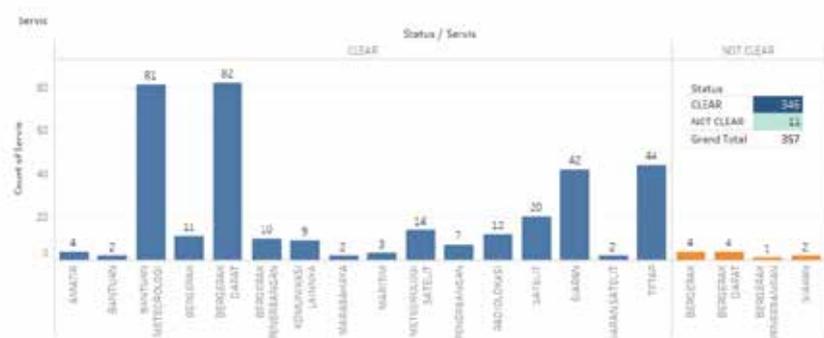
DR. IR. Ismail, MT
 Direktur Jenderal Sumber Daya dan
 Perangkat Pos dan Informatika

Dilihat dari persebaran diatas, terlihat bahwa wilayah Pulau Jawa mendominasi adanya gangguan SFR secara nasional, hal tersebut dapat dipahami karena banyaknya jumlah ISR yang mempengaruhi adanya gangguan di wilayah tersebut.

b. Jumlah Service Terganggu

Berikut gambaran jumlah service terganggu yang tersebar di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI yaitu :

Persebaran Titik Gangguan SFR



Dilihat dari gambar diatas bahwa jumlah *service* yang terganggu didominasi *service* bantuan meteorologi dan *service* tetap. *Service* bergerak darat umumnya dilakukan oleh pengguna frekuensi seperti Handy Talky (konsesi) dan *service* tetap umumnya dilakukan oleh penyelenggara ISP yang mengganggu radar BMKG.

c. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan gambaran capaian keberhasilan dalam melakukan penanganan gangguan SFR, berikut gambaran capaian kinerja seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT):

Dilihat dari capaian kinerja diatas bahwa beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah mencapai capaian kinerja yang cukup baik dan kedepan capaian kinerja di seluruh Unit Pelaksana

Teknis (UPT) bervariasi tergantung tingkat kesulitan dalam menangani gangguan SFR, diharapkan capaian kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dipertahankan hingga akhir tahun. Capaian kinerja gangguan SFR secara nasional telah mencapai 97.89% dan telah melebihi target yang telah ditentukan sebesar 96%.

Dalam setahun dilaksanakan kegiatan penertiban frekuensi dan perangkat dilaksanakan secara serentak sebanyak 1 (satu) kali yang melibatkan 35 UPT Ditjen SDPPI seluruh Indonesia. Diharapkan melalui penertiban nasional ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan frekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menurunkan jumlah gangguan SFR, memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, dan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Capaian Kinerja Penanganan Gangguan SFR



Zona Integritas WBK dan WBBM

Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI pada Desember 2019 memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk pelayanan perizinan frekuensi radio dan sertifikasi operator radio.

Penghargaan ini diberikan setelah melalui serangkaian perbaikan bisnis proses perizinan dan budaya anti korupsi juga evaluasi penilaian baik oleh Tim Penilai Internal/TPI (Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal Kominfo) maupun oleh Kemenpan RB dan juga survey terhadap masyarakat pengguna jasa layanan publik Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI.

Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI adalah satker yang mengelola pelayanan publik terkait Perizinan Spektrum. Izin Stasiun Radio (ISR) per tahun dan 10.000 Sertifikat Operator Radio (SOR) per tahun, dengan rata-rata perolehan PNBP pertahunnya mencapai Rp 16 Trilyun.

Pada tahun 2020, Ditjen SDPPI mengusulkan Direktorat Operasi Sumber Daya untuk diajukan sebagai satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Serta mengajukan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sebagai satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Layanan perizinan afirmatif untuk nelayan kecil (MoTS)

Sebagian besar dari 544.000 unit kapal tangkap ikan (data KKP) yang beroperasi di Perairan Indonesia saat ini menggunakan frekuensi dan perangkat radio yang tidak berizin sehingga menyebabkan gangguan komunikasi penerbangan baik nasional maupun internasional yang beresiko membahayakan keselamatan jiwa manusia.

Permasalahan ini terjadi akibat ketidaktahuan nelayan mengenai pentingnya menggunakan perangkat berizin serta stigma pelayanan izin Pemerintah yang terkesan berbelit, lama, dan menghabiskan biaya.

Sebagai upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik bagi Masyarakat Nelayan,

Kemenkominfo menggandeng KKP dan Kemenhub untuk membuat inovasi Loker Maritime on the Spot (MOTS) bertempat di 22 Provinsi Indonesia. MOTS adalah layanan secara jemput bola dan bersifat afirmatif untuk nelayan dalam aspek:

1. Legalitas hukum melalui ISR Kapal Ikan dan Sertifikat Operator Radio.
2. Peningkatan kecakapan nelayan sebagai Operator Radio Maritim.
3. Keamanan dan keselamatan jiwa di laut.

Banyak perubahan positif setelah dilaksanakannya program Loker MOTS selama 1 tahun ini, antara lain, pertama, kemudahan Nelayan dalam mengurus dan memperoleh ISR Kapal, baik di Pelabuhan Perikanan atau melalui mobil layanan keliling, diperkuat dengan kecepatan proses layanan ISR kapal secara daring, bebas

biaya, dan satu hari kerja dapat diterima [*One Day Service*].

Kedua, penerbitan ISR Kapal tanpa menunggu rekomendasi Perhubungan Laut yang disebut ISR Sementara (berlaku selama 6 bulan). Ketiga, Peningkatan kompetensi nelayan dalam komunikasi marabahaya (*distress*) maritim melalui bimbingan teknis dan Sertifikasi Operator Radio yang bebas biaya. Keempat, meningkatnya kesadaran nelayan tentang wajib penggunaan perangkat maritim dan kepemilikan ISR untuk keselamatan pelayaran. Kelima, pemberian izin berlayar khusus kapal ikan dengan ISR sebagai persyaratannya sehingga memotivasi nelayan untuk peningkatan pendapatannya.

Layanan perizinan afirmatif untuk nelayan kecil (MoTS) ini meliputi ISR Maritim dan Sertifikat Operator Radio Nelayan. Laporan MoTs Per Oktober 2020 tercatat ada 657 ISR maritim dan 618 sertifikasi untuk nelayan dan petugas kesyahbandaran.

Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio (SFR)

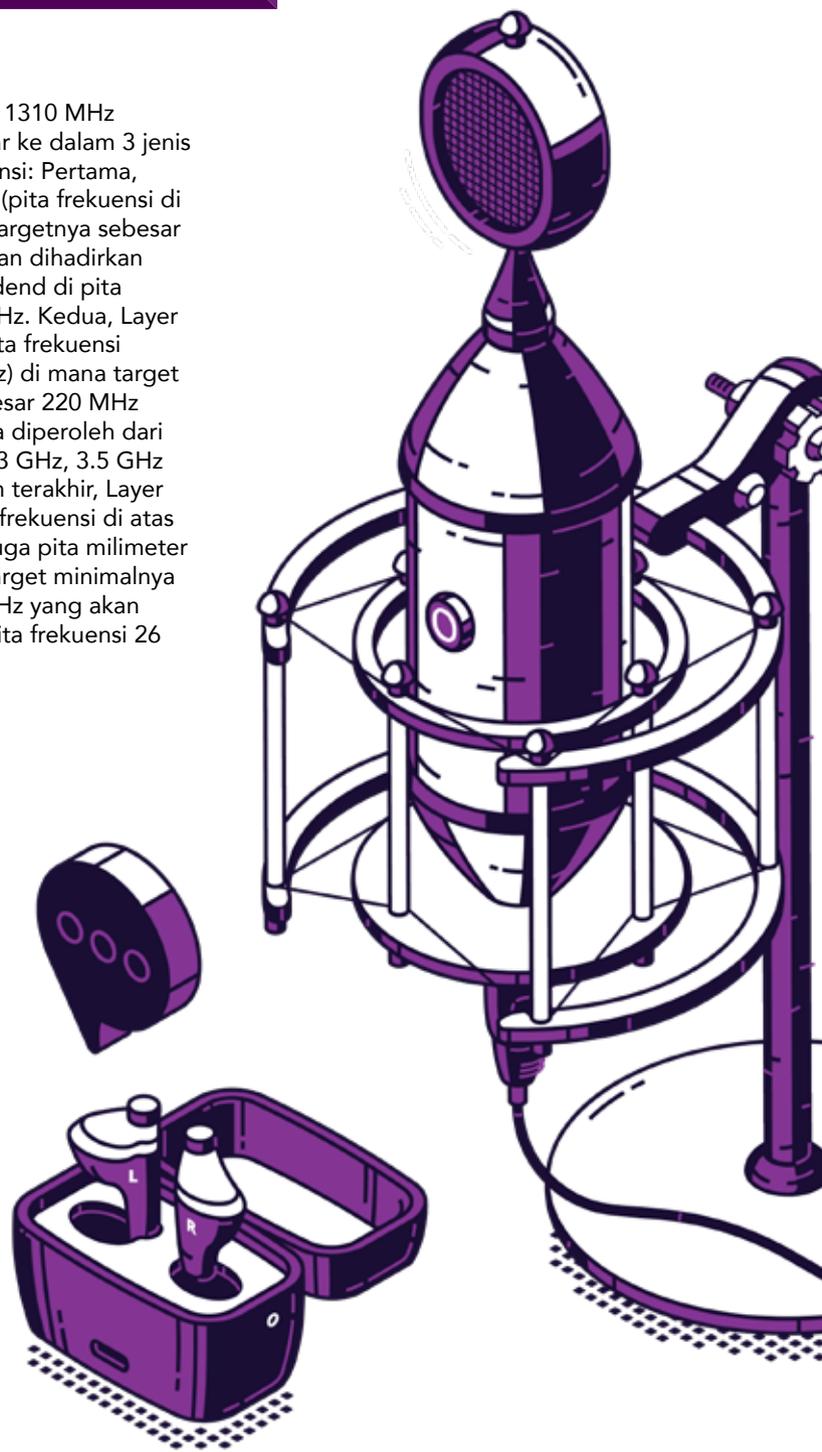
Kementerian Kominfo juga melakukan peningkatan kualitas jaringan Internet agar lebih cepat dan stabil melalui *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi radio yang selain akan mengoptimalkan kinerja jaringan 4G, juga akan menghadirkan teknologi baru yaitu 5G.

Berdasarkan kajian ilmiah dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menghitung kebutuhan spektrum *mobile broadband* di Indonesia hingga tahun 2024 disimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan total *bandwidth* sebesar 1882 MHz yang tersebar di 3 jenis layer pita frekuensi. Spektrum frekuensi sebesar itu dibutuhkan untuk dapat mengimbangi pertumbuhan trafik data khususnya dalam menyongsong era 5G.

Karena sampai dengan akhir tahun 2019 telah diperoleh total *bandwidth* sebesar 737 MHz, maka untuk melampaui kebutuhan spektrum tersebut, Kementerian Kominfo mencanangkan target tambahan spektrum frekuensi radio untuk keperluan Internet kecepatan tinggi (4G/5G) minimal sebesar 1310 MHz yang harus dicapai dalam periode tahun 2020-2024.

Jika target tambahan spektrum sebesar 1310 MHz tercapai, maka Indonesia akan memiliki total *bandwidth* pita seluler sebesar 2047 MHz. Hal ini berarti perhitungan *spectrum demand* dari akademisi di angka 1882 MHz akan terlampaui. Target

minimal sebesar 1310 MHz tersebut tersebar ke dalam 3 jenis layer pita frekuensi: Pertama, Layer Low Band (pita frekuensi di bawah 1 GHz), targetnya sebesar 90 MHz yang akan dihadirkan dari Digital Dividend di pita frekuensi 700 MHz. Kedua, Layer Middle Band (pita frekuensi diantara 1-6 GHz) di mana target minimalnya sebesar 220 MHz yang rencananya diperoleh dari pita frekuensi 2.3 GHz, 3.5 GHz dan 2.6 GHz dan terakhir, Layer High Band (pita frekuensi di atas 6 GHz disebut juga pita milimeter wave) dengan target minimalnya sebesar 1000 MHz yang akan diperoleh dari pita frekuensi 26 GHz.



Capaian Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) pada tahun 2020 menorehkan beberapa capaian diantaranya penghargaan Pengelolaan BMN Terbaik Kategori Nilai BMN di Atas 90 Miliar atas sistem penatausahaan dan pencatatan aset di BBPPT yang mayoritas pengadministrasian Alat Ukur dan Alat Pendukung Pengujian dan Kalibrasi.

BBPPT juga telah berhasil meningkatkan layanan pengujian dengan membuka layanan pintu khusus Pengujian terbatas 1 fitur untuk terbatas pada 5 jenis fitur pengujian dengan waktu pengujian maksimal 3 (tiga) hari, merupakan inovasi layanan dari 17 hari kerja.

Pada Tahun 2020 BBPPT telah mendapatkan Perpanjangan penambahan ruang lingkup Akreditasi KAN LP-112-IDN untuk 21 (dua puluh satu) fitur dan untuk Kalibrasi Alat Ukur telah mendapatkan Perpanjangan Akreditasi KAN LK-137-IDN.

Peningkatan transparansi permohonan pelayanan pengujian dengan adanya modul *dashboard* layanan *real time* melalui tautan bbppt.postel.go.id, status proses dapat dilihat oleh Pemohon dan Pengguna. Saat ini proses permohonan pengujian dan Kalibrasi sudah melalui sistem online melalui tautan tersebut.

Selain itu *roadmap* pencaanangan arah kebijakan pengembangan laboratorium BBPPT menuju laboratorium rujukan internasional juga telah disusun. Di mana pembangunan fisik akan dimulai tahun 2021 dan diharapkan pada 2024 akan beroperasi.

CAPAIAN SEKTOR

PPI

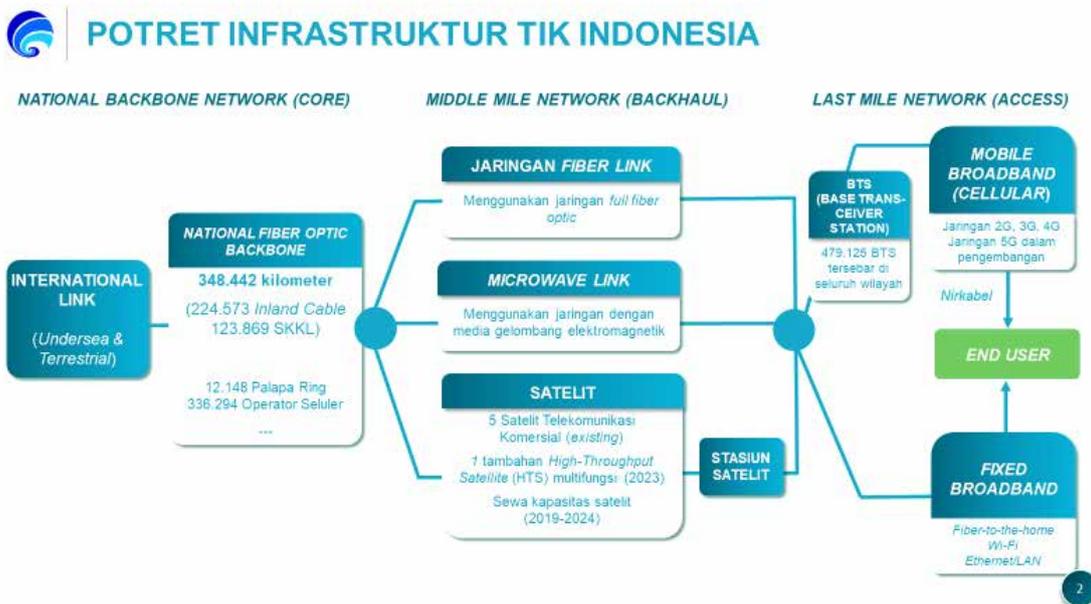


Bangun
Sarana &
Prasarana
TIK Menghadapi
COVID-19



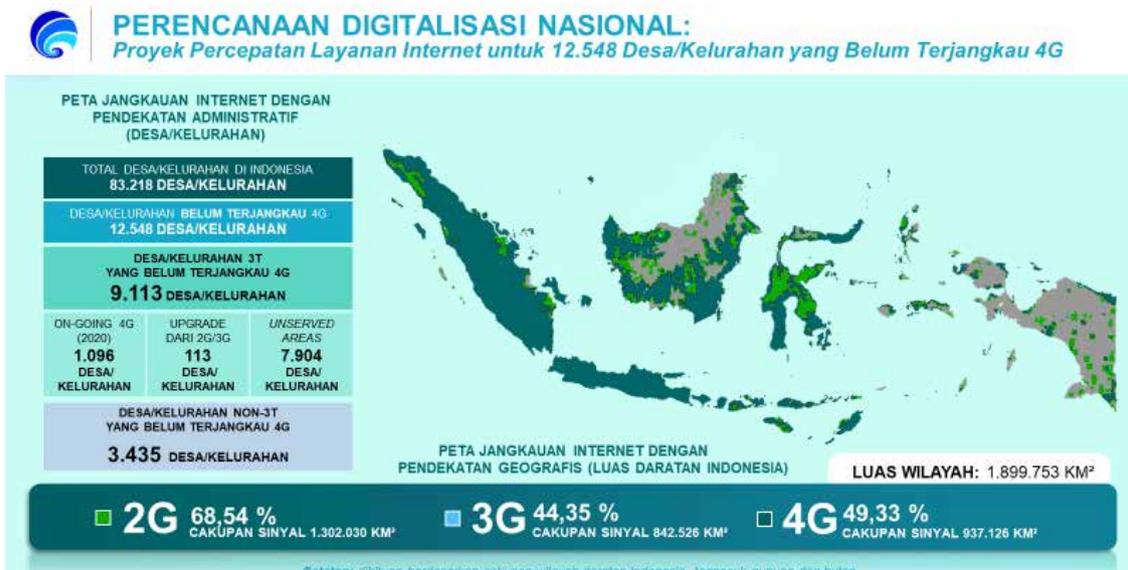
Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan akses terhadap layanan TIK yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi khususnya pitalebar (*broadband*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dalam Potret infrastruktur secara Nasional telah terbangun infrastruktur fisik jaringan kabel serat optik sepanjang 348.442 km di Indonesia yang terdiri dari 224.573 km jaringan kabel serat optik inland dan 123.869 km jaringan kabel serat optik sistem komunikasi kabel laut (SKKL) serta tersebar luas ke seluruh Indonesia sebanyak 479.125 BTS yang terdiri dari jaringan 2G, 3G, 4G dan untuk jaringan 5G masih dalam pengembangan.



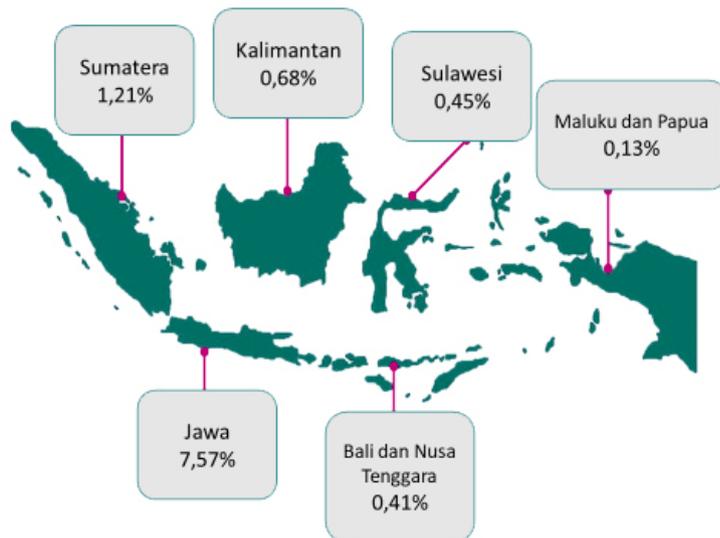
Untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut, diperlukan pembangunan infrastruktur TIK yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) sebagai eksekutor, regulator dan fasilitator untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana TIK.

Dalam perencanaan digitalisasi, pembangunan infrastruktur fisik ini, seluruh provinsi Indonesia telah terhubung dengan jaringan kabel serat optik. Namun, tingkat sebaran kabel serat optik di desa/kelurahan hanya sebesar 31.02%. Terkait dengan jangkauan 4G, saat ini sebanyak 70.670 desa/kelurahan yang sudah menikmati sinyal 4G, sedangkan sisanya sebanyak 12.548 masih belum terjangkau layanan ini.





Penetrasi Layanan Fixed Broadband terhadap Rumah Tangga



Total Rumah Tangga : 67.945.500 *

Jumlah Pelanggan : 7.102.840 *

Metode Pengukuran = $\frac{\text{Jumlah Pelanggan}}{\text{Total Rumah Tangga}} \times 100\%$

Penetrasi Fixed Broadband Rumah Tangga (Eksisting)

$$= \frac{7.102.840}{67.945.500} \times 100\% = 10,45\%$$

Asumsi :
1 pelanggan = 1 rumah tangga

*) Sumber :
Jumlah Rumah Tangga : Statistik Indonesia – BPS 2019
Jumlah Pelanggan : Laporan Penyelenggara Dit. Pengendalian - 2018

Dari data Ditjen PPI, pada tahun 2019 jangkauan jaringan *fixed broadband* hingga di kecamatan adalah 35,71% (2.672 kecamatan terlayani dari total 7175 kecamatan). Untuk Rumah tangga yang mendapatkan layanan akses *fixed broadband* total 10,45% terhadap total rumah tangga sebanyak 67.945.000 jadi asumsi 1 pelanggan=1 rumah tangga

Tahun 2019 menandakan sebuah catatan penting bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan diraihnya prestasi penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik berupa Sistem Perizinan Online dan Pelayanan Prima Ditjen PPI Hebat Andal Berbasis Layanan Teknologi Informasi (SIPPPDIHATI). Sistem ini memangkas birokrasi perizinan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Seluruh proses pengajuan izin dapat termonitor melalui sistem *e-ticketing* dan proses pengajuan sampai dengan penerbitan izin yang semula membutuhkan waktu berhari-hari dipangkas menjadi hanya dalam hitungan jam.

Indeks Persepsi Pelayanan Publik menjadi tolok ukur atas pelayanan publik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, selain itu Indeks Persepsi Pelayanan Publik juga dapat dijadikan bahan masukan sebagai langkah melayani masyarakat dengan lebih baik dan menjadi bahan evaluasi bagi pelayanan sekaligus kinerja pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI). Ditjen PPI memperoleh nilai Indeks Persepsi Pelayanan Publik sebagai berikut:

- Direktorat Pos 3.50 (Baik)
- Direktorat Telekomunikasi 3.52 (Baik)
- Direktorat Penyiaran 3.37 (Baik)

Jika dirata-rata nilai Indeks Persepsi Layanan Publik Ditjen PPI yaitu 3,46 atau dapat dikategorikan "Baik"

Aplikasi Peduli Lindungi

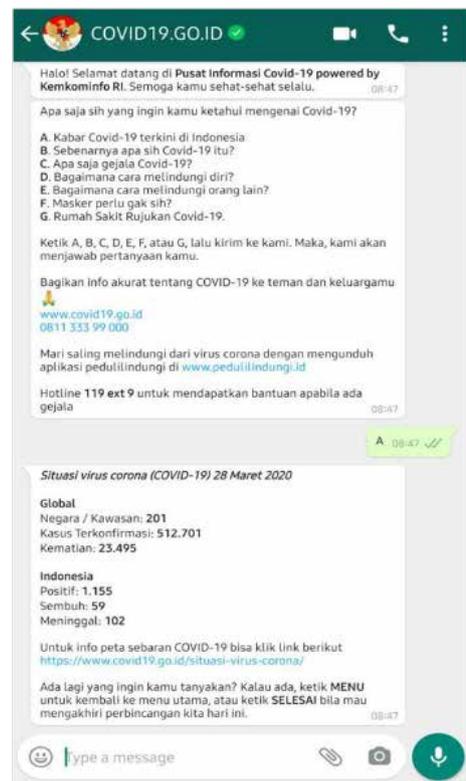
Aplikasi ini bisa di unduh melalui Playstore khusus pengguna telpon pintar berjenis Android dan iOS. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengetahui informasi terkait penyebaran COVID-19 yang berada di sekitar lingkungan rumahnya. Ada indikator merah yang menyatakan daerah tersebut adalah wilayah rawan, sedangkan indikator wilayah hijau menyatakan daerah tersebut tidak rawan penyebaran virus. Jadi, pengguna aplikasi tersebut dapat menghindari berbagai tempat yang potensi menyebarkan COVID-19.

Untuk fitur dalam aplikasi akan terlihat Tracking, Tracing dan Fencing seperti gambar di samping:

Selain memastikan infrastruktur terjaga, Ditjen PPI kementerian Kominfo bekerja sama dengan mitra kerja untuk menyediakan transmisi informasi melalui SMS blast, call center, serta chatbot yang terkait dengan layanan pengaduan terhadap penyebaran COVID-19. SMS blast dikirim ke masyarakat yang berdomisili di wilayah-wilayah yang terindikasi memiliki kerawanan tinggi. Artinya, wilayah yang memiliki jumlah penderita positif COVID-19 yang lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lainnya di dalam negeri.

Tercatat, sudah ada 55,3 juta Short Message Service (SMS) per hari selama masa pandemi yang telah dikirimkan kepada masyarakat yang berada di wilayah di atas. Sehingga muncul kesadaran masyarakat untuk mematuhi setiap protokol kesehatan dan kebijakan yang diterbitkan pemerintah dalam penanganan COVID-19, SMS blast ini juga sekaligus membantu dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 melalui informasi yang diterima oleh masyarakat melalui SMS blast.

Sedangkan Chatbot WA covid19.go.id, merupakan aplikasi pesan interaktif pada platform WA yang berisi informasi terkini dari pandemi Covid-19 di Indonesia dan edukasi masyarakat secara interaktif tentang pemberdayaan masyarakat dalam memutus rantai COVID-19. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh bot ini:



Untuk cara kerja chatbot adalah Pengguna memasukkan keyword huruf sesuai pertanyaan yang ditanyakan. Bot akan menampilkan jawaban pertanyaan tersebut, serta langkah lanjutan untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi dan per 15 september 2020 pengguna chatbot ini sebanyak 2.693.696 sementara pesan terkirim sebanyak 65.756.869.

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H.,M.H.,FCB.Arb.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos
dan Informatika

Layanan Nomor Panggilan Darurat 112

Layanan 112 sudah ada sejak Oktober 2019, layanan 112 saat ini telah dimanfaatkan sebagai layanan aduan terkait COVID-19, ditandai adanya pelaporan di sistem 112 Pemerintah Daerah 72% dari keseluruhan total 63 kab./kota yang telah mengoperasikan Call Center 112 sebagai Pusat Informasi dan Pengendalian COVID-19



LAYANAN NOMOR PANGGILAN DARURAT 112

60 Daerah yang Mengimplementasikan
Layanan Panggilan Darurat 112



63 Daerah yang Mengimplementasi Layanan Panggilan Darurat 112

Provinsi DKI Jakarta	Kota Mataram	Kab Lampung Barat	Kota Tomohon	Kab Banyuwangi
Kota Surabaya	Kota Makassar	Kab Musi Banyuwasin	Kota Probolinggo	Kota Pekanbaru
Kota Batam	Kota Manado	Kota Cirebon	Kab Magelang	Kab Sleman
Kota Tangerang	Kab Banyuwangi	Kab Bandung	Kab Kudus	Kab Pandeglang
Kota Depok	Kab Siak	Kab Magelang	Kota Pare Pare	Kota Blitar
Kota Bogor	Kota Semarang	Kab Gresik	Kab Batang	Kota Padang Panjang
Kota Bandung	Kota Palembang	Kab Lubuk	Kota Bima	Kota Tarakan
Kab Bekasi	Kota Tebing Tinggi	Kab Purwakarta	Kab Grobogan	Kab Demak
Kota Tangerang Selatan	Kab Padang Pariaman	Kota Samarinda	Kab Pakpak Bharat	Kota Balikpapan
Kota Denpasar	Kab Blitar	Kab Bantul	Kab Solok	Kota Cilegon
Kab Kolaka	Kota Madun	Kota Pekalongan	Kota Serang	Kota Medan
Kab Bogor	Kota Malang	Kab Banjar	Kab Irbabeng	Kota Surakarta
Kota Sibolga	Kota Jambi	Kab Semarang		

45 Pemda (cetak tebal) mengkonfirmasi telah memanfaatkan 112 untuk Penanganan COVID-19

Data Kabupaten/Kota yang terintegrasi
sepanjang tahun 2020:

Tahun 2020	
1	Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta
2	Kabupaten Siak Riau
3	Kabupaten Bekasi Jawa Barat
4	Kabupaten Blitar Jawa Timur
5	Kota Padang Panjang Sumatera Barat
6	Kota Malang Jawa Timur
7	Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan
8	Kabupaten Bogor Jawa Barat
9	Kabupaten Demak Jawa Timur
10	Kabupaten Batang Jawa Tengah
11	Kota Solok Sumatera Barat
12	Kota Blitar Jawa Barat
13	Kabupaten Situbondo Jawa Timur
14	Kabupaten Gresik Jawa Timur
15	Kabupaten Magelang Jawa Tengah
16	Kota Pare Pare Sulawesi Selatan
17	Kabupaten Kolaka Sulawesi Tengah
18	Kota Medan Sumatera Utara
19	Kota Jambi Jambi
20	Kabupaten Semarang Jawa Tengah

Rencana Aksi Kemkominfo:

1. Memfasilitasi Pemda yang akan menyelenggarakan Call Center 112 dan Pengoptimalisasian untuk pengaduan COVID-19 tingkat daerah
2. Pembuatan Pusat Monitoring dan Portal Web Layanan Nomor Panggilan Darurat 112
3. Koordinasi ke Operator dan Pemerintah Daerah terkait Pembukaan Akses, Monitoring dan Evaluasi
4. Pelaksanaan Pelatihan Standardisasi SDM Call Center 112

Konser Partisipasi MPR Peduli COVID – 19

Kegiatan yang diselenggarakan Ditjen PPI Kementerian Kominfo bekerjasama dengan TVRI, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), BIMBO, Generasi Lintas Budaya, dan, Yayasan Kitabisa.com menyelenggarakan program siaran langsung MPR Peduli Lawan COVID-19.

Kegiatan sosial ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2020, pukul 19:30 WIB sd. 21:30 WIB yang ditayangkan secara live di TVRI. Selain itu juga, acara ini juga di-streaming secara *live* melalui kanal-kanal lembaga sebagai berikut :



Penyediaan Akses Internet untuk RS darurat & Pusat Karantina COVID-19

Dasar Pelaksanaannya adalah Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penyediaan Layanan Akses Internet untuk mendukung penanganan COVID-19. Layanan Akses Internet dalam mendukung COVID-19 ini bertujuan untuk membantu Masyarakat terdampak COVID-19 dengan akses telekomunikasi Internet khususnya di sektor penanganan Medis.

Layanan yang diberikan berupa Internet Broadband selama +- 3 Bulan atau selama masa pandemi terbagi menjadi 2 bagian/tahap

- Tahap 1, 10 titik Lokasi di Jawa Barat & Jawa Tengah
- Tahap 2, 12 titik Lokasi di Jawa Timur & DIY

Titik Sebaran Lokasi 1 dengan potensi penggunaan 240-500 orang



Titik Sebaran Lokasi 2 dengan penggunaan 240-600 orang



Kriteria Penerima:

- berada di wilayah terdampak COVID-19;
- tersedia listrik dan akses jalan;
- belum tersedia dan/atau kurang memadai akses internetnya;
- masa bantuan yang diberikan selama 3 (tiga) bulan
- layanan yang di berikan berupa layanan akses internet dengan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- memiliki potensi pengguna minimal 10 orang

Upaya Kementerian Kominfo dalam Mendukung Penanganan COVID-19 Melalui Sektor Pos dan Informatika

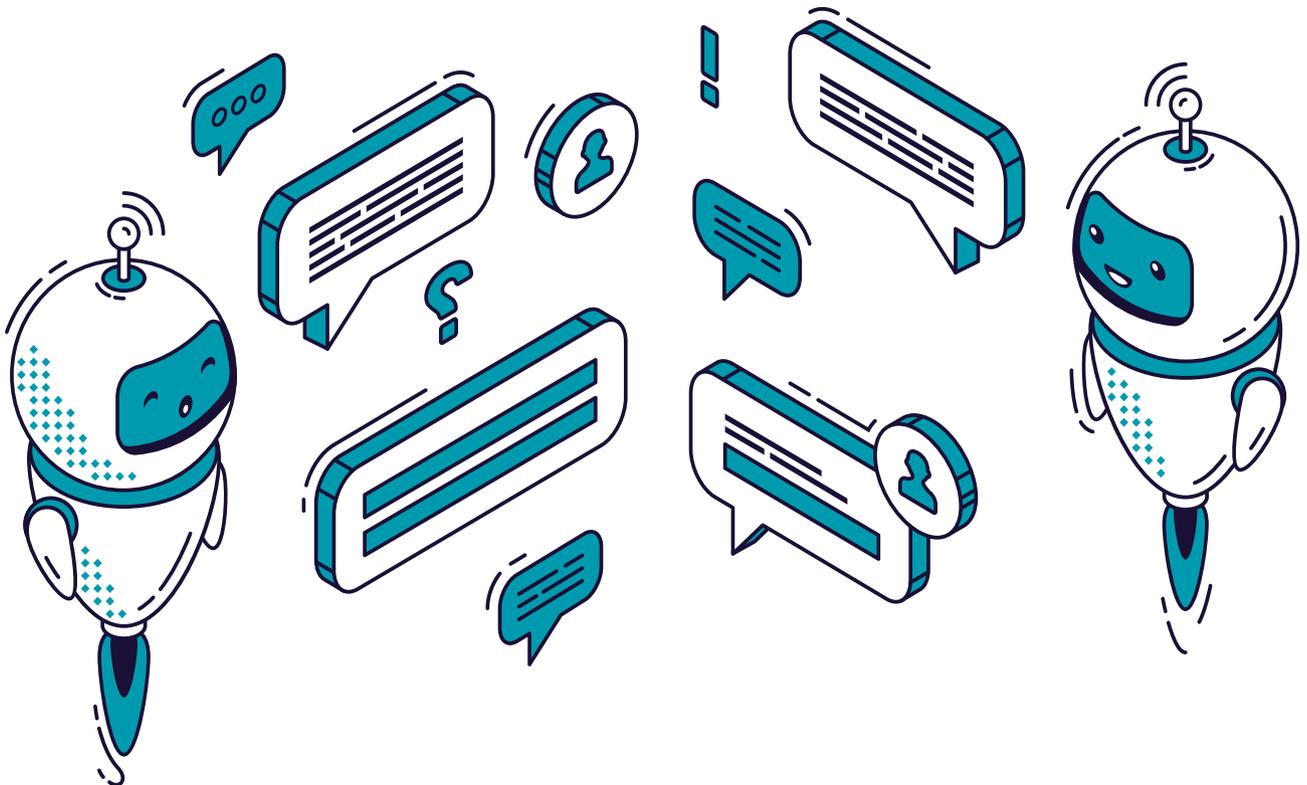
Keputusan Menteri Kominfo No. 159 Tahun 2020 Tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Melalui Dukungan Sektor Pos dan Informatika, menetapkan upaya penanganan COVID-19 melalui dukungan sektor pos dan informatika melalui pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi, sistem, dan teknologi informasi untuk:

- a. Surveilans kesehatan melalui penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*), dan pemberian peringatan (*warning* dan *fencing*)
- b. Akses layanan telekomunikasi dan internet;
- c. Diseminasi informasi;
- d. Sosialisasi; dan
- e. Upaya lain yang ditetapkan Pemerintah

Pengukuran QoS Telekomunikasi Pada Kondisi Darurat COVID-19

- Memastikan Layanan Prima Telekomunikasi Guna Mendukung Kebijakan Pemerintah dalam Bekerja dan Belajar dari Rumah.
- Hasil pengukuran yang kurang baik dikoordinasikan kepada operator untuk dilakukan perbaikan atau meningkatkan kapasitas jaringan.
- Berikut Hasil pengukuran QoS internet Bulan September 2020

PARAMETER	RATA-RATA
Download (Mbps)	19,25
Upload (Mbps)	16,98
Latency (ms)	42,60
WA Succes Call (%)	89,39
WA Mean Opinion Score (MOS)	4,18
Youtube Stream Success Rate (%)	85,30
Youtube Visual Quality (MOS)	3,62





Government **PR**
di **Era**
Menteri
Johnny

CAPAIAN SE

IKR

Diseminasi Informasi Program Prioritas

Sektor komunikasi publik yang digawangi oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) turut menghasilkan capaian gemilang dalam satu tahun kepemimpinan Menteri Kominfo Johnny G. Plate.

Mengemban tugas sebagai Government Public Relations, Ditjen IKP memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk memastikan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah sampai ke masyarakat. Capaian Ditjen IKP selama satu tahun terakhir dapat dilihat berdasarkan aspek diseminasi informasi program prioritas, yang mencakup bidang politik, hukum dan HAM, bidang perekonomian dan maritim, serta bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Selain itu, berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 di tahun ini, Ditjen IKP turut secara aktif mendiseminasikan informasi terkait kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19. Berikut rincian capaian Ditjen IKP selama satu tahun kepemimpinan Menteri Kominfo.

a. Diseminasi Informasi Publik Bidang Politik, Hukum dan HAM

Menjangkau \geq 46,9 juta orang

Kegiatan:

- Dialog Interaktif di TVRI
- Forum Dialog
- Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di 8 bandara selama Mei – Juli 2020
- Advertorial di 2 media cetak nasional
- Dialog interaktif di 2 stasiun TV nasional
- Lomba Konten Kreatif Pemilihan Serentak “Ayo Pilih Kepala Daerah 2020”

b. Diseminasi Informasi Publik Bidang Perekonomian dan Maritim

Menjangkau \geq 46,2 juta orang

Kegiatan:

- Penayangan 3 konten ILM di 20 spot melalui Metro TV
- Produksi 1337 konten yang disebarluaskan melalui akun media sosial DJIKP
- Dialog Interaktif di Metro TV

c. Diseminasi Informasi Publik Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Menjangkau \geq 73,8 juta orang

Kegiatan:

- Pembuatan 476 konten dan kampanye digital pada Facebook dan Instagram

- 10 series *newsboosting* multimedia di media online
- Iklan Layanan Masyarakat terkait COVID-19 di 12 Radio Jaringan MNI

d. Diseminasi Informasi melalui media pemerintah (*owned media*)

Menjangkau \geq 122 juta orang

Kegiatan:

1. Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)
2. Konten Video Highlight
3. Infopublik.id dengan jangkauan 150 Media Center Daerah
4. Government Public Relation (GPR) TV
5. Produksi konten grafis
6. Komik Komunika

Diseminasi Informasi Terkait COVID-19

A. Timeline Komunikasi Publik

Sejak diumumkannya kota Wuhan sebagai Epicenter COVID-19 pada akhir 2019, Ditjen IKP telah melaksanakan langkah-langkah konkrit dalam menyikapi pelbagai hal khususnya dalam lingkup komunikasi publik. Secara periodik, komunikasi publik pun dibuat lebih komperhensif terutama setelah Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dibentuk.

Pengumuman Kota Wuhan Sebagai Epicenter COVID-19 (Desember 2019)

- Koordinasi penanganan NCoV antara Kemenko PMK, Kominfo, KSP, Kemenkes dan *stakeholder* lainnya;
- Penyusunan konten edukatif terkait pencegahan penyebaran virus, jaga imunitas dan meredam kepanikan masyarakat;

Pasca Pengumuman Kota Wuhan Sebagai Epicentrum COVID-19,

- Dukungan sosialisasi terkait pengendalian hoaks;
- Kerjasama dengan LKBN Antara dalam eksposur pemberitaan terkait WNI di Wuhan dan Natuna
- Diseminasi terbatas pada pintu masuk negara dan wilayah Kepri.

Pengumuman pasien positif COVID-19 pertama di Indonesia (2 Maret 2020)

- Koordinasi intensif dengan KSP dan Kemenkes;

- Penyebaran konten lebih massif melalui media komunikasi yang beragam;
- Dukungan Media Centre di Kantor Staf Presiden

Pengumuman pembentukan Gugus Tugas COVID-19

- •Stakeholder dalam penyusunan Tugas Bidang Komunikasi Publik;
- •Dukungan *media centre* (Live streaming/FMB9 dan Juru Bahasa Isyarat);
- •Diseminasi konten terkait protokol kesehatan.

Program Sosialisasi melalui media mainstream dan media digital:

- Sosialisasi di masa PSBB, dengan pesan: #BekerjaDiRumah #BelajarDiRumah #BeribadahDiRumah #TidakMudikTidakPiknik
- Sosialisasi di masa Adaptasi Kebiasaan Baru, dengan pesan: Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19
- Sosialisasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan program Bangga Buatan Indonesia
- Sosialisasi PILKADA 2020 dalam masa pandemi COVID-19 sebagai bentuk dukungan atas target partisipasi 77,5% dalam Pilkada Serentak tahun 2020. Target sosialisasi: masyarakat di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang menyelenggarakan Pilkada

B. Kanal Media Informasi Diseminasi COVID-19

Media	Jumlah Konten	Jangkauan
Media Sosial	1447 Konten	22.147.571
Media Online	4245 Konten	53.847.330
Media Elektronik (TV & Radio Jaringan Nasional)	79 Spot	13.714.974 pemirsa
Webinar	13 Kali	2.600 peserta
Livestream Forum Merdeka Barat 9	269 Kali	104.893.394 pemirsa

Sepanjang periode Januari hingga Juni, penyebaran informasi terkait COVID-19 mencakup dukungan pembuatan konten berbasis teks, grafis, audio, serta audio-video, dengan rincian sebagai berikut:



Indonesiabaik.id

- Januari – Juni 2020: 465 konten
- Menjangkau 39 juta orang
- Berbasis media sosial (IG, FB, Youtube, Twitter)
- Infografis, motiongrafis, videografis, komik, dan e-book

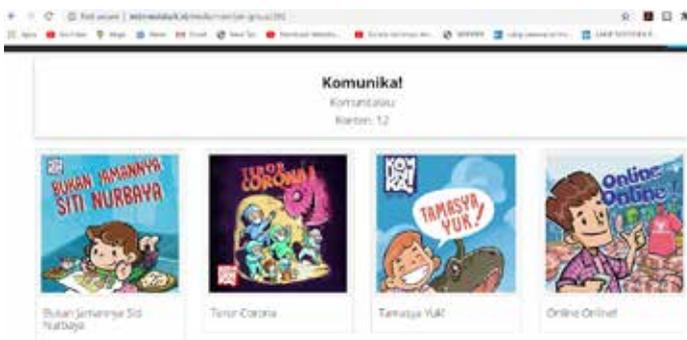


Pencakar Pancasila

- Januari – Juni 2020: 90 konten
- Menjangkau ≥ 2,1 juta orang
- Infografis, motiongrafis, videografis

Teras Negeriku

- Januari – Juni 2020: 232 konten
- Menjangkau ≥ 39,7 ribu orang
- Fokus: pemahaman prinsip-prinsip Bela Negara
- Infografis, motiongrafis, videografis



Komik Komunika

- Januari – Juni 2020: 1 edisi dengan tema "Teror Corona"
- Jumlah viewer ≥ 8,3 juta orang
- Diunduh sebanyak 1186 kali
- Kerja sama distribusi dengan komunitas Pustaka Bergerak Indonesia



Indonesia.go.id

- Januari – Juni 2020: 227 produksi berita straight news
- Menjangkau ≥ 5,3 juta orang
- Nation branding dengan tagline Proud of Indonesia



Infopublik.id

- Januari – Juni 2020: 3552 produksi berita *straight news*
- Menjangkau $\geq 1,1$ juta orang

Forum Merdeka Barat 9

- Januari – Juni 2020: Penyelenggaraan 4 forum terkait penanganan COVID-19
- Menjangkau ≥ 20 juta orang melalui produk berita dari berbagai media yang hadir
- Publikasi melalui kanal media sosial: 582 konten dengan jangkauan ≥ 11 juta orang
- Publikasi melalui *live forum*: 269 kali dengan jangkauan $\geq 104,8$ pemirsa
- FMB9 menangani proses komunikasi dari hulu – hilir: aktivitas riset, penetapan *agenda setting*, diskusi *ter-framing*, pembuatan konten, publikasi konten, *treatment* untuk media arus utama dan media sosial, monitoring pemberitaan.

Berikut tema-tema yang diangkat dalam kegiatan FMB9:

Tema	Waktu
Antisipasi Penyebaran Corona	Kamis, 30 Jan 2020
SP2020 : Satu Data Indonesia	Kamis, 13 Februari 2020
Polemik: Sains, COVID 19. dan Komunikasi Publik	Jumat, 3 Juli 2020
Antisipasi Karhutla di Pusaran Pandemi	Jumat, 17 Juli 2020

Webinar Adaptasi Kebiasaan Baru

- Januari – Juni 2020: Telah menyelenggarakan 13 kali webinar
- Peserta: 2.600 orang

Diseminasi melalui media sosial

- Diseminasi informasi melalui akun-akun media sosial
- @djikp, @infokompmk, Official Account LINE @Kemkominfo
- Januari – Juni 2020: 350 produksi konten
- Menjangkau $\geq 8,8$ juta orang

Forum Pemred

Tercatat telah dilakukan 5 kali pertemuan dengan para pemimpin redaksi media-media nasional guna menyelaraskan persepsi terkait komunikasi publik pemerintah dalam penanganan COVID-19.

- Forum Pemred di Hotel Borobudur (03/03/2020)
- *Video conference* (03/04/2020)
- *Video conference* (09/05/2020)
- Forum Pemred (21/05/2020)
- Pertemuan dengan Jubir baru (03/06/2020)

Prof. Dr. Widodo Muktiyo, SE. M.Com
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Penyuluh Informasi Publik

Sebagai salah satu bentuk implementasi Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, program Penyuluh Informasi Publik (PIP) bertujuan untuk mempercepat diseminasi informasi Program Prioritas Pemerintah kepada masyarakat, khususnya di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang sulit mendapatkan akses informasi.

Berkolaborasi dengan Kementerian Agama, kegiatan diseminasi informasi dilakukan PIP dengan pendekatan agama dan secara tatap muka langsung kepada masyarakat, memanfaatkan Penyuluh Agama yang berasal dari 5 (lima) agama di bawah pembinaan Kementerian Agama

Sejak Oktober hingga Desember 2019, PIP berhasil menjangkau 92.206 masyarakat melalui kegiatan penyuluhan tatap muka.

Hingga tahun 2020, jumlah PIP terhitung mencapai 286 orang yang tersebar di 34 provinsi pada 175 kab/kota dan 518 kecamatan. Namun di tahun 2020 ini, tidak dilakukan kegiatan penyuluhan secara tatap muka karena situasi pandemi COVID-19. Diseminasi informasi dilakukan melalui media sosial dan aplikasi pesan, dengan konten yang dikhususkan pada informasi pencegahan dan penanganan COVID-19 serta UU Cipta Kerja.

Kerjasama Kelembagaan

Penyebaran informasi juga dilakukan melalui jaringan kelembagaan serta para pemangku kepentingan, meliputi Penyediaan Juru Bahasa Isyarat untuk Konferensi Pers, Penyebaran melalui Jaringan, Bakohumas, Dinas Kominfo, Satgas media sosial, Prov/Kab/Ko, Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN) dan Penyuluh Informasi Publik (PIP). Serta juga bekerjasama dengan LKBN ANTARA dengan pembuatan 596 konten dan *placement* di 99 media lokal.

Adapun produk-produk infografis yang dihasilkan pada periode April – Juli 2020 untuk keperluan rutin diseminasi informasi pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTTP) COVID-19 oleh tim Divisi Komunikasi Publik GGTP COVID-19 berjumlah 350 karya. Infografis disebarakan secara rutin melalui media sosial GGTP COVID-19.



Setahun
Menteri JGP
Ini Capaian
Sektor
APTIKA



CAPAIAN SEKTO

APTIKA

Legislasi Primer

Sejak awal memimpin Kementerian Kominfo, Menteri Johnny menyatakan RUU PDP dan Revisi UU Penyiaran bakal menjadi prioritas lembaga yang dipimpinnya. "Hanya saja, draf RUU PDP masih perlu direvisi oleh Kominfo setelah dikoreksi oleh Kemendagri dan Kejagung pada pertengahan Oktober lalu," jelasnya.

Menteri Johnny menambahkan, RUU Perlindungan Data Pribadi akan dibahas di lingkup legislatif sekitar enam bulan, yakni Januari hingga Juli 2020. Selanjutnya, beleid ini ditargetkan keluar dan disahkan menjadi undang-undang pada Oktober 2020. Dalam RUU Data Pribadi, Kementerian Kominfo mengusulkan adanya standarisasi aturan yang secara prinsip menjamin keamanan data masyarakat. Selain itu, beleid bakal mengatur tata-kelola terhadap proses perlindungan data pribadi bagi warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.

Menurut Menteri Johnny, Kominfo perlu mendorong terbitnya RUU Perlindungan Data Pribadi lantaran saat ini aturan data pribadi di Indonesia masih acak dan tersebar di berbagai jenis beleid. "Karena itu kita perlu undang-undang yang mensinkronkan perlindungan data pribadi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Menkominfo Johnny memastikan bahwa Kementerian yang dipimpinnya telah bertemu dengan berbagai pihak untuk menggelar studi terkait sistem perlindungan data pribadi. Salah satunya delegasi perwakilan Uni Eropa. Dari hasil pertemuan itu, Menteri Kominfo menemukan fakta bahwa dari 180 negara di dunia, 126 di antaranya sudah memiliki sistem perlindungan yang mumpuni.

Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aptika bersama dengan Kemendagri dan Kemenkumham sedang menyusun dan membahas RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) bersama dengan DPR. RUU PDP disusun untuk melindungi data pribadi masyarakat di ruang digital.

Pada tanggal 1 September 2020 telah dibentuk Panitia Kerja (Panja) RUU PDP. Dengan terbentuknya Panja, Komisi I DPR RI dan pemerintah akan melakukan pembahasan secara maraton agar RUU PDP bisa segera diselesaikan. Targetnya pada tahun 2020 ini RUU PDP bisa disahkan menjadi UU PDP.

Selain itu, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang regulasi ini, Kementerian Kominfo juga melakukan pengenalan mengenai isi yang tertuang dalam draft RUU PDP dan pentingnya perlindungan data pribadi melalui webinar dan *workshop* yang diadakan bersama-sama dengan kementerian/lembaga lain dan komunitas untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat.

Tak hanya itu saja, melansir laporan dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), selama satu tahun kepemimpinannya sebagai Menkominfo, Menteri Johnny telah melakukan berbagai program dan kegiatan. Program yang dilakukan terutama guna mendukung percepatan transformasi digital nasional, seperti pembangunan infrastruktur TIK, pengembangan ekonomi digital, penyusunan legislasi primer, hingga pengendalian.

Sebagai salah satu upaya mendukung arahan Presiden Jokowi mengenai 5 langkah kebijakan transformasi digital, Ditjen Aptika melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan akan membangun Pusat Data Nasional (PDN). Pembangunan PDN merupakan mandat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.





Dalam Perpres SPBE, Kemkominfo diberikan amanat untuk membangun Infrastruktur SPBE Nasional dalam bentuk PDN. PDN sendiri merupakan sekumpulan pusat data yang digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan daerah yang akan saling terhubung.

Pada tahun ini tahapan yang dilakukan dalam pembangunan PDN ialah penyediaan lahan untuk satu lokasi PDN di Kabupaten Bekasi. Pengadaan Lahan PDN akan dilakukan di Greenland International Industrial Center (GIIC) Deltamas, Cikarang, Kab. Bekasi.

Pembangunan PDN ini di empat lokasi dengan kapasitas 43.000 core dan 72 Peta Byte. Keberadaan PDN tersebut ditujukan untuk pengambilan keputusan kebijakan publik dan diharapkan pada awal tahun 2023 dapat beroperasi. Pusat data itu merupakan pusat data tier 4 dengan mempertimbangkan *redundancy power supply* dan keamanan sistem.

Saat ini terdapat 2.700 pusat data dan 27.400 aplikasi dalam rangka pelayanan publik sektor

sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, perdagangan industri, hingga penyiaran. Sebagian besar masih menggunakan *ethernet* yang terbatas untuk lingkungan sendiri dan masih kecil yang menggunakan *cloud computing*.

Pembangunan PDN menjadi prasyarat terwujudnya kebijakan Satu Data Indonesia. Baru 3 persen yang memenuhi standar global atau sekitar 10-20 pusat data yang sudah memenuhi standar internasional dan dapat dikembangkan untuk menjadi pusat data nasional.

PDN nantinya juga menyediakan *network national operation center* yang bertujuan untuk memastikan jaringan intra pemerintah berjalan dengan baik. Selain itu, dalamnya disediakan pula *security operation center* untuk memastikan pusat data memiliki sistem keamanan yang andal dan analisis *big data*.

*Tautan Rujukan: <https://aptika.kominfo.go.id/2020/09/integrasikan-layanan-publik-pemerintah-bangun-empat-pdn/>

RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT DATA NASIONAL



Lokasi Pusat Data

1. Kabupaten Bekasi
2. IKN/Kutai Kartanegara
3. Kota Batam
4. NTT/Labuan Bajo

Pembangunan PDN dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi ekosistem TIK pemerintah saat ini, seperti:

1. Pemerintah tidak dapat melakukan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat karena disintegrasi data;
2. Birokrasi antar pemerintah pusat dan daerah terhambat; dan
3. Pelayanan publik yang tidak seragam.

Sebelum PDN beroperasi, Kementerian Kominfo menyediakan Pusat Data Sementara (PDS) sebagai solusi untuk moratorium belanja pusat data. Keperluan koordinasi dan permintaan informasi tentang PDS, termasuk mekanisme serta syarat dan ketentuan permohonan VPS atau *hosting* dapat menghubungi *helpdesk* layanan *government cloud* di nomor 0813-8990-8895. Sedangkan, untuk aduan dan gangguan terkait layanan PDS yang bersifat segera atau memerlukan layanan 24 jam dapat menghubungi 0815-1800-666.

Pengembangan Ekonomi Digital

Menyoal pengembangan ekonomi digital, Ditjen Aptika telah melakukan berbagai program seperti UMKM Go Online, Petani dan Nelayan Go Online. Program Petani dan Nelayan Go Online bertujuan untuk memberikan solusi permasalahan di sektor pertanian dan perikanan dengan pemanfaatan aplikasi yang tepat untuk menunjang pengusaha petani dan nelayan serta kinerja sektor pertanian dan perikanan. Pada tahun 2019 Petani dan Nelayan Go Online berhasil memenuhi target 300.000 Petani dan Nelayan Go Online dengan rincian 151.324 Petani (100.88%) dan 151.018 Nelayan Go Online (100.68%).



Mengutip laporan dari Direktorat Ekonomi Digital Ditjen Aptika, saat ini Kementerian Kominfo telah meng-online-kan 39.233 UMKM di 20 Kabupaten/Kota dan 120 Pasar Rakyat dalam rangka meningkatkan awareness pentingnya pemanfaatan TIK bagi UMKM. Pada tahun 2020 ini baik UMKM Go Onlien maupun Petani dan Nelayan Go Online sedang melakukan kajian untuk implementasi pada tahun 2021.

Pemerintah terus berupaya mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bisa naik kelas. Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menyiapkan langkah transformasi digital yang kini kian cepat dengan adanya pandemi COVID-19.





**Samuel Abrijani
Pangerapan, B.Sc**

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

Pengembangan Talenta Digital

Target tahun 2020 masyarakat yang menerima literasi digital sebanyak 205.000 orang, hingga bulan September total masyarakat yg telah terliterasi digital sebanyak 60.693 orang, dengan rincian:

- 2.150 masyarakat terliterasi digital melalui kegiatan *offline*.
- 58.543 masyarakat terliterasi melalui kegiatan aktif *online* (melalui *platform online conference*).

Kegiatan *offline* dilakukan melalui seminar dan Workshop Basic Literasi Digital "Pemanfaatan TIK di Bidang Digital bagi Guru dan Masyarakat" yang dilaksanakan di 6 Kota/Kabupaten yaitu: Kab. Jayapura, Kab. Kupang, Kota Kupang, Kab. Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka.

Sedangkan kegiatan *online* melalui *platform online conference* dan *via live streaming* di media sosial terdiri dari:

- Kelas Podcast
- Siberkreasi Hangout Online
- Webinar *Digital Governance: Pentingnya Perlindungan Data Pribadi*
- Webinar "Literasi Digital untuk Perempuan Indonesia"
- Webinar "*Smart Parenting* di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru"
- Webinar *Digital Parenting*
- Siberkreasi Class: *Smart Parenting*
- School of Influencer : *Video Making With Smartphone, Potensi Menjadi Kaya di Dunia Digital*
- #BerkreasiDiGLive
- #RTIKBerkreasi

Pada level menengah, Ditjen Aptika mengadakan program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Hingga saat ini Ditjen Aptika telah melaksanakan Ignition Batch 4 Gerakan Nasional 1000 Startup Digital secara virtual di 17 kota. Total peserta 4.882 dari 34 provinsi dan 328 kota yang ada di Indonesia. Sebaran peserta berdasarkan kota pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Kota	Jumlah Peserta
Balikpapan	332
Bandung	362
Batam	155
Denpasar	194
Jakarta Pusat	1.267
Jayapura	100
Kupang	113
Makassar	262
Malang	207
Manado	169
Mataram	95
Medan	210
Pekanbaru	145
Pontianak	182
Semarang	191
Surabaya	306
Yogyakarta	362
Tidak Memilih Kota Terdekat	230

Selain itu Ditjen Aptika juga mengadakan Startup Studio Indonesia. Berbeda dengan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang mencari startup pada *ideation stage* dan sedang merancang MVP, program Startup Studio Indonesia menargetkan startup pada tahap Angel hingga *pre-series A*. Harapannya startup yang difasilitasi program ini dapat mengembangkan skala bisnisnya dengan lebih cepat.

Pengendalian Konten Negatif di Internet

Ditjen Aptika juga terus berupaya memastikan ruang digital Indonesia bersih dari konten negatif. Pada tahun 2020 hingga saat ini dari total 106.567 Konten bermuatan negatif yang ditangani, Sebanyak 70 konten telah dibuka kembali aksesnya karena sudah memperbaiki kontennya.

Jumlah konten yang telah ditangani pada social media adalah 125.750 konten, dengan detail per aplikasi sebagai berikut:

- Facebook dan Instagram: 3.793
- Telegram: 132
- Twitter: 121.430
- Google dan YouTube: 144
- Line: 1
- BBM: -
- File Sharing: 250

Total akumulasi konten negatif yang ditangani pada *website* sampai dengan September 2020 sebanyak 1.311.809 konten dan melakukan normalisasi sebanyak 717 konten. Adapun detail konten negatif yang ditangani per kategori, adalah sebagai berikut:

- Pornografi: 1.062.558
- Perjudian: 230.987
- Penipuan: 10.496
- Konten negatif yang direkomendasikan Instansi Sektor: 2.473
- Hak Kekayaan Intelektual: 4.303
- Terorisme/radikalisme: 502
- SARA: 188
- Perdagangan produk dengan aturan khusus: 127
- Pelanggaran Keamanan Informasi: 86
- Konten yang Melanggar Nilai Sosial dan Budaya: 26
- Konten yang Meresahkan Masyarakat: 23
- Fitnah: 11
- Berita Bohong/Hoaks: 17
- Kekerasan/Kekerasan Pada Anak: 9
- Separatisme/Organisasi Berbahaya: 3

Total akumulasi konten negatif yang ditangani pada media sosial sampai dengan September 2020 sebanyak 779.719 konten, dengan detail per aplikasi sebagai berikut:

- Facebook dan Instagram: 25.734
- Telegram: 980
- Twitter: 746.211
- Google dan YouTube: 5.487
- Line: 21
- BBM: 10
- File Sharing: 1.276

Hoaks COVID-19

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Tim AIS Ditjen Aptika telah menemukan 1.028 kasus hoaks terkait Covid-19 dari akhir minggu keempat Januari hingga 10 Agustus 2020. Kalkulasi data hoaks terkait Covid-19 tersebut terdiri dari bulan Januari sebanyak 40 temuan, Februari 100, Maret berjumlah 265 (terbanyak), April 219, Mei 172, Juni 102, Juli 108, dan Agustus (per tanggal 10) terdapat 22 kabar bohong.

Dari jumlah tersebut, jumlah konten isu hoaks yang paling banyak ditemukan di Facebook sebanyak 1.403 dan telah dilakukan proses *takedown* sebanyak 1.213, dan 190 konten belum ditindaklanjuti.

Berkaitan dengan peningkatan literasi digital, Menteri Kominfo menilai hal tersebut menjadi salah satu fondasi utama dan solusi berkelanjutan untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap hoaks dan disinformasi.

"Indonesia baru saja mendapat kehormatan menerima gelar World Summit Information Society (WSIS) Prizes 2020, atas kontribusinya dalam peningkatan kapasitas digital dan literasi di Indonesia," ujarnya.

Sedangkan di *middle stream*, menurut Menteri Kominfo pihaknya secara aktif memantau dan melakukan upaya penindakan atas peredaran konten berbahaya di internet.

"Sebagai contoh, sejak awal perkembangan pandemi COVID-19, dengan menggunakan mesin *crawling* Kominfo melalui Tim AIS Ditjen Aptika dapat mengidentifikasi peredaran hoaks sehari-hari terkait COVID-19 di media sosial," jelasnya.

Penghargaan

Menyoal prestasi, dalam setahun di era kepemimpinan Menteri Johnny, Ditjen Aptika Kominfo turut memperoleh beragam penghargaan, diantaranya; WSIS Prizes 2020, ICSB Indonesia Award 2020, dan AICTA.

1. WSIS Prizes 2020

International Telecommunication Union (ITU) menobatkan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi dan Relawan TIK Indonesia sebagai winner dan champion WSIS Prizes 2020. Siberkreasi dan Relawan TIK diakui secara global dari ITU PBB karena mampu berkontribusi nyata dalam perkembangan TIK di Indonesia. Siberkreasi dan Relawan TIK terpilih sebagai *winner* dan *champion* setelah terpilih 762 karya. Relawan TIK menjadi salah satu *champion* dari 72 nominator. Sedangkan Siberkreasi menjadi salah satu winner atau penghargaan tertinggi dari WSIS Prizes 2020 dari 18 karya atau inisiatif lainnya Forum WSIS merupakan platform lintas pemangku kepentingan di bidang TIK yang bernaung di bawah PBB. Setiap tahunnya, ribuan pegiat TIK dari berbagai latar belakang dan asal negara berkumpul di markas besar International Telecommunication Union (ITU), Jenewa. Kontes WSIS

Prize ditujukan untuk memilih beragam inisiatif pemerintah, masyarakat dan lembaga yang sukses memanfaatkan TIK untuk pembangunan berkelanjutan. GNLD Siberkreasi dan Relawan TIK merupakan komunitas dan organisasi binaan dari Ditjen Aptika Kemkominfo.

2. ICSB Indonesia Presidential Award 2020

Direktorat Ekonomi Digital, Ditjen Aptika Kemkominfo memperoleh Presidential Award 2020 dari International Council for Small Business Indonesia (ICSB). Penghargaan itu diberikan atas kontribusinya dalam membangun ekonomi digital di wilayah timur Indonesia melalui program UMKM Go Online, khususnya pada destinasi wisata super prioritas dan prioritas. Penghargaan ini



diberikan untuk memberikan ucapan terima kasih karena kesungguhan pemerintah dan pihak terkait untuk mendorong kemajuan UMKM di Indonesia.

3.AICTA

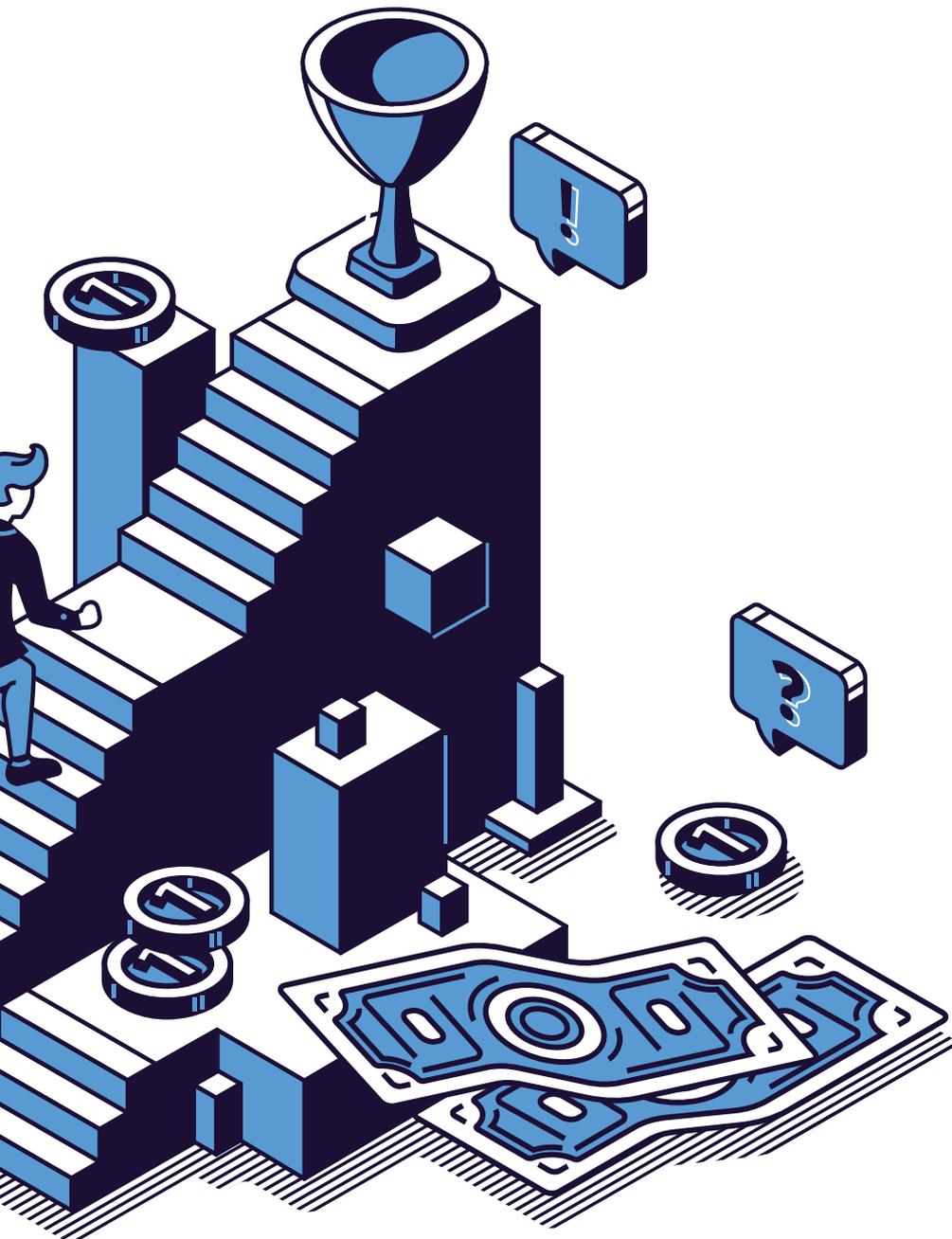
Salah satu tujuan seleksi Indonesia Entrepreneur TIK (IdenTIK) adalah maju ke Asean ICT Award (AICTA). Pemenang akan dipilih sesuai dengan kriteria penghargaan TIK di tingkat Asean tersebut.

Tahun 2019 ini merupakan pencapaian terbaik Tim ASEAN ICT Award atau AICTA Indonesia selama 8

kali keikutsertaannya berturut-turut. Tahun ini, Indonesia berhasil menjadi 3 finalis dengan merebut 2 emas dan 1 perunggu. Melalui pencapaian tersebut, Indonesia juga menjadi juara umum dalam ajang apresiasi bagi karya dan produk ICT dari level ASEAN.

Kategori yang dimenangkan dalam ajang ini antara lain Research and Development, Corporate Social Responsible dan Private Sector. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM TIK Indonesia kian hari semakin diperhitungkan di kawasan ASEAN. Setelah menjalani seluruh proses tahapan dan kegiatan, Indonesia berhasil memperoleh 2 medali emas AICTA 2019.

Emas pertama diraih oleh kategori Private Sector tim RiTx Bertani, sedangkan emas kedua diraih dari kategori Research and Development tim ATM Sehat. Selain Emas, Indonesia juga berhasil menyabet medali perunggu dari kategori Corporate Social Responsible yaitu tim Darah Kita. Melalui akumulasi perolehan medali tersebut, Indonesia sekaligus dinobatkan sebagai negara dengan perolehan emas terbanyak dibandingkan negara lainnya seperti Laos, Singapore, Vietnam dan Thailand yang hanya berhasil mengumpulkan masing-masing 1 emas.



Pertemuan Internasional

1. WSIS Forum 2020 bertema Building Confidence and Security in the use of ICTs
2. Ministerial Meeting Digital Economy Task Force (DETF) 2020 negara-negara anggota G20.

CAPAIAN SEKTOR

BALITE



Kilas Setahun
Penelitian dan Pengembangan
SDM Bidang
Kominfo



Penelitian

Pada tahun 2019, BLSDM menargetkan sebanyak 10 (sepuluh) penelitian. Pada realisasinya, Badan Litbang SDM berhasil melampaui target dengan menghasilkan 11 (sebelas) penelitian. Tidak sampai di situ, penelitian kebijakan yang dimotori oleh Peneliti internal Badan Litbang SDM juga dianggap bermanfaat oleh *stakeholders* terkait untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan baik bagi unit kerja internal Kemenkominfo dan juga Kementerian lain dengan tolak ukur kuesioner *feedback* yang direspon oleh *stakeholders* atas laporan hasil penelitian. Berikut terlampir judul penelitian yang telah mendapatkan *T* kuesioner dari *stakeholders*.

Feedback Penelitian Badan Litbang SDM Tahun 2019

No	Judul	Stakeholder	Bermanfaat (√) Tidak (x)
1.	Studi Penyesuaian Tarif Layanan Pos Universal	Asisten Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media I, Kementerian BUMN	√
2.	Analisis Kebutuhan Regulasi Pembangunan Small Cell 5G di Indonesia	Dit. Penataan Sumber Daya, Ditjen SDPPI Kemenkominfo	√
3.	Analisis Perencanaan SDM PT Pos Indonesia	Asisten Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media I, Kementerian BUMN	√
4.	Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Digital Terrestrial Television (DTT)	Dit. Penyiaran, Ditjen PPI Kemenkominfo	√
5.	Kajian Sinergisitas Penyelenggaraan Layanan OTT Dengan Penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (KRT-BRTI) • Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia 	√
6.	Proyeksi Kebutuhan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia (2019-2030)	BPPTIK Cikarang Kemenkominfo	√
7.	Perkembangan dan Strategi Arah Pengembangan Ekonomi Digital	Dit. Ekonomi Digital, Ditjen Aptika Kemenkominfo	√
8.	Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	Dit. Tata Kelola Aplikasi Informatika, Ditjen Aptika Kemenkominfo	√
9.	Pengembangan Konsep GPR di Era Revolusi Industri 4.0	Sesditjen IKP, Ditjen IKP Kemenkominfo	√
10.	Survei Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Implikasinya terhadap Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi Masyarakat	Pusat Kelembagaan Internasional, Setjen Kemenkominfo	√
11.	Penyusunan Indeks Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Dit. Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Ditjen IKP Kemenkominfo	√

Untuk tahun 2020, Badan Litbang SDM menargetkan sebanyak 6 (enam) Penelitian dengan judul sebagai berikut:

1. Penyusunan Standar Indeks Kepatuhan Penyelenggara Pos
2. Grand Design Penomoran Televisi Digital Free-to-Air Indonesia (Short Study)
3. Studi Kebijakan Penomoran Internet of Things/ Machine to Machine Communications di Indonesia (Short Study)
4. Kesiapan Implementasi Big Data Pemerintah: Persiapan pengumpulan data melalui kuesioner, kuesioner sedang dalam tahap *review* oleh ahli
5. Pengembangan Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Implementasi, Nilai-nilai Pancasila
6. Efektivitas Multi Kanal dalam Diseminasi Informasi Kebijakan Publik

Penelitian di atas saat ini masih dalam tahap penyelesaian laporan penelitian. Nantinya, *executive summary* dari penelitian akan disampaikan ke *stakeholders* untuk dijadikan pertimbangan untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan. Setelah itu, *stakeholders* diberikan kuesioner *feedback*. Hasil kuesioner tersebut dapat menyimpulkan apakah penelitian dinilai bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi pengambilan keputusan pada *stakeholders*.

Sebagian dari judul tersebut juga dibuat dalam versi Policy Brief. Policy Brief merupakan hasil analisis terhadap suatu isu strategis dan kebijakan dalam bentuk naskah singkat, untuk

meyakinkan *policy maker* agar mengadopsi alternatif pilihan yang diusulkan. *Policy brief* berfokus pada kajian singkat dan padat terkait isu-isu hangat di masyarakat.

Pada tahun 2019, Badan Litbang SDM menghasilkan 1 (satu) *policy brief* pada bulan November yang berjudul, "Strategi Pengembangan Government Public Relations (GPR) di Era Revolusi Industri 4.0". Di tahun 2020 sendiri, sampai dengan bulan Oktober, kami menyusun 4 (empat) *policy brief* dengan judul:

1. Survei Dampak COVID-19 Terhadap Aspek Sosial dan Ekonomi di Masyarakat
2. Sistem Kerja Flexible Working Space (FWS) sebagai Bagian Transformasi Digital di Lingkungan Kementerian Kominfo
3. Optimalisasi Media Online Kominfo untuk Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Komunikasi Publik
4. Pencegahan Kemunculan Cluster Baru Dalam Pilkada Serentak 2020

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rangkuman capaian untuk program-program prioritas di Badan Penelitian dan Pengembangan SDM selama setahun kepemimpinan Bapak Menteri Johnny Gerald Plate adalah sebagai berikut:



Digital Talent Scholarship (DTS)
Capaian: 77.845 orang



Beasiswa S2/S3
Bidang Kominfo
Capaian: 127 orang



Pelatihan Aparatur Bidang
Kominfo
Capaian: 955 orang



Pendidikan Tinggi STMM
Yogyakarta
Capaian: 2.390 orang



Bimtek Kewirausahaan
Capaian: 240 orang



Pengenalan TIK Bagi
Masyarakat
Capaian: 6.133 orang

Digital Talent Scholarship

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bidang teknologi digital saat ini sangat dibutuhkan, khususnya dalam rangka mendukung implementasi revolusi industri 4.0 di Indonesia, dengan fokus penguatan ekonomi digital. Untuk itu, ekosistem ekonomi digital seperti kesiapan teknologi, pasar, pelaku usaha, kebijakan, iklim investasi, dan kualitas serta kuantitas SDM perlu diperbaiki untuk mendukung pertumbuhan. Permasalahan ketenagakerjaan terutama dalam hal *skills gap*, di mana kebutuhan tenaga kerja ahli dalam bidang teknologi masih belum tercukupi. Laporan World Bank tahun 2016 bahwa saat ini Indonesia mengalami kekurangan tenaga kerja semi terampil dan terampil sebesar 9 juta orang pada tahun 2015-2030. Padahal di sisi lain, Indonesia justru diproyeksikan menjadi negara ekonomi terbesar ke-7 tahun 2030.

Digital Talent Scholarship (DTS) merupakan program pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan Badan Litbang SDM untuk meningkatkan keterampilan (up-skilling) SDM bidang Komunikasi dan Informatika sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Kegiatan DTS mulai dilaksanakan pada tahun 2018 di mana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Perguruan Tinggi negeri maupun swasta, Politeknik negeri maupun swasta, perusahaan teknologi global.

Pada tahun 2019, kegiatan DTS dikembangkan dengan 5 (lima) Akademi Pelatihan yaitu Fresh Graduate Academy (FGA), Vocational School Graduate Academy (VSGA), Coding Teacher Academy (CTA), Online Academy (OA) dan Digital Leadership Academy (DLA) dengan deksripsi sebagai berikut:

No	Akademi	Tema Pelatihan	Keterangan
1.	<i>Fresh Graduate Academy (FGA)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Cyber Security • Artificial Intelligence • Big Data Analytic • Cloud Computing • Internet of Things • Machine Learning 	Akademi ini diperuntukkan bagi lulusan D3, D4 dan S1 yang belum bekerja bidang TIK. MIPA dan teknik lainnya yang berhubungan dengan TIK. Program ini juga terbuka bagi penyandang disabilitas
2.	<i>Vocational School Graduate Academy (VSGA)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Junior Network Administrator • Junior Graphic Designer • Junior Web Developer • Junior Mobile Programmer • Intermediate Administrator 	Akademi ini diperuntukkan bagi lulusan SMK atau siswa kelas 12 SMK jurusan terkait TIK yang belum bekerja
3.	<i>Coding Teacher Academy (CTA)</i>	<i>Programming in Essentials Python</i>	Akademi ini diperuntukkan bagi guru bidang TIK yang mengajar di SMK, SMA, Madrasah Aliyah, dan SMALB negeri dan swasta
4.	<i>Online Academy (OA)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CCNA security • CCNA Cyber operations • IT essentials • Programming Essentials in Python • Artificial Intelligence • Big Data • Associate Cloud Engineering • Mobile Android Programming • Digital Skills • Digital Policy 	Akademi ini diperuntukkan bagi semua kalangan dan usia (kecuali disyaratkan khusus)
5.	<i>Digital Leadership Academy (DLA)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 5G • IoT • Digital Economy • Financial Technology 	Akademi ini diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil

Presentase Capaian Realisasi Peserta dan Kelulusan Peserta DTS 2019

Dengan target hilir untuk mencetak lulusan pelatihan angkatan kerja muda yang terserap industri pada akademi FGA dan VSGA, maka BLSDM menyusun kuesioner untuk mengetahui penyerapan lulusan kedua alumni akademi tersebut. Sebanyak 1.210 alumni FGA dari total 5.559 peserta FGA tersertifikasi (21%) dan 737 alumni VSGA dari total 4.657 peserta VSGA tersertifikasi diserap industri (16%). Sehingga capaian total alumni FGA dan VSGA tersertifikasi yang diserap industri pada tahun 2019 adalah sebanyak 1.947 dari 10.216 total peserta FGA dan VSGA tersertifikasi dengan prosentase 19,05%.

Untuk tahun 2020, Badan Litbang SDM menetapkan target yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya sekaligus menambahkan akademi sehingga total akademi menjadi 6 (enam) dengan sasaran peserta sebagai berikut:

- Online Academy (OA) target peserta yaitu Professional/ Sudah Pernah Bekerja/ Tidak Sedang Menempuh Pendidikan, ASN, POLRI/TNI.



- Thematic Academy (TA) target peserta yaitu untuk peserta umum.
- Digital Entrepreneurship Academy (DEA) target peserta yaitu untuk peserta umum dan ibu rumah tangga.
- Fresh Graduate Academy (FGA) target peserta yaitu untuk lulusan D3, D4, S1 bidang TIK, MIPA dan Teknik yang belum atau tidak sedang bekerja
- Vocational School Graduate Academy (VSGA) target peserta yaitu untuk lulusan SMK dan D3/D4 bidang TIK, Telekomunikasi, Multimedia, DKV, Elektro, serta yang terkait dan belum atau tidak sedang bekerja.
- Regional Development Academy (RDA) Program Pelatihan Teknis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan Bidang TI dan Komunikasi.

Pandemi COVID-19 sempat menjadi hambatan yang cukup signifikan mempengaruhi pelaksanaan program DTS. Oleh karena itu, sebagian sebagian besar pelatihan dilaksanakan secara daring. Pelaksanaan secara *offline* juga mulai dilaksanakan sejak Juni namun dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan dan pembatasan social serta menerapkan *rapid test* kepada tiap peserta sebelum pelatihan berlangsung.



Beasiswa Pascasarjana Dalam dan Luar Negeri

Dalam rangka menciptakan SDM nasional bidang kominfo yang kompeten, handal dan profesional serta berdaya saing tinggi melalui pendidikan formal, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan beasiswa S2 dalam negeri dan luar negeri bagi para ASN di seluruh Indonesia, beasiswa luar negeri untuk masyarakat umum yang bergerak di bidang kominfo.

Program beasiswa dalam negeri diselenggarakan bekerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, diantaranya UI, UGM, ITB, ITS, UNAIR, USU, UNHAS, UNS, dan UNAND. Dengan mempertimbangkan pembatasan bepergian dan untuk mencegah penyebaran virus SARS-Cov2, maka Beasiswa tahun 2020 hanya dibuka untuk tujuan perguruan tinggi dalam negeri.

Pelatihan Bidang Kominfo bagi Aparatur

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang

diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral, dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 70 ayat 1 dan 2 bahwa Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan Kompetensi. Pengembangan Kompetensi tersebut melalui Pendidikan dan Pelatihan, Seminar, Kursus dan Penataran.

Berdasarkan hasil kajian Badan Litbang SDM tahun 2019, jumlah SDM ASN bidang Kominfo sebanyak 17.727 orang yang terdiri dari 13.336 orang ASN TIK dan 4.391 orang ASN Kehumasan. Berdasarkan hal tersebut Badan Litbang SDM melaksanakan kegiatan pelatihan bidang kominfo bagi aparatur sebagai upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur. Sejak Oktober 2019 hingga Oktober 2020, Badan Litbang SDM telah memberikan pelatihan/diklat bagi aparatur sebanyak 955 orang dengan tema-tema sebagai berikut:

- Latsar Gol III Batch 1, 2, 3
- Diklat Sentiment Analysis
- Diklat Pranata Humas Tk. Ahli
- Diklat Pelayanan Informasi Publik
- Diklat Smart City
- Diklat PIM II
- TOF *smart city*
- Diklat *Big Data Analytics*
- Diklat Sertifikasi Bendahara
- Bimtek ASN Bidang Keahlian Desain Grafis
- Bimtek ASN Bidang Keahlian Infografis

- Bimtek ASN Bidang Keahlian Cloud Computing
- Bimtek ASN Bidang Keahlian Desain Grafis dan Infografis
- Bimtek ASN Bidang Keahlian Drive Test & Pelatihan dan sertifikasi Barang Jasa Pemerintah
- Bimbingan Teknis Document Control Management Bagi Aparatur Pemerintah
- Bimtek Bagi Aparatur pemerintah bidang administrasi perkantoran berbasis TIK
- Pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Komunikasi dan Informatika

Salah satu agenda prioritas pembangunan ketenagakerjaan adalah percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program pelatihan yang strategis juga menjadi kebijakan pasar tenaga kerja tahun 2025. Untuk mempersiapkan hal tersebut, peningkatan jumlah tenaga terampil untuk menghadapi keterbukaan pasar merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan.

Pengembangan SDM Nasional bidang komunikasi dan informatika dalam rangka peningkatan produktivitas

dan daya saing bangsa telah diupayakan Kementerian Kominfo sejak didirikan pada tahun 2005.

Di antaranya melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional pada Pasal 14 yang menyatakan tentang pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dan lembaga sertifikasi profesi dalam sistem pelatihan kerja nasional. Berdasarkan PP tersebut.

Kementerian Kominfo bertugas sebagai instansi pembina teknis standardisasi profesi tenaga kerja nasional sektor kominfo dimana kompetensi SDM dilakukan melalui uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang Kominfo pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang menjadi mitra dan dibuktikan melalui Sertifikat kompetensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pengenalan TIK bagi masyarakat

Era masyarakat informasi menjadikan informasi sebagai suatu aset yang berharga dan dapat diolah dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pengaksesan dan pengolahan informasi saat ini pun sangat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan demikian, masyarakat perlu memiliki pengetahuan dasar dan pemahaman yang cukup mengenai TIK dan pemanfaatannya. Hal tersebut menjadi landasan Badan Litbang SDM untuk melaksanakan kegiatan pengenalan TIK bagi masyarakat khususnya bagi

kalangan wanita, anak-anak dan disabilitas dengan tujuan memberikan wawasan tentang TIK dan pemanfaatannya.

Dalam pelaksanaannya Badan Litbang SDM memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di unit pelaksana teknis di bawah Badan Litbang SDM.



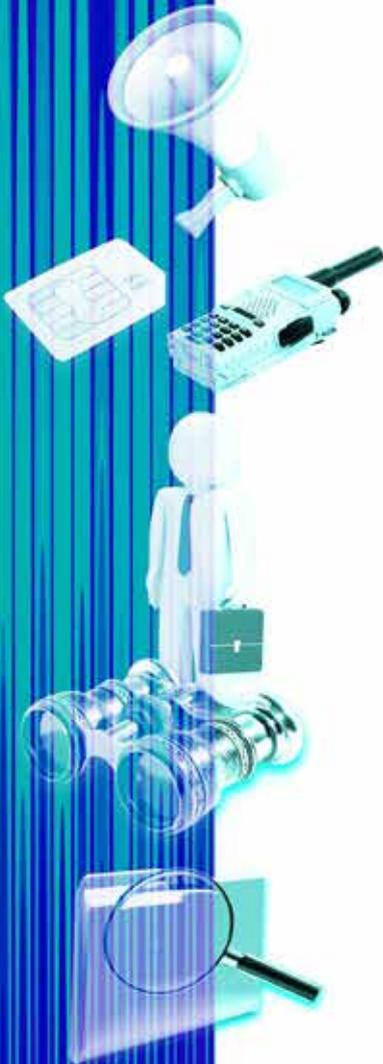
Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM

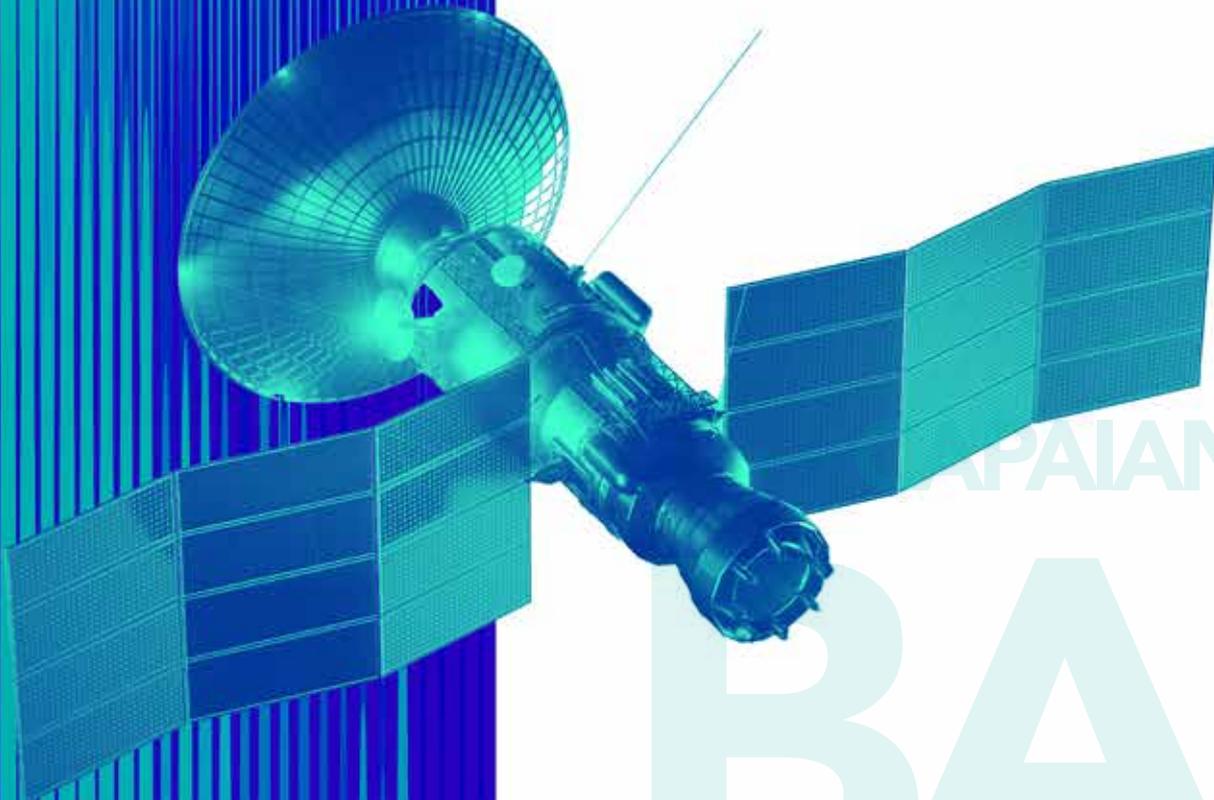
Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta

Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta (STMM "MMTC" Yogyakarta) adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang berada di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang komunikasi dan infomatika dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Sejak 2018, STMM "MMTC" Yogyakarta telah tekakreditasi B oleh BAN-PT. Sampai saat ini STMM "MMTC" Yogyakarta menyelenggarakan dari 3 (tiga) jurusan dengan 6 (enam) program pendidikan (prodi), yaitu:





BAKTI Membangun Indonesia dari Pinggiran



KEMENTERIAN PERKAWASAN SEKTOR

BAKTI

BAKTI merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan bertanggungjawab langsung ke Menteri. Dipimpin oleh Direktur Utama, tugas yang diemban BAKTI berkaitan erat dengan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan penyediaan infrastruktur serta layanan telekomunikasi dan informatika.

Cikal bakal Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) lahir pada tahun 2006. Pada awal berdirinya, BAKTI dikenal sebagai Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP) dan pada periode 2010 – 2018 bernama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). Ketika masih menjadi BP3TI, bentuk organisasi yang dijalankan masih merupakan unit eselon, namun pada tahun 2017 dalam upaya meningkatkan fleksibilitas, efektivitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya, struktur BP3TI bertransformasi dari semula berbasis proses (*process based*) menjadi berbasis output layanan (*output based*), yaitu infrastruktur dan ekosistem dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Bentuk ini tetap dipertahankan ketika BP3TI berganti nama menjadi BAKTI pada 23 Mei 2018.

Sampai dengan Oktober 2020, BAKTI telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menghadirkan akses telekomunikasi dan informatika di wilayah non komersial/3T. Capaian kinerja BAKTI tersebut berupa pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika berupa Base Transceiver Station, Penyediaan Akses Internet dan juga utilisasi/pemanfaatan Palapa Ring.

Base Transceiver Station (BTS) 4G

Kebutuhan masyarakat akan jaringan telekomunikasi broadband semakin tinggi dewasa ini. Tidak hanya masyarakat di perkotaan saja, tetapi juga masyarakat di pedesaan dan daerah rural memiliki kebutuhan yang sama untuk bisa menikmati jaringan kencang ini. Ketersediaan jaringan broadband memberikan dampak baik dari sisi pendidikan, sosial kemasyarakatan dan tentunya mendorong peningkatan ekonomi yang pada akhirnya bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kebutuhan tersebut semakin meningkat dengan adanya pandemi COVID-19, di mana aktivitas-aktivitas ekonomi dan bisnis serta belajar-mengajar masyarakat diarahkan ke virtual untuk mencegah penularan COVID-19. Hadirnya BTS 4G dari BAKTI, diharapkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan akses telekomunikasi *broadband* di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).

Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah non-komersial/3T merupakan salah satu program Universal Service Obligation (USO) yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui BAKTI. Program ini merupakan strategi Kementerian Kominfo untuk bisa mengurangi kesenjangan akses telekomunikasi di Indonesia, dan pada gilirannya akan memperkuat persatuan & kesatuan bangsa serta ketahanan nasional.

Dalam menentukan lokasi BTS, BAKTI menggunakan model bottom-up, di mana usulan penyediaan BTS berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan agar penyediaan yang dilakukan BAKTI dapat terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat guna. Selain memberikan usulan lokasi, pemerintah daerah juga wajib mempersiapkan lahan dan meminjam-pakaikan kepada Kementerian Kominfo.

Sampai dengan September 2020, progress pembangunan BTS 4G di wilayah non-komersial termasuk 3T mencapai 1.586 BTS yang telah on air dengan teknologi 4G. Selain itu juga, terdapat 20 BTS telah on air dengan teknologi 2G dan akan ditingkatkan ke 4G pada akhir tahun 2020.

“Saat ini kami baru membangun 1.606 (BTS sinyal) dan dalam 2 tahun mendatang kami akan membangun mencapai 9.113 desa yang akan kami selesaikan untuk menghadirkan sinyal 4G di daerah 3T,” kata Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Latif dalam siaran langsung di Youtube Indonesia Media pada Kamis (5/11/2020).

Program penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika lainnya yang dilakukan BAKTI yaitu Penyediaan Akses Internet. Program ini menghadirkan akses internet gratis yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, balai desa, kantor-kantor pemerintahan serta lokasi publik di wilayah 3T.

Pada awalnya, akses internet disediakan oleh BAKTI melalui perangkat Vsat dengan kecepatan akses sebesar 2Mbps. Seiring dengan ketersediaan koneksi jaringan yang bisa menjadi alternatif, saat ini BAKTI juga memanfaatkan *fiber optic*, BTS, maupun radio link dalam penyediaan sumber koneksi akses internet yang dibangunnya.

Sampai dengan 20 September 2020, BAKTI telah membangun akses internet di 7.965 lokasi dengan rincian:

- Kantor Pemerintahan: 2.363 Lokasi
- Layanan Publik: 61 Lokasi
- Pariwisata: 73 Lokasi
- Layanan Kesehatan: 861 Lokasi
- Layanan Usaha: 42 Lokasi
- Pendidikan: 4.138 Lokasi
- Pertahanan dan Keamanan: 45 Lokasi
- Pusat Kegiatan Masyarakat: 243 Lokasi
- Keagamaan: 139 Lokasi

Dalam upaya merespon kebutuhan akses internet masyarakat di masa pandemi COVID-19, baik untuk bekerja dari rumah (WFH) maupun belajar dari rumah (SFH), BAKTI menyiapkan 2.000 titik akses internet di lokasi baru.

"Kita coba solusikan secara cepat dengan menyiapkan lokasi baru akses internet sebanyak 2.000 titik. Karena, inilah solusi jangka pendek yang bisa kita lakukan, khususnya dalam periode sekarang pandemi COVID-19 ini," ujar Direktur Utama Bakti, Anang Latif.

Palapa Ring

Palapa Ring merupakan proyek pembangunan *backbone* internet cepat nasional yang menghubungkan 514 ibukota kabupaten/kota di Indonesia yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Non-KPBU.

PT Telkom telah mengintegrasikan *backbone* serat optik di 457 Kabupaten/Kota melalui skema Non-KPBU. Penggelaran Palapa Ring oleh Pemerintah di 57 kabupaten/kota di 11 provinsi dengan skema KPBU merupakan wujud dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk menyediakan internet cepat di wilayah-wilayah 3T yang secara komersial tidak feasible untuk dibangun oleh pihak swasta.

Bekerja sama dengan PT Palapa Ring Barat, PT LEN Telekomunikasi Indonesia, PT Palapa Timur Telematika, pemerintah melalui BAKTI telah menuntaskan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional di seluruh ibukota kabupaten/kota di Indonesia.

Sejak Palapa Ring Timur diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2020, melengkapi jaringan tulang punggung internet nasional Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Tengah yang telah beroperasi sejak 2018, BAKTI terus menggenjot utilisasi/pemanfaatan jaringan tulang punggung serat optik sepanjang lebih dari 12.000 km ini.

Target utilisasi jaringan pada tahun 2020 untuk Palapa Ring Barat: 35%, Palapa Ring Tengah: 10% dan Palapa Ring Timur: 5% dengan Service Level Agreement (SLA) 95%.

Dari target tersebut, capaian sampai dengan September 2020 adalah sebagai berikut:

- **Palapa Ring Barat: 33% (Fiber Optic)**
Total utilisasi adalah sebesar 99 Gbps dari 3 proyek (P1, P2, P3) dengan masing-masing Kapasitas Fiber Optic sebesar 100 Gbps (Total 300 Gbps)
- **Palapa Ring Tengah: 18,33% (Fiber Optic)**
Total utilisasi adalah sebesar 110 Gbps dari 6 proyek (P4, P5, P6, P7, P8A, P8B) dengan masing-masing Kapasitas Fiber Optic sebesar 100 Gbps (Total 600 Gbps)
- **Palapa Ring Timur: 15,75% (Fiber Optic) dan 45,45% (Microwave)**
Total utilisasi Fiber Optic adalah 126 Gbps dari 10 proyek (P9-P13, P15-P17) dengan masing-masing Kapasitas sebesar 100 Gbps. (Total 800 Gbps).

Total utilisasi Microwave adalah kurang lebih 2500 Mbps dari 4 proyek yang memiliki kapasitas sebesar 5500 Mbps.



**Anang Achmad Latif,
ST., MSc.**
Direktur Utama BAKTI

1 Tahun Johnny G Plate Pimpin Kementerian Kominfo

23 Okt 2019	29 Okt 2019	21 Nov 2019
<p>Serah Terima Jabatan. Menteri Johnny Plate tampil perdana sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika RI periode 2014 – 2019.</p>	<p>Jumpa Pers Perdana. Menteri Johnny Plate memaparkan program kerja Kementerian Kominfo selama 5 tahun ke depan dengan dua prinsip utama, yaitu Government Public Relation (GPR) dan infrastruktur digital.</p>	<p>Raih Penilaian Badan Publik Informatif. Tahun 2019 ini, Kemkominfo kembali mendapatkan penilaian sebagai Badan Publik Kementerian dengan kualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP).</p>
30 Jan 2020	04 Feb 2020	14 Feb 2020
 <p>KominfoConnect. Ajang temu akbar sekaligus pertemuan perdana Menteri Johnny dengan seluruh sivitas Kementerian Kominfo</p>	<p>Temui Ketua DPR RI. Menkominfo menggelar pertemuan konsultasi dengan Pimpinan DPR RI terkait Rancangan UU Pelindungan Data Pribadi</p>	<p>Paparkan proyeksi ekonomi digital Indonesia dalam Gala Dinner US-Indonesia Society (USINDO) di Washington DC, AS.</p>
26 Mar 2020	31 Mar 2020	07 Apr 2020
<p>Mengeluarkan Keputusan Keputusan Menkominfo terkait aplikasi tracing, tracking, dan fencing untuk mendeteksi COVID-19</p>	<p>Bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden meluncurkan Aplikasi 10 Rumah Aman untuk memutus penyebaran COVID-19</p> 	<p>Menkominfo sampaikan bahwa penanganan COVID-19 melibatkan unsur Pentahelix: pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media</p>



25 Nov 2019	20 - 24 Jan 2020	28 Jan 2020
<p>Menghadiri 14th Annual Meeting of Internet Governance Forum 2019 di Berlin, Jerman. Menkominfo memaparkan kesuksesan tata Kelola internet di Indonesia dan kesiapan Indonesia menjadi Negara Digital tahun 2035</p>	<p>Melakukan pertemuan bilateral dengan Kerajaan Arab Saudi, CEO Youtube, dan Presiden Google Asia Pacific dalam World Economic Forum Annual Meeting 2020 di Davos, Swiss.</p>	<p>Serahkan Naskah RUU PDP ke DPR RI. Menkominfo bersama Menkumham dan Mendagri ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi perwakilan pemerintah dalam pembahasan RUU PDP.</p>
26 Feb 2020	28 Feb 2020	16 Mar 2020
<p>Menggelar konferensi pers klarifikasi disinformasi terkait RUU Cipta Kerja.</p>	<p>Menetapkan skema whitelist untuk implementasi aturan pengendalian IMEI</p>	<p>Menkominfo tegaskan dukungan Kementerian Kominfo beserta Penyelenggara Telko dan Platform Digital atas kebijakan Presiden Jokowi terkait penanganan COVID-19.</p> 
30 Apr 2020	18 Mei 2020	20 Mei 2020
<p>Peluncuran portal integrasi data Bersatu Lawan (BLC) COVID-19 yang dilengkapi dengan layanan konsultasi psikologi SEJIWA.</p>	<p>Peluncuran tiga program pelatihan bidang digital untuk jaga produktivitas selama PSBB, yaitu Digital Talent Scholarship 2020, Siberkreasi Online Class, dan program pendampingan UMKM/Umi di Kawasan prioritas</p>	<p>Upacara Virtual Hari Kebangkitan Nasional. Menteri Johnny Plate mendorong agar situasi pandemi jadi momentum untuk bangkit dalam optimisme normal baru</p>

24 Mei 2020	05 Jun 2020	22 Jun 2020	
<p>Momen Hari Raya Idulfitri 1441 H. Menkominfo mengajak seluruh pegawai, mitra kerja, dan masyarakat Indonesia untuk berdamai dengan pandemi.</p>	<p>Menerapkan kebijakan Pelaksanaan Kerja Di Kantor dan Fleksibilitas Tempat Bekerja (Flexible Working Space) bagi pegawai Kementerian Kominfo</p>	<p>Kementerian Kominfo menyiapkan 5 Program Prioritas Tahun 2021 untuk mempercepat Digitalisasi Nasional</p>	
22 Jul 2020	06 Jul 2020	22 Aug 2020	
<p>Hadiri G20 Digital Economy Ministerial Meeting secara virtual, Menkominfo serukan prinsip kedaulatan dan keamanan data</p>	<p>Menerima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Kemkominfo tercatat telah menerima Opini WTP empat kali berturut-turut sejak tahun 2016.</p>	<p>Menkominfo mendorong pengembangan layanan telemedis untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan jarak jauh</p>	
03 Sept 2020	06 Sept 2020	07 Sept 2020	
<p>Penandatanganan Preparatory Work Agreement (PWA) Proyek Satelit Multifungsi Republik Indonesia (SATRIA)</p>	<p>Sehat, Semangat! Pesan Menkominfo bagi keluarga besar sivitas Kominfo untuk tetap produktif di tengah pandemi COVID-19</p>	<p>Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi dinobatkan sebagai Winner dalam kontes World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2020</p>	
28 Sept 2020	28 Sept 2020		05 Okt 2020
<p>Upacara Hari Bhakti Postel ke-75. Menkominfo mengajak seluruh insan pos dan telekomunikasi untuk berkontribusi, dalam percepatan transformasi digital.</p>	<p>Menkominfo luncurkan Anugerah Jurnalistik 2020, bentuk apresiasi atas peran dan dedikasi jurnalis sebagai garda terdepan penyampai informasi seputar penanganan COVID-19.</p>		<p>Penambahan fitur-fitur baru pada Aplikasi PeduliLindungi untuk memudahkan masyarakat menghadapi masa Normal Baru</p>

	15 Jul 2020	16 Jul 2020	17 Jul 2020	
	Menerima Kunjungan Kehormatan Dubes Qatar untuk membahas kerja sama di bidang telekomunikasi dan informatika antara Indonesia dan Qatar	Peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia #KitaBelaKitaBeli sebagai upaya mendorong transformasi digital UMKM/Umi di masa Adaptasi Kebiasaan baru	Menerima Kunjungan Kehormatan Dubes Perancis, membahas tiga kerja sama yang mencakup Pusat Data Nasional, Improvement on TV Transmitting Stations, dan Proyek Satelit SATRIA.	
	29 Aug 2020	29 Aug 2020	01 Sept 2020	
	Penandatanganan NKA bersama KPU dan Bawaslu tentang Pengawasan Konten Internet dalam penyelenggaraan Pilkada 2020	Pertemuan persahabatan antara Menkominfo dan Wakil Dubes Amerika Serikat, membahas kerja sama di bidang infrastruktur TIK, talenta digital, dan perlindungan data pribadi	Kembali gelar Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi I DPR RI mengenai RUU Pelindungan Data Pribadi	
	23 Sept 2020	24 Sept 2020	25 Sept 2020	
	Komisi I DPR RI menyetujui Pagu Definitif Kominfo tahun 2021 sebesar Rp16,9 Triliun untuk percepatan transformasi digital nasional	Kunjungan Kerja ke NTT dan NTB dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Daerah Pariwisata Super Prioritas	Dalam kunjungan kerja ke NTT, Menkominfo sampaikan komitmen pemerintah menyediakan akses internet dengan beragam teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis wilayah tersebut.	
	06 Okt 2020	14 Okt 2020	16 Okt 2020	21 Okt 2020
	Menkominfo sampaikan bahwa pengesahan UU Cipta Kerja membawa perubahan signifikan bagi sektor telekomunikasi, penyiaran, dan pos untuk percepatan transformasi digital	Pemerintah akan mengakselerasi penyediaan akses internet di fasilitas layanan kesehatan untuk penanganan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional	Membahas rencana digitalisasi aksara nusantara dalam pertemuan dengan Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X	Hadiri pertemuan ITU Virtual Digital World 2020, Menkominfo sampaikan empat inisiatif Indonesia untuk percepat transformasi digital



Ririek Adriansyah

Direktur Utama Telkom Indonesia

Mengawal Indonesia Melewati Pandemi Melalui Telekomunikasi

Sejak dilantik tahun lalu, sebagian besar perjalanan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju diisi oleh perjuangan mengatasi pandemi yang melanda seluruh dunia, yaitu COVID-19. Seluruh Menteri di bawah komando Bapak Joko Widodo dan KH. Maruf Amin berjuang keras bahu-membahu mengatasi pandemi di berbagai sektor kehidupan.

Pada Maret 2020, pemerintah mengimbau agar seluruh masyarakat mengalihkan seluruh aktivitas sehari-harinya ke rumah. Pemerintah daerah pun juga menerapkan kebijakan beragam demi menekan jumlah penderita positif COVID-19. Selama masa pandemi ini, seluruh aktivitas yang pada umumnya dilaksanakan secara fisik, kini banyak dilakukan secara daring. Kebijakan ini berdampak kepada perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin digital. Mulai dari pemanfaatan video conference untuk bekerja, akses *e-learning* bagi pelajar dan mahasiswa, penggunaan media sosial, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui layanan *e-commerce*.

Karena itu, menjadi tantangan TelkomGroup dan seluruh operator telekomunikasi untuk senantiasa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Menjawab tantangan ke depan, sebagai BUMN telekomunikasi, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyadari betul pentingnya pembangunan infrastruktur terhadap pembangunan masyarakat dan ekonomi Indonesia. Untuk itu Telkom secara konsisten terus membangun infrastruktur telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke dan hingga ke pelosok yang memiliki akses langsung ke mancanegara, memastikan konektivitas dan akses informasi dapat diperoleh secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Telkom juga melakukan modernisasi jaringan telekomunikasi dengan menggunakan teknologi berbasis 100% *fiber optic* di kota dan kabupaten seluruh Indonesia, yang dikenal dengan istilah *Modern Broadband City*. Adanya modernisasi jaringan ke *fiber optic* menjadi landasan penting dalam penyediaan layanan digital baik digital *platform* maupun *services*.

Kementerian Komunikasi dan Informatika di bawah pimpinan Bapak Johnny G. Plate telah mengambil peran yang sangat baik dalam menjadi dirigen untuk mengorkestrasi seluruh operator dalam menunaikan baktinya kepada Negeri.

Selain memenuhi kewajibannya sebagai regulator, Kementerian Kominfo telah menginisiasi sejumlah program agar upaya penanggulangan COVID-19 berjalan dengan baik. Salah satunya adalah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Pedulilindungi yang ikut dikembangkan oleh TelkomGroup. Aplikasi ini dapat membantu masyarakat untuk waspada terhadap potensi penyebaran COVID-19 di samping Pemerintah terbantu dalam upaya melacak dan menelusuri penyebaran COVID-19 dari riwayat lokasi berdasarkan perangkat mobile yang digunakan masyarakat. Tidak hanya itu, Kementerian Kominfo juga secara

aktif berperan sebagai garda sosialisasi Pemerintah kepada masyarakat agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan melalui program 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak).

Kegiatan belajar mengajar yang saat ini sangat mengandalkan jaringan internet, tentunya membutuhkan biaya kuota internet bagi seluruh masyarakat yang memunculkan problematika baru, khususnya lapisan masyarakat yang saat ini kondisinya ekonominya terganggu sebagai dampak pandemi. Pada kondisi ini, Kementerian Kominfo turut andil mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengimplementasikan program penyediaan kuota belajar dengan menyinergikan seluruh operator seluler, termasuk Telkomsel sebagai bagian dari keluarga besar TelkomGroup.

Memperingati satu tahun kepemimpinan Bapak Johnny G. Plate, TelkomGroup mengucapkan selamat atas kerja keras Bapak. Semoga Bapak tetap menjaga semangat dalam mengawal Indonesia melewati badai pandemi COVID-19 melalui telekomunikasi, demi kejayaan Ibu Pertiwi.



Setyanto Hantoro	Direktur Utama Telkomsel
------------------	--------------------------

Setahun Kepemimpinan Johnny G. Plate:

**Penguatan Kolaborasi Kemkominfo
RI-Telkomsel menuju Transformasi
Industri Telekomunikasi Digital**

Percepatan transformasi digital nasional merupakan salah satu agenda yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI), sebagai pihak yang punya tanggung jawab besar terhadap kelancaran program tersebut, pun telah menetapkan sejumlah prioritas dalam mengakselerasikan transformasi digital di Indonesia.

Pemerataan 4G, persiapan implementasi 5G, pengembangan talenta digital, hingga penguatan ekosistem digital menjadi sebagian dari prioritas yang dimaksud di atas. Dalam menggarapnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo RI) Johnny G. Plate menekankan pentingnya kolaborasi di setiap lini bersama dengan operator seluler, karena ini merupakan upaya kolaboratif yang harus dilakukan seluruh pemangku kepentingan di industri komunikasi dan informatika.

Memahami hal tersebut, Telkomsel pun mengapresiasi sikap Kemkominfo RI yang terus menguatkan kolaborasi bersama para operator. Terlebih, selama setahun kepemimpinan Johnny G. Plate, sudah banyak kerja sama yang dilakukan antara Kemkominfo RI dengan Telkomsel. Upaya ini mencakup percepatan transformasi digital nasional dan dukungan terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat lainnya.

Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, "Upaya Kemkominfo RI mempercepat transformasi digital nasional sejalan dengan komitmen Telkomsel dalam mengembangkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Kami harap, kolaborasi dengan Kemkominfo RI dapat semakin kuat ke depan, khususnya di masa kepemimpinan Bapak Johnny G. Plate."

Pada akhir 2019 lalu, Kemkominfo RI terlibat langsung dalam dua uji coba 5G yang dilakukan Telkomsel di Batam dan Jakarta. Kemkominfo RI pun tengah berkolaborasi dengan Telkom Group, mencakup Telkomsel, TelkomSAT, dan Telkom University, untuk uji coba koeksistensi 5G dan *Fixed Satellite Service* (FSS) pada pita frekuensi 3,5 GHz. Upaya kolaboratif tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintah yang tengah menyiapkan *roadmap* penerapan 5G di Indonesia.

Lebih lanjut, per Kuartal III tahun ini, Telkomsel memastikan seluruh 1.083 unit BTS Universal Service Obligation (USO) terkoneksi jaringan 4G. Ribuan BTS USO yang dikembangkan bersama Badan Aksesibilitas dan Informasi (BAKTI) Kemkominfo RI tersebut tersebar secara merata di wilayah 3T, dari Sabang hingga Merauke. Ini menjadi bentuk dukungan Telkomsel terhadap upaya pemerintah yang menargetkan ketersediaan 4G di seluruh desa di Indonesia pada 2022.

Kemudian, Kemkominfo RI dan Telkomsel juga bergotong royong dalam menjaga keamanan HKT (handphone, komputer, dan tablet) bagi masyarakat Indonesia. Kemkominfo RI memimpin langsung pengujian kesesuaian *Central Equipment Identity Register* (CEIR) dengan IMEI yang terdaftar dan bersama Telkomsel memastikan sistem *whitelist* yang diterapkan dapat melindungi konsumen dari produk ilegal.

Selain itu, Kemkominfo RI juga terus mendukung persaingan sehat di dalam industri telekomunikasi Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan konsisten memantau penerapan aturan registrasi kartu prabayar. Kemkominfo RI pun telah memberikan kepastian hukum bagi operator dalam hal pemakaian infrastruktur aktif dan pasif secara bersama-sama demi mendukung efisiensi industri secara jangka panjang.

Kemkominfo RI dan Telkomsel pun secara sigap melakukan penanganan dampak pandemi dengan memastikan jaringan telekomunikasi tetap prima. Sesuai arahan Kemkominfo RI, Telkomsel telah melakukan penguatan jaringan di area residensial serta rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat COVID-19. Hal tersebut dilakukan demi mendampingi bangsa menjalani kenormalan baru serta mendukung upaya tenaga medis dalam melindungi masyarakat Indonesia.

"Telkomsel mengucapkan selamat kepada Bapak Johnny G. Plate atas pencapaiannya selama setahun kepemimpinan di Kemkominfo RI. Semoga bisa senantiasa semangat dalam mengabdikan bagi negeri sebagai Kemkominfo RI. Telkomsel akan terus mendukung upaya Kemkominfo RI membangun negeri melalui implementasi teknologi terkini yang tepat guna," kata Setyanto menutup.



Ahmad Abdulaziz A A Al-Neama

President Director & CEO

Bapak Johnny G. Plate dikenal sebagai seorang menteri dan pengusaha Indonesia yang tangguh oleh masyarakat luas. Bagi saya, beliau adalah seorang visioner dengan komitmen pribadi untuk dapat mengukir nama Indonesia di peta global. Sejak 2019, beliau menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo.

Bapak Johnny G. Plate memiliki gaya kepemimpinan yang merupakan perpaduan menarik antara tradisi dan modernitas. Pengalamannya selama bertahun-tahun memungkinkan beliau untuk mencoba dan

menguji model, tetapi pandangan modernnya memungkinkannya untuk mengembangkan model yang ada - yang menciptakan gaya unik beliau.

Industri telekomunikasi mengalami kemajuan pesat dalam setahun terakhir karena dukungan yang diberikan oleh Bapak Johnny G. Plate. Beliau telah bekerja sama dengan Indosat Ooredoo dan pelaku industri telekomunikasi lainnya untuk memahami potensi pertumbuhan dan Indonesia kini mendapatkannya. Mereka yang berada di dalam industri telekomunikasi dan industri terkait lainnya telah melihat perubahan monumental yang dibuat dalam upaya mengubah ekosistem

digital di Indonesia. Beliau telah berperan aktif tidak hanya dalam memelihara pertumbuhan industri tetapi juga memastikan bahwa bisnis di Indonesia telah berupaya tumbuh secara maksimal.

Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang pencapaian beliau. Sebagai pemimpin dalam industri telekomunikasi, saya tidak bisa untuk tidak berterima kasih kepada Bapak Johnny G. Plate atas banyaknya inisiatif yang telah beliau lakukan.

Kebijakan tentang IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) adalah salah satu peraturan terlama yang menunggu untuk disahkan. Setelah Bapak Johnny G. Plate menjabat, beliau sangat menekankan pentingnya manfaat peraturan tersebut dan disahkan tanpa penundaan lebih lanjut.

Aset terbesar untuk meningkatkan komunikasi nasional dan internasional adalah pengembangan jaringan. Bapak Johnny G. Plate telah berperan penting dalam membantu pengembangan jaringan berkelas dunia di 5 destinasi wisata super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Sejak awal beliau telah menjadi pendukung kuat bagi industri telekomunikasi karena beliau menyadari potensi yang dimilikinya dalam merevolusi sistem di Indonesia. Rencana induknya termasuk memperluas cakupan 4G di daerah pedesaan di seluruh Indonesia. Beliau telah mendedikasikan waktunya untuk mendukung dan mendorong penerapan 5G.

Bapak Johnny G. Plate juga telah mendukung Indosat Ooredoo terkait *filing slot* Satelit Indonesia di ITU. Ketika pandemi melanda, beliau juga cukup berempati dengan tekanan yang dialami industri, dengan menunda pembayaran biaya-biaya terkait regulasi. Dukungan beliau yang tak henti-hentinya kepada industri secara luas akan selalu dihargai khususnya pada awal-awal pandemi COVID-19, di mana keterhubungan melalui komunikasi seluler telah menjadi kebutuhan utama.

Dalam setahun kepemimpinan beliau, tidak ada sesuatu yang terlewat dalam melaksanakan visi dan misi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini selaras dengan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. Bapak Johnny G. Plate telah memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi, menyusun strategi, dan mempercepat pembangunan di setiap bidang. Beliau bekerja sesuai dengan visi pemerintah yang mencakup semua tentang percepatan, pengembangan dan kemajuan.

Melalui visi beliau tentang keunggulan Indonesia di seluruh dunia, Bapak Johnny G. Plate telah menjalankan 9 misi untuk mendukung usahanya. Beliau memahami bahwa sebagai sebuah negara, pertama-tama kita perlu menertibkan rumah kita sebelum terjun ke bisnis internasional. Beliau bekerja tanpa henti untuk meningkatkan kualitas hidup di Indonesia yang pada akhirnya akan menghasilkan struktur ekonomi yang produktif dan kompetitif. Sementara pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan di garis depan setiap negara, Bapak Johnny G. Plate sadar akan dampak

lingkungan; di mana pertumbuhan bisnis harus diciptakan. Beliau berdiri tegak sebagai pendukung untuk menciptakan solusi hidup secara berkelanjutan untuk masa depan.

Hidup di masa di mana inklusivitas telah dibicarakan lebih dari sebelumnya, tepat kiranya untuk menyebut Bapak Johnny G. Plate sebagai salah satu pelari terdepan untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi semua masyarakat darimanapun asalnya.

Hal yang mengagumkan dari pria ini adalah kemampuannya untuk memperhatikan setiap detail kecil sambil tetap setia pada gambaran besarnya. Itulah yang membuat beliau menjadi visioner seperti saat ini. Penghargaan kita semua untuk Bapak Johnny G. Plate, yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan pemerintah, dan yang telah dan terus jujur pada dirinya sendiri dan negaranya. Sebagai CEO Indosat Ooredoo, saya bersyukur bisa bekerjasama dengan beliau, beliau benar-benar menciptakan lingkungan yang menumbuhkan semangat bertumbuh dan kewirausahaan. Indonesia, Anda beruntung memiliki Johnny G. Plate.



Tri Wahyuningsih

Group Head Corporate Communications XL Axiata

Sejak Oktober 2019, industri telekomunikasi mengalami perubahan kepemimpinan yang sedikit banyak berpengaruh pada cara pengambilan keputusan di jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (untuk selanjutnya disebut "Kemkominfo"). Akan tetapi, baru berjalan 3 (tiga) bulan perubahan kepemimpinan, terjadilah pandemi COVID-19 yang banyak menyita perhatian seluruh elemen bangsa, sehingga prestasi Kemkominfo agak tertutup oleh isu-isu pandemi ini.

Pun demikian, rekam jejak kepemimpinan Bapak Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika yang dapat kami catat adalah bahwa beliau lebih memberikan kesempatan kepada operator dan bidang usaha di bawah binaan Kemkominfo untuk melakukan kegiatan bisnis dengan mengedepankan prinsip-prinsip B2B dibandingkan sebatas hanya membuat regulasi yang rigid dan dapat membatasi kegiatan usaha.

Selain dari hal tersebut di atas, kami dapat sampaikan pula bahwa Bapak Johnny G. Plate telah mengakomodir sebagian permintaan dari pelaku industri untuk mendapatkan insentif akibat pandemi yang terjadi. Hal ini cukup membantu pelaku industri untuk bertahan dan melanjutkan kegiatan operasionalnya selama masa pandemi.

Demikian pula dalam hal penetrasi layanan telekomunikasi ke daerah-daerah yang belum terlayani, Kemkominfo di bawah kepemimpinan Bapak Johnny G. Plate cukup memberikan dukungan terhadap kolaborasi antara BAKTI dan operator telekomunikasi sehingga proses penggelaran jaringan ke daerah terpencil dapat terencana dengan baik.

Dalam hal pengambilan kebijakan, Bapak Menteri dapat dikatakan cukup cepat dalam memberikan keputusan, termasuk di dalamnya memberikan otorisasi kepada jajaran di bawah kementerian sehingga potensi kekosongan regulasi dapat dikurangi dan hal ini berdampak cukup baik bagi industri telekomunikasi saat ini.

Bapak Menteri cukup mengakomodir butir-butir kebijakan yang selama ini belum terealisasi dan terlihat buntu karena belum dapat dilakukannya revisi undang-undang telekomunikasi atau peraturan pemerintah dibawahnya dengan memasukan hal-hal tersebut ke dalam Undang-Undang Omnibus Law sehingga kami berharap hal tersebut dapat memecahkan kebuntuan dan menjadi jalan keluar bagi perkembangan industri telekomunikasi.

Namun demikian, kami juga ingin menyampaikan masukan agar ke depannya, kepemimpinan Bapak Menteri lebih mempunyai intensi yang cukup terhadap konsolidasi industri yang pada era sebelumnya sudah mulai direncanakan pembuatan kebijakan dan regulasinya.

Kami berharap hal-hal yang sudah baik dari kepemimpinan sebelumnya dapat dilanjutkan untuk lebih meningkatkan pertumbuhan industri Telekomunikasi.

Semoga ulasan kami dapat menjadi masukan dan perbaikan dalam tata laksana penyelenggaraan pada Kemenkominfo di masa yang akan datang, khususnya pada sektor telekomunikasi.

Hormat kami,
PT XL AXIATA, TBK.



Tri Wahyuningsih
Group Head Corporate
Communications XL Axiata



M. Danny Buldansyah

Wakil Presiden Direktur PT Hutchison 3 Indonesia

Seluruh manajemen dari PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) mengucapkan selamat atas satu tahun kepemimpinan Bapak Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selama satu tahun terakhir, banyak sekali yang sudah H3I jalankan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Berbagai dinamika kerja, program bersama, serta inovasi telah dijalani bersama. Tentunya, adanya pandemi yang tengah melanda adalah hal yang paling berat yang harus dilalui. Pandemi telah menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru yang sangat bergantung pada konektivitas dan dunia digital.

Kordinasi dan sinergitas telah banyak dilakukan selama Kemkominfo di bawah pimpinan Pak Johnny. Pak Johnny telah merangkul seluruh pihak dengan sangat baik demi mewujudkan visi misi pemerintah, untuk kepentingan masyarakat Indonesia dan juga mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia.

Seperti yang kita ketahui bersama, Kemkominfo bersama Kemenperin membentuk gugus tugas penerapan Pengendalian IMEI. Hal tersebut berjalan sangat baik, dan memberikan dampak bagi perekonomian nasional. Keputusan besar dan langkah berani dilakukan demi menghentikan penjualan atau pemakaian ponsel ilegal atau yang biasa disebut ponsel black market yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Serta tentunya mendorong perekonomian dengan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

Selain itu, dalam mendukung program pemerintah terkait pengembangan pariwisata pada 5 Destinasi Wisata Super Prioritas, Pak Johnny G. Plate memimpin dan merangkul semua pihak untuk terus mendorong peningkatan konektivitas internet broadband di Kawasan Destinasi Wisata Super Prioritas untuk menjadi penggerak perekonomian nasional, terutama di masa dan setelah pandemi COVID-19.

Kami juga sangat mengapresiasi Pak Johnny dalam mengawal proses migrasi televisi analog ke digital. Setelah DPR RI resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) lewat rapat paripurna, UU tersebut juga mengamandemen regulasi di sektor Telekomunikasi, Penyiaran, dan Pos. Salah satunya adalah kepastian kapan siaran televisi analog akan dimatikan dan beralih sepenuhnya ke siaran televisi digital atau biasa disebut *Analog Switch Off*. Regulasi mengenai hal ini sudah dinantikan selama bertahun-tahun. Dengan disahkannya UU CK, maka siaran televisi analog akan dimatikan pada 2022 mendatang dan beralih sepenuhnya ke penyiaran digital. Dengan demikian pemerintah akan mendapatkan tambahan spectrum frekuensi yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur internet cepat dan mendorong ekonomi digital.

Menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia, H3I tentu akan terus bersinergi dan mendukung visi misi pemerintah, serta turut berkontribusi menjadikan Indonesia semakin maju khususnya pada aspek telekomunikasi dan transformasi digital.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat atas satu tahun kepemimpinan Pak Johnny G. Plate, kami mendoakan semoga seluruh jajaran KemKominfo diberi kesehatan dan tentunya kami menantikan gebrakan dan semangat sinergi dari Bapak Johnny di tahun-tahun berikutnya. Kami, seluruh pimpinan dan karyawan H3I, akan terus mendukung implementasi kebijakan-kebijakan Kemkominfo ke depannya.

Salam hangat,
M. Danny Buldansyah
Wakil Presiden Direktur
PT Hutchison 3 Indonesia

smartfren.



Merza Fachys

Presiden Direktur Smartfren

Kita sangat merasakan adanya warna berbeda dari Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johnny G. Plate, dalam memimpin dan membawa sektor komunikasi dan informatika ke arah yang lebih berkembang, terutama sebagai sektor yang menjadi platform utama dalam transformasi digital. Keputusan-keputusan cepat yang sangat fundamental dengan semangat nasionalisme yang tinggi, sangat kental dirasakan oleh para pelaku usaha di sektor kita ini.

“Ini bukan sekedar potensi peningkatan penerimaan negara, tapi kita harus berhenti sebagai bangsa yang menggunakan handphone ilegal”, demikian disampaikannya dalam kesempatan penetapan mulai berlakunya pengendalian legalitas perangkat handphone melalui IMEI.

Peluncuran aplikasi PeduliLindungi yang diprakarsai oleh Kementerian Kominfo, merupakan salah satu elemen penting dalam menyampaikan informasi ke masyarakat serta pengendalian

penyebaran COVID-19. Kami patut mengapresiasi inisiatif Menteri Kominfo beserta jajarannya yang telah mengembangkan aplikasi tersebut, serta telah berjalan dengan sempurna dan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat.

Kegiatan belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah sebagai konsekuensi pencegahan penyebaran COVID-19, merupakan satu tantangan yang berat bagi ketersediaan jaringan internet untuk seluruh penduduk Indonesia. Inisiatif Menteri Kominfo untuk segera menghadirkan jaringan akses internet ke seluruh wilayah yang belum mendapatkan layanan 4G, patut mendapatkan acungan jempol.

Sejak UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diundangkan, baru kali ini pembangunan infrastruktur telekomunikasi direncanakan dibangun dengan dana APBN. Sebagai operator telekomunikasi, kami sangat mendukung kebijakan

tersebut agar seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati layanan internet yang berkualitas.

Aksesibilitas jaringan internet akan memberikan manfaat besar bagi banyak pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Kondisi kebiasaan baru membuktikan bahwa semua sendi kehidupan ternyata sangat bergantung pada tersedianya layanan internet yang memadai. Dan di masa depan akan jauh lebih banyak lagi kegiatan masyarakat yang sangat bergantung pada konektivitas digital tersebut.

Semoga ke depan Kementerian Kominfo di bawah pimpinan Bapak Johnny G Plate akan dapat terus memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan industri telekomunikasi untuk tumbuh lebih sehat, lebih lincah serta lebih berperan besar dalam mendorong terjadinya transformasi digital yang lebih cepat.



Andri Pranata

PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Net1 Indonesia)

Assalamualaikum Wr Wb,

Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga di masa pandemi ini kita semua selalu dalam lindungan Tuhan YME.

Dalam kesempatan ini, perkenankan saya untuk memberikan ucapan selamat kepada Bapak Johnny G. Plate atas satu tahun kepemimpinan bapak memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Terima kasih atas segala dukungan dan kebijakan yang telah banyak mendukung kami selaku operator seluler guna berkontribusi aktif dan positif untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Di masa-masa tersulit seperti saat ini, tentunya dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, agar kita dapat melewati situasi ini dengan baik. Dan saya yakin Bapak Johnny G. Plate akan mampu memimpin

Kementerian Kominfo ke depannya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan mendukung pertumbuhan bisnis operator seluler ke depannya.

Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terus berkarya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum Wr Wb. Salam sejahtera.

Andri Pranata
CEO
PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Net1 Indonesia)

Opini oleh : Ahmad Irso Kubangun

Tepat 20 Oktober 2019. Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin secara resmi dilantik pada Sidang Paripurna MPR RI. Tiga hari setelahnya tanggal 23 Oktober, Presiden melantik sekaligus memperkenalkan jajaran Menteri untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju. Satu dari 34 Menteri itu adalah Johnny Gerard Plate, yang mengemban amanah di sektor Komunikasi dan Informatika.

Adalah Bang Johnny ~ sapaan akrab Menteri Kominfo bagi rekan-rekan jurnalis. Dari pundak putra asal Ruteng, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini, sektor komunikasi dan informatika akan terjawab di sisa empat tahun masa pengabdianya. Selama satu tahun berjalan, Bang Johnny telah dan akan menuntaskan beberapa program dan kebijakan strategis mewujudkan transformasi digital nasional.

Legislasi adalah Kunci

Kita tahu Kementerian Kominfo ikut mengambil peran penting dalam upaya pengesahan UU Cipta Kerja dari semua proses dan dinamikanya. Sehari setelah pengesahan UU Cipta Kerja, Bang Johnny kemudian menggelar konferensi pers pada Selasa, 6 Oktober 2020 tentang "Kontribusi Legislasi Cipta Kerja Sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran terhadap Transformasi Digital, Penciptaan Lapangan Pekerjaan Baru dan Pertumbuhan Ekonomi Digital".*

Legislasi yang terkait dengan sektor Kominfo, dalam hal ini Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, dinilai



Setahun Kepemimpinan Bang Johnny: Bekerja dan Seterusnya...

relevan sesuai arahan Presiden Jokowi tentang percepatan transformasi digital. Untuk mempercepat transformasi digital, secara tidak langsung mendorong lahirnya penciptaan lapangan pekerjaan baru di sektor Kominfo. Dalam beberapa tahun terakhir, minat dan keinginan generasi muda untuk berprofesi di bidang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) terus meningkat.

Mengutip kompas.com, 7 dari 10 profesi paling bersinar pada 2022 membutuhkan kemampuan di bidang TI (Teknologi Informasi). Adapun 7 profesi itu yakni *Data Analyst and Data Scientist, AI and Machine Learning Specialists, Software and Application Developer Analyst, Big Data Specialist, Digital Transformation Specialist, serta New Technology Specialist dan Information Technology Service.* (Sumber: Kompas.com. 7 Dari 10 Profesi Paling Bersinar 2022 Butuh "Skill" dari Jurusan Ini. Dipublikasikan pada 11 Februari 2020).

Jika membaca 7 peluang profesi TIK tersebut, lahirnya legislasi Cipta Kerja di sektor Kominfo tentu membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi talenta muda Indonesia untuk menampilkan *skill* dan ikut berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Legislati itu menjawab bagaimana mempermudah mereka yang ingin mencari lapangan pekerjaan di sektor telekomunikasi, pos dan penyiaran dan bahkan juga pada semua sektor yang membutuhkan kemampuan TIK. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mengambil peran tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga fasilitator dan akselerator dengan menghadirkan program *Digital Talent Scholarship* (DTS).

Program DTS menjawab 7 profesi di bidang TIK, dengan skema pelatihan dimulai dari tingkatan *basic*, *intermediate* hingga *advance*. Membaca peluang ini, Bang Johnny menilai DTS sebagai program strategis dan sarat akan kebutuhan percepatan transformasi digital, yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyiapkan talenta digital Indonesia untuk bisa bersaing dengan generasi bangsa lain. Mungkin saat ini belum kita rasakan, tapi bisa saja beberapa tahun ke depan talenta Indonesia berani tampil di kancah global dengan pengalaman dan kemampuan yang mumpuni.

Kementerian Kominfo pun menjadi *leading sector* upaya pemerintah bersama legislatif mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Komitmen itu diwujudkan dalam satu tahun kepemimpinan Bang Johnny untuk memastikan pelindungan terhadap data pribadi warga negara. Memperkuat regulasi PDP merupakan kebijakan prima pada saat Bang Johnny memulai ikhtiarnya di Kementerian Kominfo. Hal itu pun disampaikan saat serah terima jabatan dari Menteri Kominfo periode 2014-2019 Rudiantara. Baik Chief RA maupun Bang Johnny, keduanya sepakat menuntaskan regulasi khususnya RUU PDP.

"Yang pertama pasti payung hukum. Saya tentu akan mengajak rekan-rekan di parlemen untuk segera

mengkonsolidasikan secara politik di parlemen agar itu bisa dipercepat". Demikian komitmen awal Bang Johnny tepat di tanggal 23 Oktober 2019 usai pelantikan jajaran Menteri yang dilanjutkan serah terima jabatan di Kantor Pusat Kementerian Kominfo. Komitmen agar Indonesia segera memiliki payung hukum pelindungan data pribadi itu pada akhirnya menemukan titik terang.

Meskipun dihadapkan pada situasi global akibat pandemi COVID-19 yang juga dirasakan Indonesia hingga saat ini, pembahasan RUU PDP hampir memasuki finalisasi "ketuk palu". Artinya bahwa bisa jadi akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 nanti, Indonesia akan menjadi negara ke-5 di ASEAN yang mengantongi UU PDP. Pada akhirnya, kita tidak lagi risau akan data pribadi yang terancam diperjual-belikan dan dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggungjawab demi keuntungan pribadi mereka. Dengan UU PDP nanti, data pribadi kita di berbagai instansi baik negeri maupun swasta, perusahaan global maupun dalam negeri hingga platform digital sudah dapat dijamin keamanannya di mata hukum.



Dari Oktober ke Oktober

Bang Johnny telah melewati satu tahun kepemimpinannya, dari Oktober ke Oktober, sebagai Menteri Kominfo. Selalu ada cerita dan juga kabar baik bahwa Indonesia sudah siap memasuki era transformasi digital. Satu tahun pertama Bang Johnny bersama Kominfo telah berakhir dengan tahap demi tahap penuntasan beberapa program strategis. Satu tahun kepemimpinan Bang Johnny akan menjadi catatan penting, proses evaluasi secara berkala kepada seluruh ekosistem dan mitra kerja agar terus memastikan tersedianya pemerataan infrastruktur telekomunikasi di seluruh pelosok negeri, memberikan stimulus kepada generasi milenial supaya melek terhadap perkembangan teknologi digital, hingga mengasah kemampuan bercakap dan skill yang memadai sebagai ujung tombak lahirnya SDM digital Indonesia.

Satu tahun kepemimpinan Bang Johnny merupakan momentum bagi Indonesia untuk mengakselerasi tidak saja di bidang teknologi, tetapi juga SDM dan pola-pola kerja yang kolaboratif, inisiatif, sistemik dan terstruktur. Hal ini penting untuk dikembangkan mengingat Kementerian Kominfo menjadi institusi bergengsi, strategis dan berpengaruh dalam menjawab Visi Indonesia Maju. Bang Johnny kerap menyampaikan pesan itu di berbagai forum baik di internal Kominfo, mitra kerja, dan bahkan intens di berbagai media dengan konsep komunikasi publik yang secara khusus disampaikan kepada masyarakat. Satu tahun kepemimpinan Bang Johnny ditandai dengan kerja lebih keras, ikhlas berdedikasi lebih ditingkatkan, begitupun dengan kerja cerdas dalam memastikan setiap pelayanan kepada masyarakat di sektor Kominfo. Komitmen ini tidak kalah pentingnya menurut Bang Johnny untuk terus disuarakan di saat Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19.



Lebih dari 7 bulan sudah kita melewati masa sulit. Oleh karena itu, upaya bersama memutus rantai COVID-19 ini memerlukan strategi komunikasi publik yang relevan dan konsisten. Sebagai sektor yang ikut berperan penting, Bang Johnny seringkali mengarahkan seluruh ekosistem dan mitra kerja di Kementerian Kominfo untuk terus menggenjot komunikasi publik, menggelar kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi mengendalikan pandemi.

Semoga dengan upaya dan komitmen bersama itu, Indonesia dapat melewati tantangan saat ini.

Melihat Indonesia Tersenyum

Terinspirasi Sang Pemimpi, sebuah novel Mega Best Seller yang merupakan buku kedua tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirarta, Saya melihat Indonesia dari perspektif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti

dalam sebuah judul *Aku Hanya Ingin Membuatnya Tersenyum* (Mozaik 7 hlm 67 Sang Pemimpi – Andrea Hirarta).

Terlukis sebuah cerita romansa Sungai Seine yang dikenal sebagai muara air mata. Dikisahkan bahwa sebuah keluarga Melayu miskin berkebud di pulau kecil yang tidak jauh dari muara itu. Adalah Pak Belia dan keluarga kecilnya yang mencari sumber kehidupan di sungai Seine. Suatu hari dalam perjalanan pulang, perahu mereka terbalik. Dua hari



kemudian, orang melihat sosok-sosok mengambang pelan, lekat satu sama lain, mengikuti anak sungai Manggar. Sang ayah, yakni Pak Belia, dengan kedua tangannya memeluk, merengkuh dan menggenggam seluruh anggota keluarganya

Kisah Pak Belia yang menggenggam istri dan tiga anaknya dalam musibah yang dialaminya itu hanya menyisahkan Laksmi, anak tertuanya yang selamat. Singkat cerita, Laksmi yang terus tumbuh dewasa hidup dalam suasana yang sulit membuatnya tersenyum. Meskipun begitu, orang-orang terdekatnya terus berusaha mengembalikan senyum manis si gadis itu.

Saya memotret kisah itu dalam upaya menyatukan Indonesia dari perspektif pembangunan infrastruktur TIK. Kita ketahui bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia harus dihubungkan dengan pemerataan akses konektivitas digital. Sejauh ini, Kementerian Kominfo memiliki program-program antara lain akses internet gratis untuk menunjang proses belajar di sekolah maupun di kantor pelayanan publik seperti puskesmas dan kantor desa. Program lainnya adalah Palapa Ring, penyediaan Base Transceiver Station (BTS) dan Satelit Multifungsi.

Empat program yang menunjang infrastruktur TIK ini merupakan tugas besar dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo. Bersama BAKTI, Bang Johnny terus memastikan bahwa infrastruktur TIK akan menghubungkan nusantara, menjadi perekat bagi masyarakat Indonesia dengan meratanya konektivitas.

Inilah sebenarnya komitmen Bang Johnny untuk melihat Indonesia tersenyum. Melihat senyum masyarakat di pelosok negeri bisa menikmati layanan internet.

Senyum anak-anak sekolah yang belajar penuh giat lagi. Senyum sang pengabdian seperti para guru, dokter, perawat, dan ASN yang mengabdikan di desa-desa terpencil dapat melayani masyarakat yang dibantu dengan penyediaan fasilitas internet.

Semua ikhtiar itu telah dan akan dituntaskan. Dengan demikian, kita akan melihat senyum Indonesia tidak saja datang dari pusat perkotaan di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote.

**Pernyataan lengkap Menteri Johnny tentang UU Cipta Kerja Sektor Kominfo dapat diakses pada tautan berikut: https://www.kominfo.go.id/content/detail/29924/siaran-pers-no-127hmkominfo102020-tentang-uu-cipta-kerja-dukung-percepatan-transformasi-digital-dan-ciptakan-lapangan-kerja-baru-sektor-kominfo/0/siaran_pers



Kisah Lensa

Terletak di wilayah lereng pegunungan Menoreh, para siswa dan guru-guru SD Pangudi Luhur 3 Boro, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sekolah yang secara geografis berada di cekungan antara daratan tinggi tersebut menyebabkan sulitnya jangkauan internet menggunakan smartphone maupun jaringan WiFi operator seluler yang digunakan sekolah.

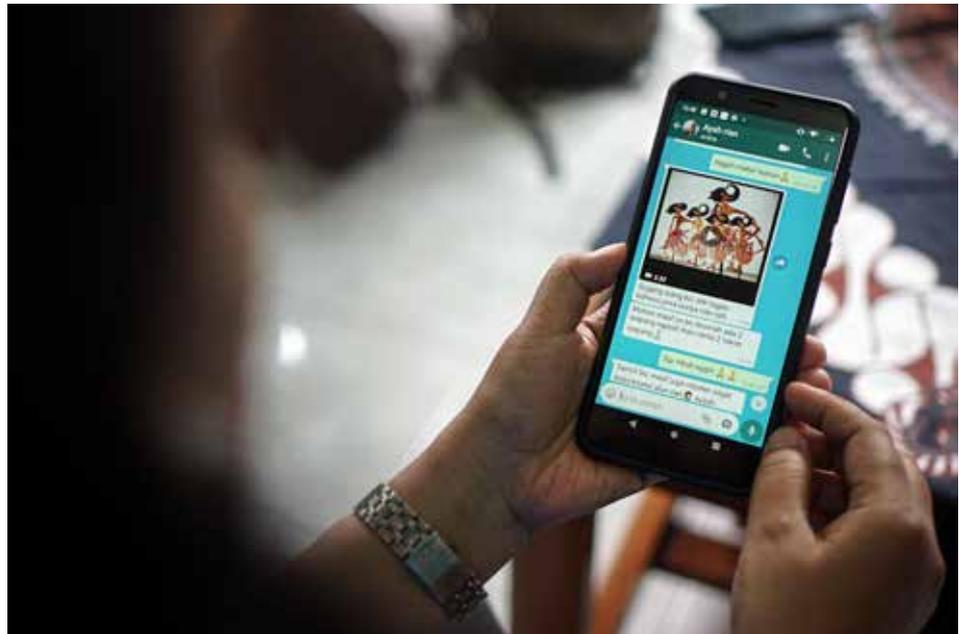


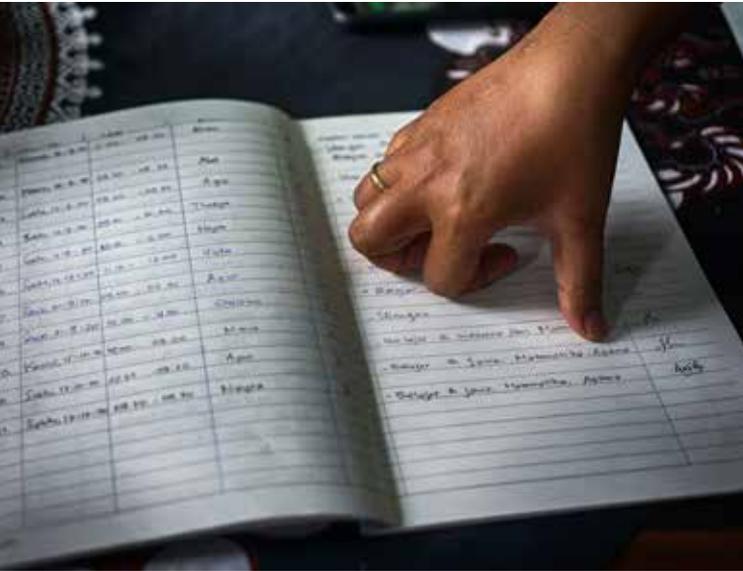




Tidak diperbolehkannya kegiatan mengajar secara tatap muka membuat pengiriman dan pengumpulan tugas siswa mengalami kesulitan disebabkan keterbatasan sinyal di lingkungan sekolah. Namun karena tuntutan untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat maupun siswa, maka selama pandemi, sekolah memutuskan melakukan kombinasi proses belajar secara daring dan luring.

Untuk proses belajar secara daring, guru dan orang tua siswa berupaya memaksimalkan aplikasi percakapan selagi masih dapat berhubungan dengan orang tua. Sedangkan untuk proses belajar secara luring, guru melakukan home visit atau kunjungan ke rumah orang tua.





Karena sekitar 30 persen dari siswa tidak memiliki *handphone*, maka harus tetap melayani dengan melakukan kunjungan ke rumah siswa seminggu sekali” ujar Kepala Sekolah merangkap guru SD Pangudi Luhur 3 Boro, Elisabeth Windarti M.Pd.

Selain satu minggu sekali orang tua atau anak bisa datang ke sekolah, guru juga satu minggu sekali berkunjung ke rumah anak. “Kami *home visit*, mengunjungi. Walaupun orang tua dan anak sudah punya HP, sudah bisa WA (WhatsApp), kami tetap berkunjung satu minggu sekali,” tambahnya.





Harapannya setelah ada bantuan akses internet dari BAKTI Kominfo, sinyal semakin stabil sehingga dapat memperlancar proses pembelajaran jarak jauh sekaligus mempermudah proses pelaporan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) kedinasan.

“Maka harapannya untuk pemasangan WiFi/pemberian internet dari Pak Menteri bisa segera terpasang, jadi kami bisa segera menggunakan itu karena kami memang membutuhkan untuk laporan kedinasan maupun memperlancar proses pembelajaran jarak jauh” ujar Elisabeth Windarti.



*Liputan
Khusus*

Gerakan Ekonomi Nasional

Bangun Infrastruktur TIK Kawasan Super Prioritas

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Kawasan Destinasi Wisata Super Prioritas menjadi fokus perhatian Pemerintah. Hal itu dimaksudkan untuk menjadi penggerak perekonomian nasional, terutama di masa dan setelah pandemi COVID-19.

“Sektor yang memiliki kemampuan dan kesempatan luas melakukan lompatan besar setelah pandemi adalah sektor komunikasi dan informatika,” jelas Menteri Kominfo ketika membuka Rapat Koordinasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Wisata Super Prioritas, di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (24/09/2020).



Wilayah Mandalika, menurut Menteri Kominfo akan menjadi *showcase* Indonesia dalam penyelenggaraan MotoGP 2021. "Stadion terbaru di Mandalika, teknologi yang terkini yang akan dibangun dan dipasang. Mandalika akan menjadi *showcase*, pintu gerbang, dan etalase Indonesia," jelasnya.

Menurut Menteri Kominfo, pembangunan infrastruktur TIK terutama di kawasan super prioritas merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2020 lalu mengenai akselerasi transformasi digital.

“Ada lima arahan Presiden Jokowi, salah satunya percepatan perluasan akses dan peningkatan pembangunan infrastruktur digital,” tuturnya.

Menurut Menteri Johnny, pembangunan infrastruktur TIK dilakukan dengan pendekatan dari hilir. “Untuk menyelesaikan deployment atau pembangunan infrastruktur TIK, kami di Kominfo melakukan analisa menyeluruh, bukan pendekatan dari hulu tapi dari hilir, di mana cakupan sinyal yang ada di wilayah administratif dan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Menteri Kominfo menyatakan dari sisi deployment saat ini infrastruktur TIK sudah 90% tersedia secara geografis di Indonesia. Namun ada kebutuhan untuk mendukung pelayanan pemerintah dan masyarakat.

“ Hasil analisa atas cakupan wilayah telekomunikasi menjadi lebih dipersempit dari 38 ribu lebih desa dan kelurahan masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum tersedia sinyal 4G

Guna mendukung percepatan transformasi digital, Menteri Johnny menegaskan infrastruktur yang tersedia selain sinyal 4G juga akses internet. “Kalau untuk transformasi digital harus tersedia sinyal 4G dan wifi akses internet,” tandasnya.

Dalam penyediaan akses telekomunikasi di 12.548 desa dan kelurahan, Menteri Kominfo menyatakan akan dibagi pengerjaannya oleh BAKTI Kominfo dan operator telekomunikasi seluler.

“Kehadiran saya hari ini memastikan kesiapan penyelesaian pembangunan infrastruktur TIK di desa yang belum ada cakupan layanan 4G,” ujarnya.

Di Nusa Tenggara Barat, menurut data BAKTI Kominfo masih terdapat 70 desa dan kelurahan yang belum 4G. Tahun 2021 ada 35 desa dan kelurahan yang kita lengkapi. Dan pada 2022 akan menyelesaikan keseluruhan di NTB agar tersedia cakupan sinyal 4G.

Secara khusus, Menteri Johnny akan memastikan Destinasi Wisata Super Prioritas termasuk Mandalika dari sisi deployment TIK dilengkapi.

“Kominfo melalui BAKTI telah membangun 6 BTS aktif saat ini dan 3 BTS yang sedang dibangun. Sehingga di akhir 2020, ada 9 BTS aktif,” tuturnya.

Di samping ada banyak BTS aktif, Menteri Kominfo mengaku telah bicara dengan Telkomsel yang menyatakan komitmen kuat untuk deployment TIK dalam mendukung MotoGP dengan baik.

“Dukungan telekomunikasi agar dapat berlangsung digitalisasi secara prima. Kami berkoordinasi untuk memastikan deployment ini penting,” ungkapnya.

Melalui pembangunan infrastruktur TIK yang baik, Menteri Johnny mengharapkan agar dapat mendorong Indonesia menjadi bangsa digital. “Mudah-mudahan itu mendorong Indonesia siap sebagai bangsa digital. Indonesia towards digital nations,” tegasnya.

Dukungan Pemda

Dalam raker itu, Menteri Kominfo meminta dukungan pemerintah daerah untuk menyediakan akses telekomunikasi jaringan 4G dan internet kecepatan tinggi.

“Saya berharap dengan dua tugas tersebut, terutama pembangunan telekomunikasi di desa karena pembangunan ini butuh lahan yang memadai, tentu dukungan pemerintah daerah, bupati, camat dan kepala desa akan tersedianya lahan di tempat yang cakupan sinyalnya optimal,” jelasnya. Menteri Johnny merinci beberapa syarat lahan yang akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan BTS dengan ukuran 20x20 meter.

“Lahan yang tersedia tidak dalam status sengketa. Selain itu terjangkau akses transportasi agar bisa memudahkan pengiriman dan dukungan lain yang memungkinkan deployment infrastruktur TIK berjalan dengan cepat,” paparnya.

Apresiasi

Menurut Menteri Kominfo hal itu harus disediakan sekaligus, karena pembangunan BTS menggunakan anggaran tahun berjalan. "Ini bukan kegiatan tahun jamak tapi tahun tunggal. Meski menggunakan *banded financing* ada APBN murni, PNBPN dan Dana USO," jelasnya.

Lantaran pembangunan menggunakan alokasi tahun tunggal, Menteri Johnny mengharapkan agar tidak terhambat masalah administrasi. "Karena tahun tunggal jangan sampai pekerjaan infrastruktur TIK terhambat masalah administratif. Saya minta agar mudah dilakukan secara cermat," tandasnya.

Pembangunan BTS menurut Menteri Kominfo memerlukan perencanaan yang cermat dan kerja sama. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengajak agar bisa mendukung agar selesai pada waktu yang ditetapkan. "Mari kita berkoordinasi bersama dan saling mendukung agar bisa selesai pada waktu yang ditetapkan. Saya minta agar operator seluler Telkomsel dan BAKTI untuk memastikan Mandalika menjadi yang utama dan prioritas *super of the super* prioritas," ungkapnya.

Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif menyatakan saat ini jumlah akses internet on air yang dibangun di Provinsi NTB sudah mencapai 473 titik lokasi. Jumlah itu merupakan 6,18% dari seluruh akses internet yang dibangun oleh BAKTI secara nasional.

"Dan merupakan angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan persentase daerah lainnya. Kategori terbanyak penempatan akses internet BAKTI Kominfo di NTB adalah di lokasi-lokasi pendidikan (52,64%), disusul oleh kantor pemerintahan (28,12%), pelayanan kesehatan (8,67%), pusat kegiatan masyarakat (7,40%), lokasi wisata (1,48%), dan sisanya tersebar di lokasi publik, layanan usaha, dan pertahanan keamanan," rincinya.

Menurut Direktur Anang Latif, hal yang dibutuhkan dari pemerintah daerah selain perizinan adalah kepastian penyediaan lahan yang pasti. "Karena pengalaman kami, semoga tidak terjadi ke depan, perangkat untuk membangun tower itu dibawa dari Jawa seberat 6 ton. Jika lokasinya diubah maka akan sulit bagi kami mengalihkannya, akhirnya layanan operator jadi tertunda," ungkapnya.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengapresiasi upaya Menteri Kominfo menghadirkan akses telekomunikasi dan internet di daerahnya. Menurutnya, saat ini layanan telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat NTB.

"Apalagi, menurutnya tahun depan Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk perhelatan internasional Kejuaraan MotoGP 2021," tuturnya.

Kementerian Kominfo diharapkan dapat mendorong operator seluler untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur TIK. "Mudah-mudahan bisa mendorong Telkomsel dan Telkom dan operator yang lain untuk menyediakan layanan telekomunikasi di NTB. Agar bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk perhelatan internasional," jelasnya.

*Liputan
Khusus*

Subsidi Kuota Data Internet

**Solusi Atasi Kendala
Pembelajaran Jarak
Jauh**

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan kuota data internet tahun 2020 kepada guru, siswa, mahasiswa, dan dosen yang menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa pandemi selama empat bulan senilai Rp 7.2 triliun.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menjelaskan bahwa salah satu kendala yang dihadapi selama PJJ ini adalah keterbatasan ketersediaan paket data internet. Sehingga Kemendikbud beserta pemangku kepentingan lainnya memberikan bantuan subsidi kuota internet.



Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi Kemendikbud dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Saya bersyukur atas kerja sama dan koordinasi yang baik lintas kementerian dan lembaga sehingga kebijakan bantuan kuota data internet dapat terealisasi. Seluruh penerima manfaat yakni peserta siswa, guru, mahasiswa, dan dosen akan mendapatkan kuota internet sesuai yang diperlukan selama empat bulan ke depan,” jelas Mendikbud secara virtual saat Peresmian Kebijakan Bantuan Kuota Data Internet, Jumat (25/09/2020).

Peresmian secara virtual ini turut disaksikan juga oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Badan Usaha Milik

Negara Erick Thohir, dan para Direksi operator seluler yang ada di Indonesia yakni Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, AXIS, 3 (Tri), dan Smartfren.

Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan dukungan penuh pelaksanaan kebijakan Bantuan Kuota Data Internet tahun 2020. Kebijakan itu merupakan asistensi fiskal APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) yang diberikan untuk menopang pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa, pendidik dan dosen di Indonesia. Kementerian Kominfo membangun akses internet cepat dan mengajak mitra operator seluler meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan untuk mencerdaskan bangsa.

“Tentu keberhasilan ini tidak terlepas dari keberpihakan Bapak Presiden untuk memastikan para siswa kita, pendidik dan para dosen bisa mengatasi problem yang paling besar saat ini yaitu ketersediaan pembiayaan untuk akses internet dalam rangka menunjang proses belajar dan mengajar,” tutur Menteri Johnny.



Sumber Foto : Antara Foto

Menteri Kominfo menilai kebijakan asistensi fiskal akan sangat bermanfaat bagi lebih dari 60 juta siswa pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pendidikan khusus lembaga keagamaan di bawah Kementerian Agama seperti pesantren.

Di tempat terpisah Menteri BUMN Erick Thohir menilai positif kebijakan ini karena negara hadir untuk rakyat, bekerja baik untuk rakyat, dan bekerja 24 jam untuk rakyat.

“Program kerja kami dari awal tidak pernah berubah. Indonesia sehat, Indonesia bekerja, Indonesia tumbuh adalah tiga strategi yang dijalankan secara baik. Kebijakan bantuan kuota data internet menjadi bagian dari Indonesia tetap kerja,” jelas Menteri BUMN.

Jenis dan Mekanisme Pemberian Bantuan Kuota Data Internet

Bantuan kuota data internet yang diberikan pemerintah terdiri dari dua jenis, yakni kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi, sedangkan kuota belajar hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran dengan daftar yang tercantum pada <http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/>. Sedangkan untuk alokasi kuota yang diberikan adalah sebagai berikut untuk peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 20 GB/bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 35 GB/bulan, pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah 42 GB/bulan, serta untuk mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan. Seluruhnya mendapatkan kuota umum sebesar 5 GB/bulan, sisanya adalah untuk kuota belajar.

Mekanisme pemberian bantuan kuota data internet diawali dengan pendataan dan verifikasi nomor ponsel. Kedua, Kemdikbud melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler. Ketiga, penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Dan terakhir, pemutakhiran nomor ponsel.

Pada bulan pertama, akan diberikan dalam dua tahap yaitu pada 22 – 24 September 2020, dan 28 – 30 September 2020. Bulan kedua juga dilakukan dua tahap yaitu pada 22 – 24 Oktober 2020 dan 28 – 30 Oktober 2020. Kuota berlaku 30 hari terhitung sejak diterima oleh nomor ponsel. Sedangkan untuk bulan ketiga dan keempat, tahap I diberikan pada 22-24 November dan tahap II pada 28-30 November 2020 yang berlaku selama 75 hari sejak diterima nomor ponsel pendidik dan peserta didik.

Bantuan Kuota Data Internet 2020

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rincian Bantuan

<p>Peserta Didik Jenjang PAUD</p> <p>20 GB / bulan</p> <p>5 GB Kuota Umum 15 GB Kuota Belajar 4 Bulan Durasi Bantuan</p>	<p>Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <p>35 GB / bulan</p> <p>5 GB Kuota Umum 30 GB Kuota Belajar 4 Bulan Durasi Bantuan</p>	<p>Pendidik Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <p>42 GB / bulan</p> <p>5 GB Kuota Umum 37 GB Kuota Belajar 4 Bulan Durasi Bantuan</p>	<p>Dosen dan Mahasiswa</p> <p>50 GB / bulan</p> <p>5 GB Kuota Umum 45 GB Kuota Belajar 4 Bulan Durasi Bantuan</p>
--	---	---	---

<https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/>

Dukungan Kementerian Kominfo

Kementerian Kominfo seperti yang disampaikan oleh Menteri Johnny akan terus berupaya memastikan semua operator seluler mampu menjaga kualitas jaringannya dengan baik juga akan memperhatikan kecepatan serta perluasan jaringan akses internet. Hal itu dilakukan dengan membangun *Base Transceiver Station* (BTS) di *last mile* yang membutuhkan pekerjaan sangat kompleks karena tantangan wilayah. Selain itu, juga menyediakan akses internet Super Wifi.

“Saat ini Kementerian Kominfo juga menggunakan akses internet yang langsung ke satelit, baik berupa akses internet yang biasa dilakukan untuk radius terbatas sekitar 50 sampai 100 meter. Dan kali ini untuk pertama kalinya kita melakukan uji coba dan *pilot project* yang disebut dengan *Super Wifi*, yang memiliki jangkauan akses internet dalam radius 500 meter dengan kapasitas kecepatan antara 4 s.d. 30 GBps. Ini cukup besar untuk mendukung proses belajar mengajar,” jelasnya.

Menteri Kominfo juga sudah menyiapkan *roadmap* untuk *deployment 4G network* di 12.548 desa dan kelurahan yang saat ini belum ada sinyal 4G paling lambat selesai di tahun 2022. Hal itu ditujukan untuk menyediakan akses di seluruh titik layanan publik baik di

pemerintahan desa, puskesmas maupun sekolah agar bisa menggunakan jaringan internet 4G.

“Untuk tahun 2021 Pemerintah sudah memberikan komitmen melalui intervensi fiskal. Kemarin saya baru saja selesai melakukan Rapat Kerja dengan Komisi I untuk disetujui pembangunan tahap pertama sebanyak 4.200 titik di 4.200 desa di Indonesia untuk 4G,” jelasnya

Menkominfo juga menyampaikan terima kasih kepada operator seluler Telkomsel, Indosat Ooredoo, Tri, XL Axiata, Smartfren yang telah memberikan dukungan dan peran aktif memastikan terselenggaranya kebijakan Bantuan Kuota Data Internet tahun 2020.

“Kita perlu sama-sama tahu, saya diinformasikan bahwa Rp.1000 GB adalah harga yang betul-betul sangat kompetitif yang diberikan oleh operator seluler. Sepengetahuan saya itu diskonnya sekitar 2/3. Dan atas kerja sama operator seluler untuk memberikan dukungan proses belajar mengajar PJJ ini, saya tentu berterima kasih dan mudah-mudahan keputusan baik ini akan diberikan imbalan melalui usaha-usaha yang lebih maju dan lebih hebat,” ungkapnya.



*Liputan
Khusus*

Kominfo Apresiasi

Kenaikan Nilai Indeks Kebebasan Pers

Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 memberikan jaminan kepada Pers Indonesia untuk menjalankan fungsinya sekaligus sebagai bentuk jaminan atas kebebasan pers sebagai salah satu pilar hak asasi manusia dan demokrasi.

"Melalui Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers mendapatkan jaminan dari praktek pencegahan, pelarangan atau penekanan dari pihak lain terhadap insan pers dalam memproduksi informasi. Praktik kebebasan pers nasional saat ini kiranya juga sudah berada pada jalur yang benar," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti dalam Seminar Daring *Media Relations: Aduan Perilaku dan Kinerja Pers*, Jakarta, Kamis (08/10/2020).

Mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Sekjen Niken mengutip hasil penelitian terbaru dari Dewan Pers mengenai Indeks Kebebasan Pers di Indonesia. Menurutnya kebebasan pers cenderung naik dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2019 sampai 2020, indeks kebebasan pers nasional masuk dalam kategori cukup bebas dengan skor 75,27 poin atau naik 1,56 poin dibanding tahun sebelumnya.

“Sebelumnya, pada tahun 2017 dan tahun 2018, nilai indeks kebebasan pers masih berada pada kategori agak bebas. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 nilai indeks kebebasan naik ke kategori cukup bebas,” jelasnya.



Sumber Foto : Unsplash

Enam Faktor Utama

Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan indeks kebebasan pers nasional meningkat akibat enam faktor utama, yakni adanya pendidikan insan pers, kesetaraan akses bagi kelompok rentan, kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, lembaga penyiaran publik, kepastian hukum lembaga peradilan serta kebebasan dalam mempraktekkan jurnalisisme yang sejati.

Adapun enam faktor tersebut berjalan semestinya dengan fakta bahwa perbaikan yang terjadi secara konsisten dalam dua periode Presiden Joko Widodo yang teguh memegang amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Terutama atas pasal 2 yang berbunyi kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supermasi hukum,” ujarnya.

Sekjen Niken menjelaskan perbaikan yang terus-menerus dari indeks tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah telah berusaha keras berlaku objektif kepada seluruh insan dan institusi pers.

“

Pers dirangkul sebagai mitra penting dalam membangun demokrasi dengan cara tetap memberikan ruang untuk kritis. Oleh sebab itu, selayaknya pers juga bertimbal balik untuk terus mengembangkan objektivitas dalam melihat subjek-subjek pemberitaan mereka, termasuk pemerintahan, mengangkat berita-berita yang seimbang dan mengutamakan akurasi serta sumber berita yang terpercaya.

Fungsi Pengawasan

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Pemerintah mau tidak mau menjadi salah satu subjek pemberitaan terbanyak bagi pers. Sebagai pelayan masyarakat, ia menyatakan pemerintah memang sudah selayaknya disoroti dan diawasi secara terus menerus oleh media.

“Apalagi kita sebagai negara yang telah bereformasi dan masih terus berjuang mewujudkan tata pemerintahan yang bebas korupsi dan kolusi,” tegasnya.

Kementerian Kominfo, menurut Sekjen Niken menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pers Indonesia yang menjalankan peran sebagai mata

rakyat dan mengawal birokrasi pemerintahan selama ini.

Namun demikian, Sekjen Kementerian Kominfo mengingatkan, meskipun pers memiliki hak istimewa dalam peliputan dan pemberitaan, tentunya juga memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi terhadap keberlangsungan negara dan bangsa dibandingkan sekadar mengikuti gaya pemberitaan yang bebas.

“Pers harus benar-benar menyakini fakta yang disampaikan dengan mekanisme *check and recheck*. Setelah itu pun pers harus tetap memberi ruang untuk subjek berita, memberikan bantahan atau hak jawab jika dirasa tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekjen Niken menyatakan sebagaimana pers diberi ruang untuk menggali informasi tanpa tekanan, subjek pemberitaan juga mendapatkan kesempatan untuk memberi pernyataan yang cukup dan tanpa tekanan.

“Mereka (subjek pemberitaan) juga memiliki hak memberikan sanggahan atau jawaban jika merasa tidak dikutip atau disampaikan dengan semestinya. Dalam mekanisme jurnalistik yang baik, subjek berita bukan kotak kosong yang tidak bisa memberi pernyataan, argumen atau hak jawab,” imbuhnya

Keterampilan Petugas Humas

Guna mewujudkan relasi yangimbang, Sekjen Kementerian Kominfo mendorong pemerintah atau birokrasi untuk memiliki pemahaman tentang mekanisme dunia pers yang memadai. “Selain harus semakin pintar mengemas informasi dalam metode kehumasan yang baik, aparat birokrasi juga harus sadar akan hak hukum dalam konteks dunia jurnalisisme,” tuturnya.

Menurut Sekjen Kominfo pemahaman akan mekanisme dalam menyampaikan hak jawab adalah pengetahuan dasar sekaligus seni yang sangat bermanfaat. Sebab, alangkah sia-sia jika program-program dan capaian pemerintah terekspos secara negatif hanya karena pengemasan informasi yang buruk, ditambah dengan pasif dan tidak memanfaatkan hak jawab yang disediakan.

“Oleh sebab itu, saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan webinar yang berkaitan dengan mekanisme aduan dan hak jawab ini. Belum semua

aparatur sipil negara atau ASN baik dari tingkat pemerintah pusat sampai pemerintah daerah mengerti dan memahami bagaimana mekanisme penyelesaian permasalahan dengan pers,” ujarnya.

Keterampilan yang demikian menurut Sekjen Kementerian Kominfo, seharusnya menjadi wajib bagi tenaga kehumasan di institusi pemerintah agar bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik.

“Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Dewan Pers dan para jurnalis senior yang telah berkenan menjadi narasumber *workshop* kali ini. Saya berharap dengan webinar ini para peserta dan teman-teman dari Kehumasan dapat semakin profesional dalam menjalankan fungsi sebagai *media relation* dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap permasalahan terkait dengan pers dan pemberitaan jurnalistik,” imbuhnya.

Jaga Kredibilitas

Ketua Dewan Pers M. Nuh dalam kesempatan itu mengatakan, kredibilitas informasi menjadi sangat penting. Menurutnya, pihak manapun tidak ingin untuk tidak dikritik dan menyebarkan hoaks. Oleh karena itu, sebuah informasi yang disajikan juga harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Untuk mempertanggungjawabkan kredibilitas itu ada dua mekanisme atau dua cara yang kita jaga, yaitu kemerdekaan pers di satu sisi dan *check balances* di sisi yang lain. Nah, Dewan Pers berada di tengah-tengah itu yaitu intinya menjaga kredibilitas informasi,” ujarnya.

M. Nuh menyatakan wilayah kerja kehumasan memiliki fungsi dua kaki baik di kementerian dan lembaga atau pemerintah daerah maupun di ranah publik. Sehingga humas sebagai jembatan diantara dua fungsi tersebut.

“Oleh karena itu, sebagai orang humas harus menguasai substansi materi apa yang akan disampaikan, tidak boleh hanya bergerak di wilayah

acting tetapi juga *action*, kita tidak inginkan itu. Tetapi yang kita inginkan itu substansinya benar dan *how to communicate* ini menjadi penting,” jelasnya

Selain itu, Ketua Dewan Pers menilai humas harus memiliki literasi digital yang memadai. Tanpa itu dianggap terlambat dalam mengadopsi literasi digital, “Dan *Alhamdulillah* Kominfo saya kira terus menerus untuk meningkatkan digital literasi, tidak hanya di Kominfo sendiri tapi di seluruh negeri yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Seminar Daring *Media Relations: Aduan Perilaku dan Kinerja Pers* juga dihadiri oleh Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Agus Sudibyo, Tenaga Ahli Dewan Pers Herutjahjo Soewardojo. Acara seminar yang dimoderatori Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu itu diikuti oleh petugas kehumasan kementerian dan lembaga yang hadir secara virtual.

The image shows a Zoom meeting interface for a seminar. At the top, it says "Live at Zoom" and "Live at Youtube Kemkominfo TV". The main title is "Seminar Daring Media Relations". Below the title, there are two series of events:

- Seri I:** Aduan Perilaku dan Kinerja Pers, Kamis, 8 Oktober 2020 | 13.00 WIB. Registrasi SERI I: <https://kominfo/regMR1>
- Seri II:** Workshop Pembuatan Hak Jawab, Jumat, 9 Oktober 2020 | 13.00 WIB. Registrasi SERI II: <https://kominfo/regMR2>

At the bottom left, there is a "GRATIS E-CERTIFICATE" badge and contact information: "Narahubung Melita (0811-56-3344)".

On the right side, there is a "KEYNOTE SPEAKER" section with three speakers:

- Johnny G. Plate:** Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Mohammad Nuh:** Ketua Dewan Pers
- Hendry Chairuddin Bangun:** Wakil Ketua Dewan Pers

Below the keynote speakers, there is a "PEMBICARA" section with two speakers:

- Agus Sudibyo:** Ketua Komial Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers
- Herutjahjo Soewardojo:** Tenaga Ahli Dewan Pers

At the bottom right, there is a "MODERATOR" section with one speaker:

- Ferdinandus Setu:** Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo RI

At the bottom of the interface, there are social media icons for Twitter, Facebook, and Instagram, along with the handles "@kemkominfo" and "Kemkominfo TV".

Pelantikan Widyaiswara



Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional sebagai Widyaiswara Utama kepada Rosarita Niken Widiastuti dan Basuki Yusuf Iskandar oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.



Menteri Kominfo
Johnny G. Plate berfoto
bersama Pejabat
Fungsional Rosarita
Niken Widiastuti dan
Basuki Yusuf Iskandar
usai pelantikan.



Di Balik Kesuksesan Kabupaten Sitaro Raih Zero COVID-19

Sumber: <https://covid19.go.id/p/berita/dibalik-kesuksesan-kabupaten-sitaro-raih-zero-covid-19>



Graha BNPB, Jakarta – Penegakan protokol kesehatan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemuka adat, dan tokoh agama menjadi kunci Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dalam menekan COVID-19. Sejak Maret hingga Mei, kabupaten yang terletak di Sulawesi Utara ini menuai prestasi sebagai daerah dengan "Zero COVID-19".

Dalam talkshow "Zero COVID-19: Penerima Penghargaan BNPB" di Media Center Satgas COVID-19 Graha BNPB Jakarta, Kamis (15/10/2020), Bupati Kepulauan Sitaro Evangelian Sasingen mengatakan torehan itu yang membuat Sitaro menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan tinggi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada hari Selasa (13/10) lalu.

Bupati Eva, panggilan akrab Evangelian Sasingen, mengatakan sebelum pemerintah mengumumkan secara resmi COVID-19, dirinya sudah menginformasikan kepada seluruh warga di sana untuk memperketat pengawasan di sepuluh pintu masuk pulau.

"Di setiap pintu ada pemeriksaan ketat. Awal-awal kami tidak menggunakan pelindung karena belum ada APD. Kami gunakan jas hujan sebagai pengganti," ujar Bupati Eva, 52 tahun, yang punya hubungan dekat dengan warganya.

Bupati Eva menjelaskan kasus COVID-19 sempat muncul di akhir Mei dan Juni dari satu klaster pasar. Saat itu, dirinya memutuskan menutup pasar untuk dilakukan sterilisasi. Untuk pasien positif langsung di-tracing sampai satu kelurahan. Begitu hasilnya reaktif mereka langsung ditampung di rumah singgah.

Selain membangun rumah singgah, Bupati Eva menambahkan pihaknya membentuk tim Gugus Tugas dari tingkat kecamatan, kelurahan, desa, sampai kampung. Tim gugus tugas ini memantu seluruh tamu yang masuk secara ketat dan dipantau sebelum beraktivitas di wilayahnya.

"Kami bangun rumah singgah di kabupaten, kecamatan, hingga desa semua ada. Setiap orang masuk harus diisolasi 2 minggu sebelum ke tempat tujuan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, tokoh adat Kabupaten Kepulauan Sitaro, Erland Jaya Salindeho mengatakan, kerja sama masyarakat, budaya, dan pemerintah daerah sangat maksimal. Hanya saja tantangan yang dihadapi adalah sumber daya manusia di kampung-kampung terpencil. Namun semua itu teratasi dengan membentuk lembaga adat.

"Pembentukan lembaga adat itu memberi hasil positif untuk mengedukasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan bencana alam," ungkap Bupati Eva yang mendedikasikan penghargaan tinggi dari BNPB ini untuk seluruh warga Kepulauan Sitaro yang sudah bekerja sama dengan baik selama ini. (STPC19/AHM/YOY)

Menuju Akselerasi Transformasi Digital Indonesia,

Kominfo Terus Gencarkan Peningkatan Kemampuan Talenta Digital

Dalam mencapai tujuan akselerasi transformasi digital, Kementerian Kominfo juga terus menggalakkan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang digital agar semakin unggul. Upaya ini terus digaungkan melalui berbagai program yang ditawarkan salah satunya melalui program Digital Talent Scholarship 2020 untuk mengikis kesenjangan keahlian digital di Indonesia.

Meski digelar secara daring, program Digital Talent Scholarship menawarkan berbagai kesempatan bagi talenta yang ingin mengembangkan kemampuan *hard skill* maupun *soft skill*. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo R. Niken Widiastuti bahwa industri digital ini membutuhkan *soft skill* dan biasa disebut dengan *Century Skills*. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Virtual NGORBIT (Ngobrol Bareng Digital Talent Scholarship) 2020 yang ditujukan bagi para peserta berbagai akademi di DTS 2020, Selasa (6/10/2020).

“Saya pun menyebutnya sebagai 4C, yaitu *Critical Thinking*, *Creativity*, *Collaboration*, serta *Communication*. Kombinasi dari kecakapan-kecakapan inilah yang paling dibutuhkan untuk akselerasi transformasi digital menuju *digital society* di Indonesia,” tandas Sekjen Niken yang memberikan sambutan mewakili Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam acara NGORBIT 2020 di Ruang Anantakupa, Jakarta (6/10/2020).

Senada dengan Sekjen Niken, Kepala Badan Litbang SDM Kominfo Basuki Yusuf Iskandar mengatakan bahwa ada peningkatan beberapa *soft skill* yang disebutkan dan ditargetkan dapat diraih oleh para peserta DTS 2020 ini. “Kami dari Kementerian Kominfo akan memberikan 3 hal, yaitu memberikan fasilitas, memberikan bagaimana *personal branding*, dan melatih kemampuan dalam Bahasa Inggris,” tambah Basuki dalam *talkshow* bersama perwakilan mitra pelatihan maupun mitra perguruan tinggi.

Kegiatan virtual yang dibuka dengan tarian khas Nusa Tenggara Timur *Naikonos Larik* ini disiarkan langsung melalui aplikasi Zoom dan Youtube Digital Talent Scholarship. Acara ini juga digelar untuk memberikan pembekalan kepada peserta DTS 2020 dalam 4 akademi yang di tengah kondisi pandemi harus menjalani pelatihan secara daring.



RAPAT
KUPA

Empat Akademi DTS 2020

1

Fresh Graduate Academy, yang merupakan program pelatihan yang ditujukan bagi lulusan S1, D3, dan D4 bidang TIK, MIPA, dan Teknik; yang dilaksanakan bersama 5 perguruan tinggi; dan bekerjasama dengan 5 Global Technology Company dengan tema pelatihan yang dibuka seperti *Core System Administration, Java Programming, Database Design and Programming with SQL, Cloud Computing, Data Science*.

2

Vocational School Graduate Academy, yang merupakan program pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi lulusan SMK dan D3/D4 Bidang Teknik dan Manajemen Informatika, Komputer, Jaringan, Elektro, Mekatronika, Rekayasa Perangkat Lunak, Telekomunikasi, Desain Grafis, Desain Komunikasi Visual, dan Animasi; yang diselenggarakan bersama 35 perguruan tinggi dengan tema pelatihan yang dibuka yaitu *Network Administrator, Mobile Programmer, Web Developer, Graphic Designer, Motion Graphic Artist, Multimedia Designer, Drive Tester*.

3

Thematic Academy, yang merupakan pelatihan multisektor dengan pendekatan multidisiplin. Tema pelatihan yang dibuka dalam pelatihan TA yaitu : IT untuk Perbankan, *Digital Marketing, Big Data for Social Science, dan IT Project Management* dan Pelatihan TI untuk Buruh Migran. Terdapat kesempatan pemagangan di tema pelatihan IT untuk Perbankan.

4

Regional Development Academy, pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah di 122 kabupaten prioritas pembangunan dan 7 kawasan prioritas wisata; Tema-tema pelatihan dibuka dalam pelatihan RDA yaitu : *Big Data Analytics, Analisis Media Sosial, Junior Network Administrator, Junior Graphic Designer dan Smart City*.



Dalam *talkshow* NGORBIT 2020 juga menghadirkan CEO Dicoding Narenda Wicaksono yang menjadi mitra pelatihan Online Academy dan juga merupakan pakar IT. Ia menyebutkan bahwa Digital Talent Scholarship ini perlu diikuti masyarakat Indonesia karena sangat penting untuk meningkatkan kemampuan, mengasah skill yang sudah dimiliki juga tak kalah pentingnya. Semua hal ini Narenda sebutkan bisa didapatkan dari pelatihan DTS 2020.

“Untuk teman-teman yang tidak memiliki *background* IT untuk menjadi talenta digital, sebenarnya ini kesempatan terbuka dan *reskilling* adalah salah satu cara. Jangan sampe gap tersebut diisi oleh SDM luar,” kata CEO Dicoding Narenda.

Dalam kesempatan ini, CEO Dicoding Narenda memberikan semangat kepada para peserta DTS 2020 yang hadir secara virtual karena banyak yang masih mengeluhkan kendala mengembangkan karir dan pengetahuan karena tidak sesuai dengan bidang akademis para peserta. Namun, dengan semangat Narenda menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan bidang IT seharusnya bukan menjadi penghalang.

“Jangan jadikan *background non-it* menjadi *stuck*. Justru dengan DTS ini kita dapat sertifikat bisa digunakan untuk melamar kerja sehingga tidak kalah dengan yang memang pendidikannya bidang IT,” jelas Narenda.

Dalam *talkshow* NGORBIT ini menghadirkan beberapa narasumber dari perwakilan dari setiap akademi seperti perwakilan dari *Fresh Graduate Academy* yaitu Dekan Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana, Hery Leo Sianturi, perwakilan dari *Vocational School Graduate Academy* yaitu Wakil Direktur IV Bidang Kerjasama Politeknik Negeri Jakarta, Iwan Supriyadi. Terakhir, juga menghadirkan perwakilan mitra *Thematic Academy* yaitu Y.B. Hariantono selaku Direktur IT dan Operasi Bank Negara Indonesia.

Acara yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam ini juga diisi dengan berbagai kegiatan hiburan seperti sesi *live music* maupun *live quiz* yang membagikan hadiah-hadiah menarik bagi para peserta seperti *smartphone*, *smart watch*, hingga uang elektronik ratusan ribu rupiah bagi masing-masing peserta yang beruntung.

Bareng DTS

er 2020

Digital

er 2020

kominfo

DT



DIGITAL TALENT SCOUTING

BIDANG KOMINFO

Strategis Kementerian pengembangan SDM, fokuskan pada program untuk mencapai 4 sasaran

an di bidang Kominfo, g dan upskilling) akrobat

Jan

Talkshow
NGORBIT
Ngobrol Digital Bareng DTS

Selasa, 8 Oktober 2020
#MakinJagoDigital

DIGITAL TALENT SCOUTING

Pada Acara
PERTA PELATIHAN
SOLARSHIP 2020
a, 6 Oktober 2020

Talkshow
NGORBIT
Ngobrol Digital Bareng DTS

Selasa, 8 Oktober 2020
#MakinJagoDigital



IoT Makers Creation 2020, Ciptakan Inovasi dan Solusi di Tengah Pandemi

Pandemi COVID-19 tidak menghalangi gelaran kegiatan tahunan *Internet of Things (IoT) Makers Creation*. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo bersama dengan Asosiasi IoT Indonesia (ASIOTI) dan ekosistem telekomunikasi di Indonesia. Berbagai inovasi dan karya yang dikembangkan peserta *IoT Makers Creation 2020* diharapkan mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah di masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo, Ismail, mengharapkan *IOT Makers Creation* ini dapat memunculkan solusi untuk mengantisipasi perubahan struktur aktivitas dalam adaptasi kebiasaan baru dalam kehidupan ekonomi maupun sosial masyarakat Indonesia.

“Kementerian Kominfo menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang telah berusaha untuk membuat solusi di tengah segala keterbatasan yang ada, seperti diskusi tim yang harus dilakukan secara daring,” ungkapnya dalam *Webinar IoT for Resilience in The Face of Pandemics* dari Jakarta, Rabu (30/09/2020).

Senada dengan Dirjen Ismail, Chief Enterprise and SME PT XL Axiata Tbk, Feby Sallyanto juga berpendapat bahwa digitalisasi dengan IoT akan membantu efisiensi waktu dan pekerjaan karena pekerjaan akan dilakukan secara otomatis.

“Biaya yang dikeluarkan akan lebih efisien dan produksi meningkat. Dari sisi penyedia layanan, kami, XL Business Solution mendengarkan kebutuhan pengguna dan memberikan solusi dengan model bisnis yang fleksibel dan sesuai,” ujarnya.

Selain itu Feby juga mengatakan bahwa teknologi IoT di masa pandemi ini bisa dimanfaatkan dalam hal Kesehatan seperti penggunaan monitoring suhu tubuh dan untuk membantu menjaga jarak antar perorangan sesuai dengan protokol kesehatan supaya tidak terjadi penularan virus COVID-19.

Pada IoT Makers Creation 2020 ini Tim USMAN-AMIKOM dengan karya *UVC Sterilizer Lantai Masjid*

berhasil menjadi juara pertama. Sedangkan juara kedua direbut TTG Team dari Mataram dengan karya *Smart Gate CN20*. Dan juara ketiga diraih Tasik Inovasi dengan karya *Smart Ventilator*.

Ketiga pemenang *IoT Makers Creation 2020* ini dikatakan Ketua Umum Asosiasi IoT Indonesia, Teguh Prasetya mampu membuat solusi IoT yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini dan telah mengimplementasikannya di lingkungan terdekat mereka.

“Ada dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat karena pemanfaatan IoT perlu memperhatikan kondisi lokal agar mudah diadopsi dan diadaptasi dalam keseharian,” ujarnya.

USMAN (*UVC Sterilizer Lantai Masjid yang Aman*)

Tim USMAN-AMIKOM yang berhasil memenangkan juara pertama *IoT Makers Creation 2020* berasal dari Universitas AMIKOM Yogyakarta dengan beranggotakan Elik Hari Muktafin, Qolbun Salim As Shidiqi, Muhammad Ainur Rozikin, dan Bimo Ari Wibowo.

Mereka menciptakan USMAN (*UVC Sterilizer Lantai Masjid yang Aman*) yaitu robot yang berfungsi untuk mensterilkan lantai masjid dan alas sholat dengan teknologi sinar UVC yang dapat membunuh kuman, bakteri dan virus dalam hitungan detik, dan dilengkapi dengan sistem otonom yang dapat bergerak otomatis untuk mensterilkan seluruh area lantai masjid secara otomatis. Penggunaan UVC pada USMAN lebih efektif dibandingkan desinfektan karena tidak meninggalkan residu dan dapat digunakan tanpa perlu mengosongkan masjid. Dengan USMAN, ibadah menjadi aman dan nyaman.

Salah satu anggota Tim USMAN-AMIKOM, Elik Hari Muktafin menyatakan bahwa USMAN menjadi solusi menjadikan lantai masjid tetap bersih dan alat ini dapat bekerja aman sepanjang hari.

USMAN juga sudah dilengkapi dengan aplikasi *mobile* yang dapat digunakan untuk pengaturan dan pengendalian lebih lanjut oleh pengguna. Aplikasi ini juga dapat berfungsi sebagai *remote* untuk mengendalikan USMAN secara manual dan setting penjadwalan USMAN lebih mudah dan efisien. Informasi lengkap mengenai produk USMAN dapat dilihat melalui akun media sosial @usman.sterilizer.

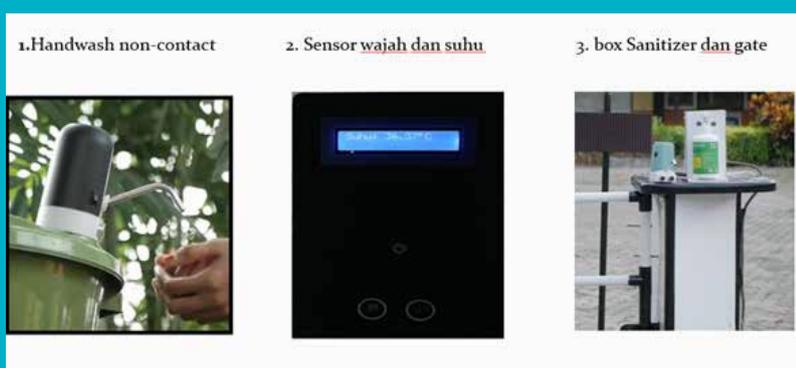


Smart Gate CN20

Juara Kedua Tim TTG menciptakan inovasi berbasis IoT yang dinamakan *Smart Gate CN20*, yaitu perangkat berupa *hand wash non-contact* dan palang pintu (*gate*) otomatis yang terintegrasi dengan sebuah perangkat IoT yang di dalamnya terdapat ESP8266, ESP32 *cam*, LCD, promini, sensor serta motor penggerak yang terhubung ke jaringan internet dengan aplikasi Instagram via android atau komputer.

Perwakilan Tim TTG Idham menjelaskan bahwa fungsi dari *Smart Gate CN20* ini sebagai protokol COVID-19 sekaligus absensi wajah. "Kami berharap alat ini memberi kemudahan bagi petugas atau guru dan dapat membantu pemerintah mengurangi penyebaran virus COVID-19," jelasnya.

Prinsip kerja *Smart Gate CN20* ini antara lain, pertama, *hand wash non-contact*, di mana siswa/pegawai membersihkan tangan dengan air menggunakan pompa elektrik *non-contact*. Kedua, deteksi wajah/masker pada jarak 50 cm. Ketiga, deteksi suhu *non-contact*, dengan jarak maksimal 5 cm, jika suhu normal maka akan muncul pesan silakan masuk namun jika suhu di atas normal maka akan muncul suara *bip* dan *gate* akan tertutup dan muncul pesan untuk menghubungi petugas. Keempat, *hand sanitizer non-contact*, kondisi ini hanya bisa dilakukan oleh siswa/pegawai yang suhunya normal. Kelima, *gate* otomatis akan terbuka setelah *hand sanitizer* diambil oleh siswa/pegawai. Selanjutnya semua informasi/data yang sudah diambil akan terkirim ke HP petugas piket melalui telegram dan absensi berbasis WEB.



Smart Gate

Smart Ventilator

Komunitas Tasik Inovasi sebagai juara ketiga *IoT Makers Creation 2020* menciptakan *Smart Ventilator*, yaitu ventilator khusus yang dirancang untuk situasi darurat (*emergency*), ekonomis, praktis – mudah untuk dioperasikan, fleksibel sehingga dapat digunakan untuk berbagai kondisi pasien baik balita, anak, remaja, dan orang dewasa.

Smart Ventilator ini dilengkapi dengan monitoring detak jantung dan kadar oksigen dalam darah pasien juga untuk monitoring aliran oksigen, dan *pressure*. *Smart Ventilator* juga





dilengkapi dengan tampilan yang *user friendly* dan mudah dipahami, serta didukung dengan aplikasi yang bisa diakses di banyak perangkat seperti PC dan Smartphone.

Salah satu perwakilan Komunitas Tasik Inovasi Teddy Apriadi mengatakan bahwa *Smart Ventilator* ini merupakan sebuah sistem berbasis IoT yang memungkinkan tenaga medis dapat melakukan pelayanan Kesehatan terpadu kepada pasien COVID-19 yang tersebar di wilayah yang luas secara online langsung dari sebuah *crisis center*.

"*Smart Ventilator* ini merupakan karya anak bangsa yang peduli dengan keadaan pandemi saat ini dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan nilai tambah pada peralatan medis yang sudah ada," ujarnya.

Sumber Berita :

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/10/kominfo-apresiasi-inovasi-dari-peserta-iot-makers-creation-2020/>

Sumber Foto : Unsplash



Apresiasi Pers Indonesia, Kominfo: Kebebasan di Jalur yang Benar

Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 memberikan jaminan kepada Pers Indonesia untuk menjalankan fungsinya sekaligus sebagai bentuk jaminan atas kebebasan pers sebagai salah satu pilar hak asasi manusia dan demokrasi.

"Melalui Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers mendapatkan jaminan dari praktek pencegahan, pelarangan atau penekanan dari pihak lain terhadap insan pers dalam memproduksi informasi. Praktik kebebasan pers nasional saat ini kiranya juga sudah berada pada jalur yang benar," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti dalam Seminar Daring Media Relations: Aduan Perilaku dan Kinerja Pers, Jakarta, Kamis (08/10/2020).

Mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Sekjen Niken mengutip hasil penelitian terbaru dari Dewan Pers mengenai Indeks Kebebasan Pers di Indonesia.

Menurutnya kebebasan pers cenderung naik dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2019 sampai 2020, indeks kebebasan pers nasional masuk dalam kategori cukup bebas dengan skor 75,27 poin atau naik 1,56 poin dibanding tahun sebelumnya.

"Sebelumnya, pada tahun 2017 dan tahun 2018, nilai indeks kebebasan pers masih berada pada kategori agak bebas. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 nilai indeks kebebasan naik ke kategori cukup bebas," jelasnya.

Enam Faktor Utama

Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan indeks kebebasan pers nasional meningkat akibat enam faktor utama, yakni adanya pendidikan insan pers, kesetaraan akses bagi kelompok rentan, kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, lembaga penyiaran publik, kepastian hukum lembaga peradilan serta kebebasan dalam mempraktekkan jurnalisme yang sejati.

PORTAL
Kominfo.go.id
SIARAN PERS

Adapun enam faktor tersebut berjalan semestinya dengan fakta bahwa perbaikan yang terjadi secara konsisten dalam dua periode Presiden Joko Widodo yang teguh memegang amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Terutama atas pasal 2 yang berbunyi kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supermasi hukum,” ujarnya.

Sekjen Niken menjelaskan perbaikan yang terus-menerus dari indeks tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah telah berusaha keras berlaku objektif kepada seluruh insan dan institusi pers.

“Pers dirangkul sebagai mitra penting dalam membangun demokrasi dengan cara tetap memberikan ruang untuk kritis. Oleh sebab itu, selayaknya pers juga bertimbal balik untuk terus mengembangkan objektivitas dalam melihat subjek-subjek pemberitaan mereka, termasuk pemerintahan,

mengangkat berita-berita yang seimbang dan mengutamakan akurasi serta sumber berita yang terpercaya,” paparnya.

Fungsi Pengawasan

Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, Pemerintah mau tidak mau menjadi salah satu subjek pemberitaan terbanyak bagi pers. Sebagai pelayan masyarakat, ia menyatakan pemerintah memang sudah selayaknya disoroti dan diawasi secara terus menerus oleh media. “Apalagi kita sebagai negara yang telah bereformasi dan masih terus berjuang mewujudkan tata pemerintahan yang bebas korupsi dan kolusi,” tegasnya.

Kementerian Kominfo, menurut Sekjen Niken menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pers Indonesia yang menjalankan peran sebagai mata rakyat dan mengawal birokrasi pemerintahan selama ini.

Namun demikian, Sekjen Kementerian Kominfo mengingatkan, meskipun pers memiliki hak istimewa dalam peliputan dan pemberitaan,

tentunya juga memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi terhadap keberlangsungan negara dan bangsa dibandingkan sekadar mengikuti gaya pemberitaan yang bebas.

“Pers harus benar-benar menyakini fakta yang disampaikan dengan mekanisme check and recheck. Setelah itu pun pers harus tetap memberi ruang untuk subjek berita, memberikan bantahan atau hak jawab jika dirasa tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekjen Niken menyatakan sebagaimana pers diberi ruang untuk menggali informasi tanpa tekanan, subjek pemberitaan juga mendapatkan kesempatan untuk memberi pernyataan yang cukup dan tanpa tekanan.

“Mereka (subjek pemberitaan) juga memiliki hak memberikan sanggahan atau jawaban jika merasa tidak dikutip atau disampaikan dengan semestinya. Dalam mekanisme jurnalistik yang baik, subjek berita bukan kotak



Sumber Foto : Unsplash | Unsolute Vision

kosong yang tidak bisa memberi pernyataan, argumen atau hak jawab," imbuhnya

Keterampilan Petugas Humas
Guna mewujudkan relasi yangimbang, Sekjen Kementerian Kominfo mendorong pemerintah atau birokrasi untuk memiliki pemahaman tentang mekanisme dunia pers yang memadai. "Selain harus semakin pintar mengemas informasi dalam metode kehumasan yang baik, aparat birokrasi juga harus sadar akan hak hukum dalam konteks dunia jurnalisme," tuturnya.

Menurut Sekjen Kominfo pemahaman akan mekanisme dalam menyampaikan hak jawab adalah pengetahuan dasar sekaligus seni yang sangat bermanfaat. Sebab, alangkah sia-sia jika program-program dan capaian pemerintah terekspos secara negatif hanya karena pengemasan informasi yang buruk, ditambah dengan pasif dan tidak memanfaatkan hak jawab yang disediakan.

"Oleh sebab itu, saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan webinar yang berkaitan dengan mekanisme aduan dan hak jawab ini. Belum semua aparat sipil negara atau ASN baik dari tingkat pemerintah pusat sampai pemerintah daerah mengerti dan memahami bagaimana mekanisme penyelesaian permasalahan dengan pers," ujarnya.

Keterampilan yang demikian menurut Sekjen Kementerian Kominfo, seharusnya menjadi wajib bagi tenaga kehumasan di institusi pemerintah agar bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik.

"Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Dewan Pers dan para jurnalis senior yang telah berkenan menjadi narasumber workshop kali ini. Saya berharap dengan webinar ini para peserta dan teman-teman dari Kehumasan dapat semakin profesional dalam menjalankan fungsi sebagai media relation dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap permasalahan terkait dengan pers dan pemberitaan jurnalistik," imbuhnya.

Jaga Kredibilitas

Ketua Dewan Pers M. Nuh dalam kesempatan itu mengatakan, kredibilitas informasi menjadi sangat penting. Menurutnya, pihak manapun tidak ingin untuk tidak dikritik dan menyebarkan hoaks. Oleh karena itu, sebuah informasi yang disajikan juga harus bisa dipertanggungjawabkan.

"Untuk mempertanggungjawabkan kredibilitas itu ada dua mekanisme atau dua are yang kita jaga, yaitu kemerdekaan pers di satu sisi dan check and balances di sisi yang lain. Nah, Dewan Pers berada di tengah-tengah itu yaitu intinya menjaga kredibilitas informasi," ujarnya.

M. Nuh menyatakan wilayah kerja kehumasan memiliki fungsi dua kaki baik di kementerian dan lembaga atau pemerintah daerah maupun di ranah publik. Sehingga humas sebagai jembatan di antara dua fungsi tersebut.

"Oleh karena itu, sebagai orang humas harus menguasai substansi materi apa yang akan disampaikan, tidak boleh hanya bergerak di wilayah acting tetapi juga action, kita tidak inginkan itu. Tetapi yang kita inginkan itu substansinya benar dan how to communicate ini menjadi penting," jelasnya.

Selain itu, Ketua Dewan Pers menilai humas harus memiliki literasi digital yang memadai. Tanpa itu dianggap terlambat dalam mengadopsi literasi digital, "Dan Alhamdulillah Kominfo saya kira terus menerus untuk meningkatkan digital literasi, tidak hanya di Kominfo sendiri tapi di seluruh negeri yang kita cintai ini," pungkasnya.

Seminar Daring Media Relations: Aduan Perilaku dan Kinerja Pers juga dihadiri oleh Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Agus Sudibyo, Tenaga Ahli Dewan Pers Herutjahjo Soewardojo. Acara seminar yang dimoderatori Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu itu diikuti oleh petugas kehumasan kementerian dan lembaga yang hadir secara virtual.



PORTAL
Kominfo.go.id
SIARAN PERS



Fasilitasi Akses Internet, Dorong Warga Desa Kembangkan BUMDes dan UMKM

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong warga desa mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam kunjungan kerja ke perbukitan Menoreh DI Yogyakarta, Menteri Kominfo juga menjelaskan peluang pengembangan investasi dalam negeri dari UMKM dan Koperasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Menteri Johnny menegaskan kawasan perbukitan menoreh merupakan daerah penopang Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur. Menteri Kominfo mengharapkan bantuan akses internet Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mendukung pengembangan ekonomi masyarakat berbasis wisata.

“Saat ini banyak kegiatan ekonomi berbasis wisata seperti desa wisata, dan homestay. Umumnya merupakan usaha kecil, mikro, dan menengah. Kekuatan ekonomi yang demikian, perlu untuk terus kita dukung dan dorong agar dapat tetap bertahan serta terus berkembang selama masa pandemi ini,” ungkap Menteri Kominfo dalam Kunjungan Kerja Dukungan Infrastruktur Telekomunikasi Wilayah Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo, Jumat (16/10/2020).

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo telah melakukan pendataan jangkauan akses jaringan telekomunikasi 4G di seluruh Indonesia. Saat ini menurutnya masih ada beberapa daerah yang belum terlayani jaringan 4G. "Sebanyak 9.130 desa di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) yang akan dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informaasi (BAKTI) Kominfo dan sisanya 3.435 desa di luar 3T dibangun operator seluler," ungkapnya.

Menteri Kominfo menegaskan jaringan 4G merupakan pondasi utama dalam transformasi digital, khususnya ekonomi digital. Oleh karena itu, pihaknya menargetkan wilayah desa yang belum terlayani sinyal 4G akan tuntas pada 2022. "Kami berharap dapat terselesaikan pada akhir 2022. Dengan demikian, lebih dari 823.000 lebih desa di Indonesia sudah atau akan terlayani sinyal 4G," ungkapnya.

Dalam kunjungan kerja itu, Menteri Johnny menyatakan akses telekomunikasi akan dapat ekonomi daerah lebih produktif. Bahkan, menurutnya, akan dapat mendorong UMKM, ekonomi mikro, komperasi dan BUMDes di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan marketplace. "UMKM dan koperasi sebagai soko guru ekonomi dan penyumbang 60 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional di Indonesia. Artinya memperkuat UMKM, memperkuat kontribusi PDB nasional Indonesia," ujarnya.

Menteri Kominfo menyatakan sektor UMKM dan Koperasi cukup kuat bertahan di berbagai kondisi. Saat ini, Menteri Johnny mendorong agar cepat bermigrasi menjadi BUMDes dan usaha digital dengan adanya fasilitasi akses internet dari Pemerintah.

"Pada masa pandemi COVID-19, sektor UMKM dan koperasi cukup kuat, dan secara bertahap bermigrasi ke UMKM digital. Sebanyak 14 persen dari 64 juta UMKM atau sekitar 9 juta pelaku UMKM sudah bisa bertransformasi menjadi usaha digital. Diharapkan setahun ke depan akan bertambah satu juta lagi menjadi 10 juta. Hal ini akan memperkuat perekonomian Indonesia," katanya.

Pembangunan akses telekomunikasi ditujukan agar mendorong masyarakat ikut mengambil bagian dalam transformasi ekonomi digital. Dengan memfasilitasi dan membantu

perkembangan UMKM dan Koperasi, Menteri Kominfo mengharapkan sektor ekonomi menjadi kuat menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

"Dan masyarakat bisa mengambil bagian dan berpartisipasi dalam transformasi struktural ekonomi nasional. Tolong buat BUM Desa yang sukses biar ada contoh bagi yang lainnya," harap Menteri Johnny.

Cipta Kerja Kembangkan UMKM dan Koperasi

Menteri Johnny mengungkap UMKM ini merupakan penyumbang lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia. Menurutnya, ratusan juta tenaga kerja diserap di sektor UMKM. Oleh karena itu, Pemerintah mengharapkan kehadiran UU Cipta Kerja akan lebih banyak lagi tenaga kerja yang terserap oleh UMKM. "Cipta kerja jadi bagian penting untuk membuka peluang investasi domestik terutama dari UMKM dan Koperasi. Insentif dan fasilitasi untuk meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi," jelasnya.

Menteri Kominfo menegaskan UU Cipta Kerja merupakan reformasi struktural di sektor perekonomian nasional. Saat ini menurutnya, sedang disiapkan peraturan pemerintah dengan elaborasi lebih detil sehingga UU Cipta Kerja dapat menjadi dasar hukum yang kuat serta dapat membuka peluang lapangan kerja di dalam negeri. "Ada peluang, ada ruang untuk investasi domestik, jangan semua investasi luar negeri atau Foreign Direct Investment (FDI). UU Cipta Kerja sangat mendorong UMKM dan Koperasi bisa berkembang. Dan memberi perlindungan bagi penanaman modal dalam negeri atau PMDN," tegasnya.

Kikis Blank Spot

Bupati Kulon Progo Sutedjo mengatakan saat ini, Pemkab Kulon Progo membangun jalur Bedah Menoreh dalam rangka menumbuhkan ekonomi dan pariwisata di wilayah utara Kulon Progo

Namun, demikian di wilayah utara banyak wilayah blank spot. Oleh karena itu, Bupati Sutedjo mengharapkan dukungan Kementerian Kominfo untuk menyediakan jaringan internet. "Internet sangat dibutuhkan di era saat ini, khususnya di pada pandemi COVID-19 ini. Jaringan internet sangat dibutuhkan untuk mempromosikan dan



menjual hasil produk masyarakat dan potensi wisata saat ini," ujarnya.

"Wilayah Bukit Menoreh banyak titik blank spot, di sisi lain kami menggalakan bedah ekonomi dan bedah wisata, serta bedah kebudayaan. Untuk itu, kami berharap Kementerian Kominfo melalui BAKTI, kembali memberikan bantuan terhadap wilayah di Kulon Progo yang masih blank spot," katanya.

Dirut Anang Latief mengatakan selain meninjau kebutuhan akses telekomunikasi, kunjungan Menteri Kominfo kali ini ialah untuk meninjau dan memetakan lebih lanjut kebutuhan akses internet di DIY. "Hingga saat ini sudah terdapat 25 titik layanan akses internet BAKTI di DI Yogyakarta yang umumnya yang digelar di

lokasi-lokasi pendidikan, kantor pemerintahan, desa wisata dan layanan publik. Kunjungan ini akan memetakan lebih lanjut kebutuhan akses internet dalam rangka mendukung destinasi wisata di kawasan ini," tuturnya.

Bantuan akses internet diberikan ke SD Pangudi Luhur Gejlik yang terletak di pedalaman dan dataran tinggi Menoreh, tepatnya di Kelurahan Banjarasri serta Pesantren Al-Falah di Kelurahan Ngargosari, Samigaluh, Kulon Progo. "Kedua lokasi tersebut kita bantu layanan akses internetnya, agar jangkauan telekomunikasi, terutama di fasilitas publik, dapat semakin dirasakan oleh masyarakat setempat," tutur Dirut BAKTI Kominfo Anang Latief.

Menteri Kominfo menyaksikan pemberian bantuan akses internet untuk Kelurahan Pagerharjo yang akan digunakan BUMDes; Lembaga Pendidikan Yayasan Pangudi Luhur di Gejlik, Kalibawang; serta Pondok Pesantren Al-Falah di Dusun Nyalian, Ngargosari. Bantuan diserahkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Subardi dan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latief. Hadir dalam acara itu Bupati Kulon Progo Sutedjo, Staf Ahli Menteri Kominfo bidang Hukum Henri Subiakto dan pejabat dari Pemprov DI Yogyakarta.



PORTAL
Kominfo.go.id
SIARAN PERS



Menkominfo: Butuh Widyaiswara Andal untuk Transformasi Digital Sektor Publik

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate melantik Rosarita Niken Widiastuti dan Basuki Yusuf Iskandar menjadi Pejabat Fungsional Widyaiswara Utama. Menurut Menteri Kominfo saat ini lembaga yang dipimpinnya membutuhkan widyaiswara andal untuk mewujudkan transformasi digital di sektor publik. Menurut Menteri Johnny, saat ini Kementerian Kominfo membutuhkan widyaiswara yang andal guna peningkatan kualitas layanan electronic government untuk memastikan transformasi digital di sektor publik berjalan dengan lancar.

"Dengan pengalaman yang telah dimiliki oleh baik Bu Niken maupun Pak Basuki, saya yakin tugas ini akan diemban dengan baik. Kita sama-sama merancang itu, apalagi Pak Basuki setiap hari urusannya digital talent, apalagi Ibu Niken setiap hari memperhatikan regulasi-regulasinya bahkan memastikan ketersediaan anggarannya, bukan hal yang baru tapi sekarang perannya yang dibutuhkan," ungkapnya dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Widyaiswara Utama di Ruang Anantakupa Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Mengutip hasil survei Electronic Development Development Indeks (EGDI) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Menteri Kominfo memberikan gambaran mengenai kesiapan transformasi digital ASN Indonesia. "Indeks ini mengukur kesiapan di tiga aspek melalui pelayanan pemerintahan daring, kualitas infrastruktur telekomunikasi serta kecakapan digital masyarakat," ungkapnya.

Pada tahun 2020 ini, angka indeks EGDI adalah setara dengan 0,6612 dari skala 1 dan membuat Indonesia berada pada peringkat 88, naik 19 tingkat yang sekarang berada di angka 0,6824 dari skala 1. Survei itu menunjukkan lebih baik dari rata-rata dunia dan rata-rata ASEAN. "Kapasitas ini tentunya perlu ditingkatkan lebih lagi bahkan hingga mencapai nilai indeks yang sempurna," harap Menteri Johnny.

Menteri Kominfo menyatakan momentum kali ini merupakan hal yang luar biasa, dimana negara seharusnya sudah memberikan kesempatan untuk mengisi dan menikmati waktu purnatugas kepada mantan Sekretaris Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo itu.

“Tetapi negara tetap memanggil Pak Basuki dan Ibu Niken untuk melanjutkan karyanya. Karena memang ada kekuatan, kewenangan, kelebihan yang secara khusus sebagai guru bagi ASN yang lain,” ujarnya.

Kembangkan Keterampilan ASN
Menurut Menteri Johnny, widyaiswara merupakan jabatan fungsional yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk mengembangkan kapasitas ASN di lembaga-lembaga pelatihan pemerintah. Tugas dan profesi tersebut juga menuntut komitmen yang tinggi, ketangkasan serta kemampuan adaptasi yang mumpuni untuk bergerak seiring dengan perubahan situasi.

“Apalagi di saat pandemi COVID-19 tuntutan yang paling besar saat COVID-19 adalah kemampuan adaptasi dan kemampuan secara tepat merubah peran situasi. Ini cocok betul, adaptasi dengan situasi yang baru dan mengambil peran yang baru sebagai widyaiswara,” ungkapnya.

Indonesia, lanjut Menteri Kominfo, membutuhkan peran widyaiswara yang cakap untuk mempersiapkan akselerasi bagi terbentuknya SDM telekomunikasi dan SDM digital. Hal itu juga dibutuhkan dalam rangka mendorong akselerasi transformasi digital.

“Sebagai upaya bersama kita untuk membajak momentum krisis pandemi COVID-19 dan mewujudkan Indonesia Maju. Untuk menjamin kebijakan transformatif ini berjalan sesuai target yang telah kita bersama tetapkan, diperlukan peningkatan ASN yang terampil dalam digital dan mampu mengiringi realisasi kebijakan sektor ini,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, keterampilan yang dibutuhkan tidak hanya keterampilan teknis namun juga perubahan cara berpikir yang taktis dan dinamis serta pengembangan karakter yang adaptif dan kreatif. “Upaya

pengembangan ASN terampil digital juga sejalan dengan salah satu arahan Presiden terkait transformasi digital yakni menyiapkan talenta digital dilakukan untuk melengkapi upaya percepatan digital lainnya, perluasan infrastruktur, akses internet, pengembangan dan adopsi teknologi digital, penyiapan regulasi transformasi digital serta penguatan kolaborasi internasional,” tuturnya.

Menteri Kominfo menegaskan era digital merupakan suatu era baru dan tidak terbatas dengan kedaulatan teritorial semata. Menurutnya, era digital juga menjadi ekstrateritorial. Dalam beberapa tahun ke depan, Kementerian Kominfo akan membangun beberapa fasilitas pendukung transformasi digital.

“Di antaranya Pusat Data Nasional, Pusat Monitoring Telekomunikasi Nasional dan berbagai titik infrastruktur internet. Perkembangan ini mendorong urgensi untuk menyiapkan ASN yang terampil di sektor digital untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologi dan regulasi yang disiapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan menciptakan ruang-ruang digital yang sehat, yang positif dan yang produktif,” jelasnya.

Apresiasi

Pengangkatan Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama Kominfo berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama.

“Saya mengucapkan selamat bertugas dan selamat mengabdikan kepada Ibu Rosarita Niken Widiastuti dan Bapak Basuki Yusuf Iskandar untuk jabatan serta tanggung jawab barunya. Mari tetap menjaga profesionalisme dan meningkatkan kolaborasi dalam satu misi dan visi untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat dan mandiri,” ujar Menteri Johnny.

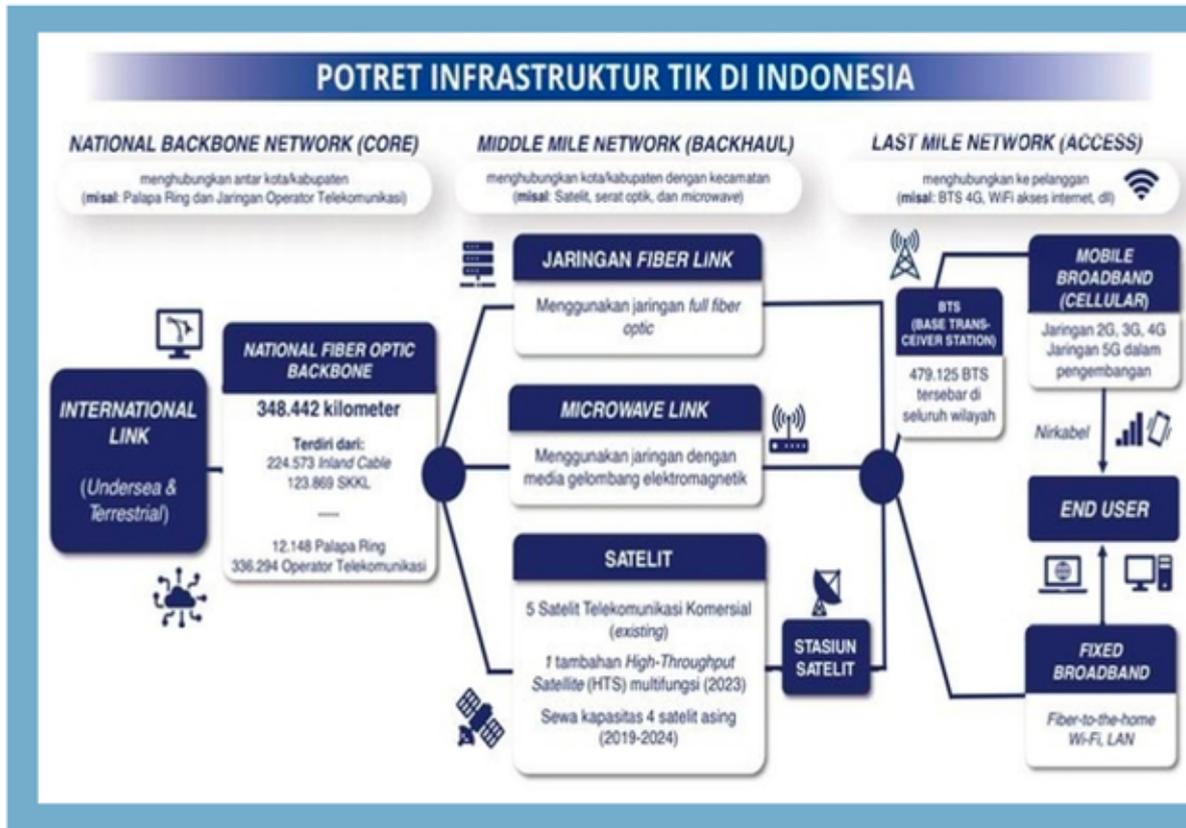
Menurut Menteri Kominfo, penghargaan yang diberikan kepada dua pejabat tersebut perlu dilihat sebagai bentuk penghargaan yang sebelumnya menjalankan pengabdian sebagai Sekjen dan Kepala Balitbang SDM Kementerian Kominfo.

“Secara lebih luas pelantikan ini adalah bagian dari upaya kementerian Kominfo untuk mendukung perwujudan masyarakat digital Indonesia, masyarakat di mana ditandai dengan demografi bonus dengan usia produktif masyarakat kita dalam jumlah yang cukup besar,” jelasnya.

Pengangkatan dan Pelantikan Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama Kominfo disaksikan oleh Inspektur Jenderal Doddy Setiadi dan Dirjen SDPPI Ismail. Turut hadir pejabat eselon I Dirjen IKP Widodo Muktiyo, Dirut BAKTI Anang Latif, Staf Khusus Menteri Dedy Permadi, serta Staf Khusus Menteri Philip Gobang.

BAKTI Kominfo Pacu Infrastruktur TIK

Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/350201-bakti-kominfo-pacu-infrastruktur-tik>



B

adan

Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serius mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di dua provinsi Nusa Tenggara, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pembangunan infrastruktur itu merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mendukung akselerasi digital nasional. Mengingat, banyak daerah atau desa/kelurahan di kedua provinsi tersebut yang belum terjangkau jaringan 4G atau akses internet cepat seperti WIFI, secara khusus di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menjadi wilayah kerja BAKTI.

"Ada 70 desa di NTB yang akan BAKTI bangun BTS 4G, ada 35 site pada Tahun 2020 dan sisanya 35 site pada Tahun 2021" kata Menteri Kominfo Johnny G Plate saat melakukan kunjungan kerja ke NTB dan NTT, pada Kamis dan Jumat (24-25/9). Adapun untuk provinsi NTT sendiri ada 645

desa/kelurahan yang belum terjangkau sinyal 4G. Sebanyak 542 desa berada di wilayah 3T dan 103 desa berada di wilayah komersial atau non-3T.

Johnny mengatakan wilayah 3T merupakan tugas BAKTI untuk berbakti kepada negeri. Sebab, dalam upaya mencapai akselerasi digital, akses internet sangat penting untuk mendukung tugas pelayanan pemerintah desa/kelurahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan di daerah 3T sehingga, di wilayah-wilayah tersebut, pihaknya telah mempersiapkan pembangunan yang ditargetkan akan dituntaskan pada akhir 2022 hingga awal 2023.

Untuk wilayah non-3T atau komersil, pemerintah bekerja sama dengan operator selular untuk turut berkontribusi membangun infrastruktur tersebut.

Direktur BAKTI Kominfo Anang Latif menyampaikan pihaknya mendapat tugas dari kementerian untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur TIK termasuk base transceiver station (BTS) atau tower pemancar sinyal 4G. Untuk wilayah NTB, BAKTI telah melakukan survei untuk persiapan pembangunan 35 BTS, sedangkan di NTT sebanyak 421 BTS untuk tahun 2021.

"Bahkan sebelum awal 2023 atau akhir 2022 harus sudah selesai. Jadi kami bisa menawarkan kerja sama dengan operator selular yang akan mengoperasikan BTS," ucap Anang. Untuk itu, Anang meminta dukungan semua pihak, khususnya para kepala daerah di NTB dan NTT guna memastikan pembangunan BTS berjalan sesuai rencana.

Pariwisata Super Prioritas

Provinsi NTB dan NTT merupakan dua provinsi kepulauan yang mempunyai potensi pariwisata menjanjikan. Pemerintah telah menetapkan Mandalika di NTB dan Labuan Bajo di NTT sebagai tempat wisata super prioritas yang harus digenjut pembangunannya termasuk infrastruktur TIK.

Selain 35 BTS untuk daerah 3T, BAKTI Kominfo juga telah dan tengah membangun 9 BTS di wilayah Lombok. Itu untuk mendukung persiapan Mandalika yang akan menggelar MotoGP 2021. Sebagai salah satu daerah wisata super prioritas, infrastruktur TIK di wilayah itu haruslah optimal. Pasalnya, Mandalika sebagai etalase nasional Indonesia yang akan membuka mata dunia melalui pergelaran MotoGP 2021.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah akan menjadikan Mandalika unggul teknologi. Menurut Johnny, Mandalika tidak hanya menjadi *the latest model of MotoGP*, tapi juga menjadi *the newest technology* di dunia.

Sementara itu, di wilayah Labuan Bajo, pembangunan infrastruktur TIK pun sangat penting untuk segera dituntaskan. Sebab, kota di ujung barat Pulau Flores itu, selain mempunyai kekayaan alam yang mendunia, juga memiliki agenda penting internasional. Labuan Bajo akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 dan ASEAN Summit 2023.

"Hingga akhir 2020, Kominfo menargetkan pembangunan 151 lokasi BTS USO (*universal service obligation*) 4G (di NTT). Khusus di wilayah Labuan Bajo, ada 40 titik area wisata, dan tahun ini 18 BTS diharapkan dapat selesai pembangunannya," kata Johnny.

Adapun, untuk mendukung akses internet maksimum, BAKTI juga bekerja sama dengan ISP telah membangun 27 titik super wifi yang meng-cover 57 lokasi di Manggarai Barat. Menkominfo berharap Super WIFI yang dibangun di Labuan Bajo sebagai pilot project Kemenkominfo. Bila project itu berhasil, ke depannya akan dibangun di wilayah lain di Tanah Air. (S3-25)

Transaksi E-Commerce Naik 400%, Kominfo Latih 2.500 UMKM Jualan Online

Sumber: <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f7ac57e7d674/transaksi-e-commerce-naik-400-kominfo-latih-2500-umkm-jualan-online>



ANTARA FOTO/DEDHEZ ANGGARA/WSJ. Ilustrasi, perugas Bank Indonesia Cirebon menunjukkan transaksi melalui aplikasi elektronik di Desa Kenanga, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (24/7/2020).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, penjualan produk di media sosial dan e-commerce melonjak 400% per April. Kementerian pun melatih 2.500 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berjualan online. Pelaku usaha tersebut berdomisili di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ini karena, UMKM yang dinilai berhasil merambah layanan digital berdomisili di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten.

Oleh karena itu, pelatihan yang diinisiasi oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA)

ini berfokus menasar pedagang di 3T. Program digelar sejak hari ini hingga 12 Desember. "Itu untuk memperluas akses pemberdayaan adil dan merata," kata Menteri Kominfo Johnny G Plate dalam acara bertajuk 'Peluncuran Pelatihan Digital UMKM Indonesia', Senin (5/10).

Selain 3T, pemerintah menasar UMKM di daerah pariwisata super prioritas. Ada lima wilayah yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Pelatihan menggunakan 60 modul dan dilakukan secara online. Ada 6.500 pelaku UMKM yang mendaftar pada gelombang pertama, sementara daya tampungnya hanya 2.500.

Johnny mengatakan, program itu terbagi menjadi tiga segmen. Untuk pengusaha pemula, akan berfokus mematangkan pemahaman dan bisnis supaya dapat masuk ke ekosistem digital. Sedangkan pelaku usaha yang sudah lama berjalan online, akan mendapatkan bimbingan dalam mengembangkan usaha.

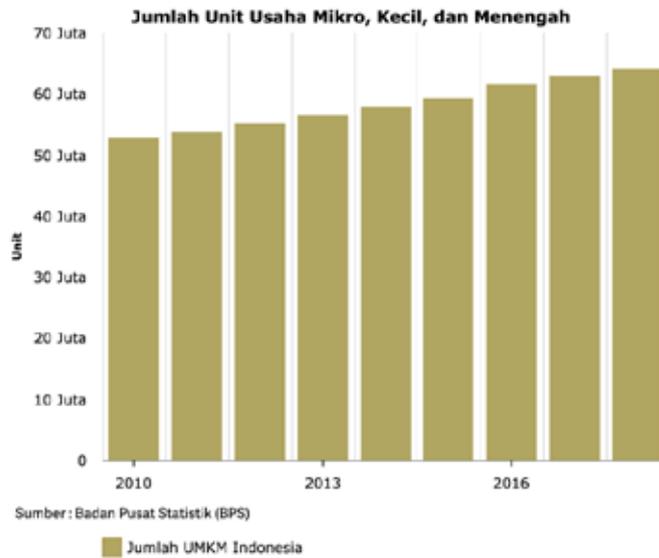
Selain pelatihan, Kominfo menambah kapasitas jaringan di wilayah 3T. Kementerian mencatat, ada 12.548 desa di Tanah Air yang belum mendapatkan akses internet generasi keempat (4G). Mayoritas atau 9.113 di antaranya berada di daerah 3T. Pemerintah menargetkan semua desa itu bisa mendapatkan akses 4G pada 2022.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM agar infrastruktur digital tersebut dimanfaatkan secara optimal. "Kami tidak bisa membiarkan (infrastruktur) di daerah 3T tanpa pemanfaatan positif," kata Direktur Utama Bakti Kementerian Kominfo Anang Latif.

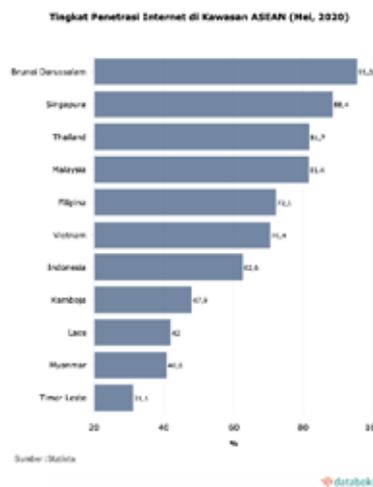
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mencatat, baru 14,6% atau sekitar 9,4 juta UMKM yang masuk ke ekosistem digital per Juli lalu. Meski tergolong sedikit dibandingkan total, jumlahnya hampir mencapai target 10 juta per tahun ini.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM agar infrastruktur digital tersebut dimanfaatkan secara optimal. "Kami tidak bisa membiarkan (infrastruktur) di daerah 3T tanpa pemanfaatan positif," kata Direktur Utama Bakti Kementerian Kominfo Anang Latif.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mencatat, baru 14,6% atau sekitar 9,4 juta UMKM yang masuk ke ekosistem digital per



databoks



databoks

Juli lalu. Meski tergolong sedikit dibandingkan total, jumlahnya hampir mencapai target 10 juta per tahun ini.

Di satu sisi, pemerintah juga mencatat bahwa tingkat keberhasilan UMKM dalam menjual produknya di platform digital hanya sekitar 5%. Menkop UKM Teten Masduki mengatakan, salah satu penyebab yakni minimnya edukasi mengenai penjualan produk secara online.

Jika kondisi tersebut tidak ditanggulangi, maka sulit untuk memulihkan bisnis UMKM di tengah pandemi corona. Padahal,

60% UMKM terpukul pagebluk COVID-19. "Kondisi ini cukup berat dan perlu ada upaya-upaya untuk terus mendukung para pelaku UMKM," kata Teten saat mengikuti diskusi Katadata Insight Center (KIC) bertajuk 'Kebangkitan UMKM di Era Pandemi COVID-19' di Jakarta, Juni lalu (26/6).

Berdasarkan survei KIC, UMKM menghadapi beberapa kendala dalam menggunakan teknologi digital. Rinciannya, tak dapat menggunakan internet (34%), kurangnya pengetahuan menjalankan usaha online (23,8%), pegawai tidak siap (19,9%), infrastruktur belum layak (18,4%), dana kurang memadai (9,7%), dan banyaknya pesaing (3,4%).

Survei tersebut dilakukan terhadap 206 responden UMKM di lima kategori usaha. Mereka berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian besar UMKM ini memiliki skala usaha mikro dengan omzet di bawah Rp 300 juta per tahun. Hasil survei juga menunjukkan bahwa 82,9% UMKM terpukul pandemi virus corona. Hanya, 5,9% yang penjualannya positif selama krisis kesehatan saat ini.

1 Tahun Johnny G. Plate



1 Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate (berdiri) melambaikan tangan kepada Presiden Joko Widodo saat diperkenalkan dalam pengumuman Menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju akan membantu Jokowi-Maruf pada periode 2019-2024

2 Para Menteri Kabinet Indonesia Maju membaca sumpah dalam rangkaian pelantikan Kabinet Indonesia Maju, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri dan 4 Pejabat Setingkat Menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024

3 Menkominfo Kabinet Kerja Periode 2014-2019, Rudiantara (kiri) dan Menkominfo Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, Johnny Gerard Plate (kanan)

Oktober 2019 – 2020



4 Menkominfo Johnny G. Plate (tengah) didampingi Istri Maria Anna, berfoto bersama pemain musik tradisional Manggarai, Flores, NNT saat menggelar Open House Natal 2019, di rumah kediaman Jalan Bango I Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (25/12/2019)

5 Sejumlah Pejabat negara turut hadir di rumah kediaman Menkominfo Johnny G. Plate untuk beramah tamah saat Menkominfo menggelar Open House Natal 2019, di rumah kediaman Jalan Bango I Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (25/12/2019)

6 Menkominfo Johnny G. Plate menyerahkan bantuan berupa barang dan uang secara simbolik kepada korban banjir di lokasi pengungsian kepada Kepala Sekretariat Pengelola Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari, Suprpto, Selasa (07/01/2020)



Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Dirjen IKP Kemkominfo, Widodo Muktiyo memberikan cinderamata kepada Ketua Umum PWI, Atal Sembiring Depari beserta rombongan, usai *meeting* membicarakan tentang pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 yang akan dilaksanakan di Banjarmasin, Kal-Sel, Kamis (9/1/2020)

Dirjen SDPPI Kemkominfo, Ismail dan Kepala BPSDM Kemenhub, Umiyatun Hayati Triastuti melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama, disaksikan langsung Menkominfo Johnny G. Plate dan Menhub Budi Karya Sumadi, di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jakarta, Senin (13/1/2020)

Menteri Kominfo Johnny G. Plate melakukan pemaparan saat Raker Menkominfo dengan Komisi I DPR RI Tentang "Program Prioritas Sektor Komunikasi dan Informatika Nasional", di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (5/2/2020)



10



11



12

10 Menkominfo Johnny G. Plate (kiri) menerima cinderamata berupa bingkai foto bersama peserta Diklat Sesparlu Angkatan Ke-64 yang diberikan langsung oleh Direktur Sesparlu, June Kuncoro (kanan), di Pusdiklat Kemenlu, Sisingamangraja, Jakarta, Jumat (13/3/2020)

11 Menkominfo, Johnny G. Plate mengatakan Kemkominfo meluncurkan beberapa inisiatif dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19, di antaranya bidang infrastruktur telekomunikasi, kualitas jaringan internet terus dijaga untuk memastikan layanan prima, di Ruang Serbaguna Kemkominfo, Jakarta, Senin (18/5/2020)

12 Menkominfo Johnny G. Plate (tengah) bersama Dirut BAKTI Kominfo Anang Latif (kanan), Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail (kiri) saat pembukaan webinar "Mendorong Akselerasi Transformasi Digital" di Kementerian Kominfo, (20/7/2020)



1 Papua Resmi Memisahkan Diri Dari NKRI

Isi Hoaks: Beredar unggahan di Facebook yang berisi narasi bahwa Papua resmi memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Unggahan tersebut juga memuat sebuah video seseorang yang mengklaim dirinya sebagai Presiden Negara Federal Papua Barat. Unggahan tersebut dimuat pada Sabtu, 24 Oktober 2020.

Klarifikasi: Dilansir dari situs medcom.id, klaim bahwa Papua resmi memisahkan diri dari NKRI adalah salah. Faktanya tidak ada informasi resmi mengenai hal itu. Kelompok yang menamakan diri Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tidak pernah diakui Pemerintah RI. Dilansir dari Pasific Pos, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Yonas Alfons Nussy meminta masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi terkait dengan NRFPB tersebut. Yonas meminta NRFPB tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif.

2 Klaim Aliansi Dokter Dunia soal COVID-19



Isi Hoaks: Beredar di media sosial sebuah video mengatasnamakan Aliansi Dokter Dunia yang mengklaim bahwa Virus Corona adalah virus flu biasa dan tidak ada pandemi COVID-19. Dalam video tersebut mereka mengatakan lockdown di seluruh dunia untuk mencegah Virus Corona harus diakhiri.

Klarifikasi: Faktanya, klaim tersebut tidak tepat. Para ilmuwan secara umum menyatakan penyebab pandemi saat ini adalah Virus Corona baru SARS-CoV-2 dan bukan jenis virus influenza. Juru Bicara Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito ikut angkat bicara menanggapi video ini. Prof Wiku menegaskan pernyataan dalam video tersebut tidak benar. Prof Wiku menekankan, masyarakat harus mampu memilah mana informasi yang benar. Sumber informasi terpercaya antara lain seperti WHO, PBB, dan CDC. Sedangkan untuk Indonesia, bisa bersumber dari Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19.

3 Vaksin COVID-19 Dapat Mengubah DNA Manusia

Isi Hoaks: Telah beredar unggahan di media sosial Facebook berisi klaim yang menyebut penggunaan vaksin COVID-19 ke dalam tubuh dapat mengubah DNA manusia. Disebutkan juga bahwa vaksin ini sangat berbahaya untuk tubuh manusia.

Klarifikasi: Peneliti dari Aliansi Sains Universitas Cornell, Mark Lynas, menyatakan bahwa tidak ada kandungan dalam vaksin yang mampu berintegrasi dan mengubah DNA manusia secara genetik. Oleh karena itu, informasi yang menyebut vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA manusia adalah hoaks.

4 Bioskop XXI Dibuka, Penonton Wajib Keluar Studio Tiap 30 Menit

Isi Hoaks: Informasi terkait adaptasi perubahan perilaku di bioskop menjadi perbincangan di media sosial. Dalam informasi disebutkan bahwa Penonton Wajib Keluar Studio Tiap Jeda 30 Menit untuk Hirup Udara Segar. Informasi tersebut diunggah dengan narasi *"Ketatnya protokol kesehatan dalam menikmati tontonan bioskop, sudah mulai harus dibiasakan. Kalo tidak, penonton yang akan menanggung risikonya"*. Narasi tersebut disertai dengan lampiran gambar artikel berjudul "Bioskop XXI Kembali Dibuka, Penonton Wajib Keluar Studio Tiap Jeda 30 Menit untuk Hirup Udara Segar!".

Klarifikasi: Berdasarkan hasil penelusuran timesindonesia.co.id, klaim aturan penonton diharuskan keluar teater untuk menghirup udara segar yang baru setiap 30-60 menit di Bioskop XXI adalah salah. Menurut informasi dari Satgas Penanganan COVID-19, aturan tersebut tidak termasuk dalam protokol kesehatan COVID-19. Djonny Syafruddin selaku Ketua GPBSI

mengatakan bahwa bioskop telah resmi dibuka berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020.

5 Yang Membakar Halte dan Pos Polisi dalam Demo Omnibus Law Adalah Polisi Sendiri

Isi Hoaks: Telah beredar di media sosial Facebook, beberapa unggahan foto kebakaran halte dan pos Polisi. Dalam unggahan tersebut dikatakan bahwa yang membakar halte dan pos Polisi adalah Polisi itu sendiri, tetapi mereka memfitnah TNI dan rakyat.

Klarifikasi: Faktanya, menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus hingga kini Polisi masih menyelidiki massa perusuh yang merusak halte Transjakarta hingga pos polisi saat demo. Polisi mengklaim memiliki bukti video. Polda Metro Jaya akan segera menyelidiki aksi perusakan sejumlah fasilitas umum dan Pos Polisi, yang diduga dilakukan oleh perusuh yang menyusup ke tengah massa pengunjuk rasa. Polisi pun menengarai adanya pihak yang menunggangi kerusuhan massa aksi tolak Omnibus Law tersebut.

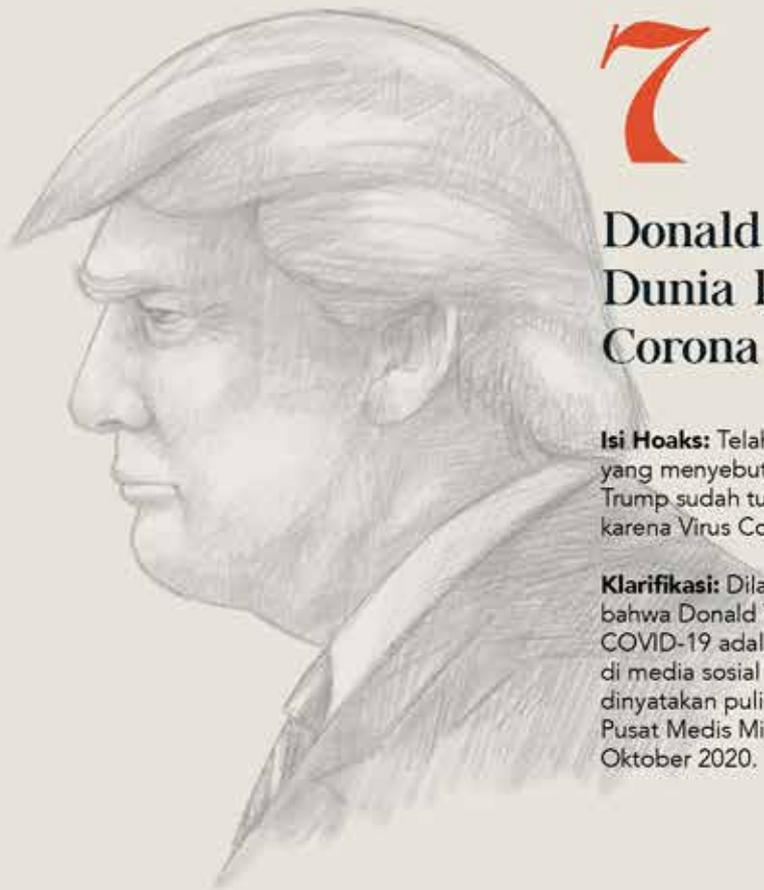


6

Memakai Masker Terlalu Lama dapat Menyebabkan Kematian

Isi Hoaks: Telah beredar unggahan di media sosial Facebook berisi sebuah video dan tangkapan layar dengan klaim bahwa memakai masker terlalu lama dan terlalu sering dapat menyebabkan hypoxia dan meninggal karena keracunan karbon dioksida (CO₂)

Klarifikasi: Setelah ditelusuri, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari situs [hopkinsallchildrens.org](https://www.hopkinsallchildrens.org), Spesialis Penyakit Menular Pediatrik Matthew Thomas, M.D mengatakan, saat kita mengeluarkan napas, karbon dioksida meninggalkan paru-paru dan keluar dari tubuh melalui hidung atau mulut. Karbon dioksida merupakan gas yang terdiri dari molekul kecil. Molekul-molekul ini sangat kecil sehingga bisa melewati banyak bahan, termasuk bahan yang digunakan untuk membuat masker. Jika kita menggunakan masker kain atau medis, karbon dioksida akan keluar dengan aman. Itu tidak akan menumpuk di dalam masker atau membuat kita sakit.



7

Donald Trump Meninggal Dunia karena Virus Corona di Usia 74 Tahun

Isi Hoaks: Telah beredar unggahan di media sosial yang menyebut Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sudah tutup usia. Disebutkan dia meninggal karena Virus Corona COVID-19.

Klarifikasi: Dilansir dari laman situs [Liputan6.com](https://www.liputan6.com), klaim bahwa Donald Trump meninggal dunia karena COVID-19 adalah tidak benar. Faktanya, dia masih aktif di media sosial Twitter. Donald Trump juga sudah dinyatakan pulih dari COVID-19 usai meninggalkan Pusat Medis Militer Nasional Walter Reed, pada 5 Oktober 2020.

8 Suhu Panas Masker dapat Membuat Penderita Hipotiroid Positif COVID-19

Isi Hoaks: Beredar di media sosial postingan yang berisi klaim masker bisa menyebabkan seseorang yang hipotiroid jadi positif COVID-19. Dengan narasi sebagai berikut: "Suhu panas dan CO2 akibat selalu pakai masker akan membuat Rapid dan PCR bisa (+) pd hypothyroid. Hati2i ketangkap alat".

Klarifikasi: Dilansir dari Liputan6.com, dr. RA Adaninggar, Sp.PD menjelaskan klaim dalam postingan tersebut tidak berdasar. Faktanya, hipotiroid adalah kondisi kurangnya hormon tiroid di dalam tubuh karena beberapa faktor seperti peradangan, infeksi, autoimun, dan kekurangan yodium. Jadi tidak ada hubungannya dengan suhu panas dan CO2 pada masker



9 Pernyataan Perkumpulan Dokter Eropa: COVID-19 Tak Berbahaya

Isi Hoaks: Beredar postingan di media sosial Facebook, informasi perkumpulan dokter Eropa mengeluarkan pernyataan Virus Corona baru (COVID-19) tidak memiliki efek berbahaya.

Klarifikasi: Berdasarkan hasil penelusuran Liputan6.com, pernyataan perkumpulan dokter Eropa tentang COVID-19 tidak memiliki efek berbahaya adalah tidak benar. Faktanya, COVID-19 sejauh ini telah membunuh lebih banyak orang di AS bila dibandingkan dengan gabungan (jumlah kasus dalam) lima musim flu terakhir, dan ratusan lainnya meninggal setiap hari. Selain itu, sebuah studi CDC yang dirilis pada 20 Oktober menemukan pasien yang dirawat di rumah sakit dengan COVID-19 di Administrasi Kesehatan Veteran memiliki risiko kematian lima kali lebih tinggi daripada pasien flu. COVID-19 lebih mematikan daripada flu musiman, dan beberapa negara Eropa sedang memerangi gelombang kedua kasus tersebut.

10

Presiden Jokowi Lanjutkan 3 Periode demi Proyek Infrastruktur Nasional

Isi Hoaks: Beredar unggahan yang membagikan postingan disertai gambar, menarasikan bahwa Presiden Jokowi akan melanjutkan masa jabatannya menjadi 3 periode demi menggarap proyek infrastruktur berupa jalan kereta api penghubung Mali-Senegal.

Klarifikasi: Faktanya, klaim tersebut tidak berdasar. Tidak ada pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat terkait penambahan 1 periode lagi demi infrastruktur. Penambahan masa jabatan presiden hingga 3 periode akan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 7 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya menjabat selama 5 tahun dalam 1 periode, selanjutnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Adapun penambahan atau pengurangan periode harus disetujui oleh DPR lalu diputuskan oleh MK, namun sampai dengan saat ini tidak ada wacana bahkan keputusan atas penambahan 1 periode tersebut. Terkait proyek jalur kereta api sepanjang 1.023 km sendiri merupakan garapan PT INKA (Industri Kereta Api). PT INKA dalam hal ini adalah sebagai project developer yang melakukan upgrading jalur kereta api penghubung Mali-Senegal.



Sisternet Dukung Peningkatan **Skill Perempuan** di Masa Pandemi. #MajuTerusUntukIndonesia

Selama masa pandemi Covid-19 hingga era adaptasi kebiasaan baru, melalui Sisternet, PT XL Axiata Tbk tidak pernah putus memberikan informasi dan pembelajaran bagi perempuan Indonesia. Lewat beragam *event online* yang dikemas menarik dan berlangsung secara berkala, Sisternet berhasil memberikan edukasi kepada sekitar 7.000 perempuan Indonesia guna menambah *soft skill* mereka untuk terus bisa berkreasi di masa sulit seperti sekarang ini.



Ada beberapa contoh kegiatan *online* yang telah sukses menggaet penerima manfaat Sisternet, terutama para pelaku usaha kecil menengah. Salah satunya adalah Webinar *Content Creator Class* dengan tema "Strategi Membuat Konten Viral untuk Bisnis" bersama narasumber Victoria Wong (*Content Creator* dan *Founder Start Your Content Academy*). Pada Webinar yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam ini dibahas bagaimana membangun dan membuat konten media sosial yang menarik sehingga bisa mendapatkan perhatian pembeli.

Selain Webinar dan *ShareCareInspire Class* ada juga #SisterTalk. Dengan menggunakan *platform* Instagram Live, Sisternet menghadirkan narasumber dan *host* yang memang berkecimpung di bidang yang sesuai dengan tema pilihan.

Seperti contohnya bulan September lalu diadakan #SisterTalk: "Protokol Kesehatan *New Normal* untuk Pelaku Usaha dan Konsumen". Menghadirkan narasumber: Kaisa Lana Afida, seorang dokter umum (*Live Chat KlikDokter*) dengan *host* Hada Kusumonegoro (*Momprenneur*).

Sumber: dokumentasi Sisternet

Tidak berhenti di situ saja, ShareCareInspire Class hadir dengan tema “Covid19 dan Digitalisasi - Cara Baru Perempuan Melawan Pandemi”. Acara ini bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan berhasil mendapatkan dukungan dari para kaum pemimpin perempuan dari berbagai sektor.

Disiarkan secara langsung melalui *platform* Youtube Sisternet ID Official, acara tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber yang keren. Mereka antara lain Menteri Bintang Puspayoga (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI), Dian Siswarini (CEO dan Presiden Direktur XL Axiata), dr. Reisa Broto Asmoro (Dokter), dan juga Dian Sastrowardoyo (Pekerja Seni).



Nah, itulah beberapa jenis kegiatan *online* yang Sisternet adakan sepanjang masa pandemi dan era *new normal* ini. Demi meningkatkan semangat dan membuat para perempuan Indonesia #JadiLebihBaik, Sisternet terus berupaya memberikan kelas-kelas yang *relate* dan bisa bermanfaat bagi para perempuan pelaku UKM atau yang baru akan merintis usaha rumahan.

Aplikasi Sisternet Untuk Perempuan Indonesia Jadi Lebih Baik



Sisters, manfaatkan aplikasi Sisternet untuk tingkatkan *soft-skill* kamu melalui berbagai macam kelas webinar. Untuk kamu yang sedang membangun usaha, ingin mengembangkan karir atau mencari informasi *digital parenting*, silahkan buka aplikasi Sisternet dan temukan semua keperluanmu.

Yuk, *install* aplikasi Sisternet lewat Google Play Store atau Apple App Store sekarang! Mari bergabung dengan Inspiring Sisters yang sukses dan inspiratif. Sisters yang saling mendukung akan ikut berkontribusi memajukan perempuan Indonesia untuk #JadiLebihBaik!

Sumber: dokumentasi Sisternet

Sispreneur: Dorong Perempuan Pelaku Usaha Mikro Go Digital



Digelar secara *online* di 3 kota besar di Indonesia selama sekitar 3 bulan, Sispreneur mendapat sambutan hangat dari para pelaku usaha mikro yang menjadi pesertanya. Hal ini terlihat dari jumlah pesertanya yang mencapai 200 pelaku usaha mikro yang berasal dari Sumatera Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Nusantara. Mereka merupakan pelaku usaha mikro yang selama ini belum *go-online*. Mayoritas dari mereka memiliki produk makanan dan kerajinan tangan.

Kelas Sispreneur ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu *product ready*, *market ready* dan *digital and marketplace ready* yang dilaksanakan secara *online*, menyesuaikan dengan protokol kesehatan.

Selain mendapatkan sertifikat, para peserta juga mendapatkan *starter pack*/SIM card XL Biz secara gratis dengan *benefit* Paket Data 5 GB, *Unlimited Call & SMS* ke sesama XL, 30 Menit + 30 SMS ke operator lain, *Unlimited WA*, Line, akses gratis Facebook & Instagram sebesar 1 GB, dan Pulsa sebesar Rp 5.000.

Promosi Produk Lewat Toko Sister



Bertajuk Toko Sister, program baru ini bertujuan meningkatkan penjualan secara *online* dan juga meningkatkan *brand awareness* dari produk yang kamu miliki. Jadi, selain bisnis para Sisters bisa dikenal luas, kesempatan untuk mendapatkan cuan juga semakin terbuka lebar.

Caranya, kamu hanya isi *Google form* di bit.ly/TokoSister dan juga *follow* Instagram @sisternetid & @xlaxiata_untukindonesia. Setiap minggunya Sisternet akan mempromosikan 2 (dua) profil usaha/jasa UMKM perempuan yang terpilih. Cek *detail*-nya di www.sisternet.co.id.

Sumber: dokumentasi Sisternet

sisternet.co.id [@sisternetid](https://www.instagram.com/sisternetid) [@xlaxiata_untukindonesia](https://www.instagram.com/xlaxiata_untukindonesia) [/sisternetid](https://www.facebook.com/sisternetid) [SisternetID Official](https://www.youtube.com/channel/UC...)

MEDIA CETAK



PELUNCURAN ANUGERAH JURNALISTIK KOMINFO 2020

28 SEPTEMBER 2020

FOTO JURNALISTIK

Bangkit dari pandemi COVID-19

Menuju Masyarakat Produktif



Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian

Ibu R Niken Widiastuti

Bapak Basuki Yusuf Iskandar

Tanpa lelah
membangun negeri...



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat, 10110
(021)3452841

majalahkominfonext@kominfo.go.id